

RENCANA STRATEGIS

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



2025–2029

PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

**RENCANA STRATEGIS
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen. PAUD, Dikdas, dan Dikmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), mempunyai tugas fungsi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan tugas fungsi tersebut merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) (Renstra) Ditjen. PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2025-2029 Kemendikdasmen.

Renstra sebagai dokumen utama yang memuat visi, misi dari BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta kebijakan, tujuan strategis, sasaran program dan indikator kinerja program (IKP) pembangunan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, Renstra ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam rencana kinerja atau program kerja tahunan yang sekaligus juga menjadi rujukan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan dalam periode lima tahunan.

Renstra BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penggerak sektor pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah hingga periode tahun 2029. Renstra BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 ini mendukung pencapaian program Kemendikdasmen.

Pangkalpinang, 31 Oktober 2025

Kepala



Guntoro Wahyu Wijanarko, ME

NIP 197108191998031003

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	2
1.1.1 Partisipasi Pendidikan	2
1.1.2 Kualitas Pendidikan	27
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	59
1.2.1 Potensi	59
1.1.2 Permasalahan.....	64
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BPMP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	68
2.1 Visi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	68
2.2 Misi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68
2.3 Tujuan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68
2.4 Sasaran Strategis BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	69
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	73
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.....	73
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	75
3.3 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick win)	79
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	83
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	84
Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2025-2029	86
Reformasi Birokrasi	86
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	89
4.1 Target Kinerja.....	89
4.2 Kerangka Pendanaan	90
BAB V PENUTUP	91
LAMPIRAN	92
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1 APS 7-12 Tahun Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	4
Tabel 2 APS 13-15 Tahun Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	4
Tabel 3 APS 16-18 Tahun Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	4
Tabel 4 Disparitas APS 7-12 Tahun Sangat Kecil	6
Tabel 5 Disparitas APS Usia 13-15 Tahun menunjukkan penurunan dari APS Usia 7-12 Tahun	6
Tabel 6 Disparitas APS Usia 16-18 Tahun	7
Tabel 7 Indikator Kualitas Hidup Masyarakat Bangka Belitung	7
Tabel 8 Data ATS Bangka Belitung	10
Tabel 9 Kondisi APS Kabupaten/Kota Tahun 2024	11
Tabel 10 Kondisi Ruang Kelas Per Jenjang Pendidikan	21
Tabel 11 Rasio Kecukupan WC.....	23
Tabel 12 Data Satuan Pendidikan yang belum memiliki Perpustakaan.....	23
Tabel 13 Capaian Standar Sarpras Jenjang PAUD	24
Tabel 14 Capaian Standar Sarpras Jenjang SD	24
Tabel 15 Capaian Standar Sarpras Jenjang SMP	25
Tabel 16 Capaian Standar Sarana Prasarana jenjang SMA	26
Tabel 17 Target Penerima Manfaat dan Rencana SPPG Bangka Belitung (sumber : BGN Bangka Belitung)	39
Tabel 18 Penempatan SPPI di Bangka Belitung (sumber : BGN Bangka Belitung)	39
Tabel 19 Jumlah Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka	42
Tabel 20 Data Akreditasi per Kabupaten/Kota (sumber : BAN PDM Bangka Belitung)	46
Tabel 21 Statistik Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.....	57
Tabel 22 Nilai SAKIP BPMP Babel 2020-2024	58
Tabel 23 Penganggaran PEMDA Tahun 2025	66
Tabel 24 Indeks Capaian SPM PEMDA di Kepulauan Bangka Belitung	67
Tabel 25 Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69
Tabel 26 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	69
Tabel 27 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Indikator Risiko	70
Tabel 28 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 4	74
Tabel 29 Pegawai BPMP berdasarkan Jabatan	85
Tabel 30 Proyeksi Kebutuhan SDM BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	86
Tabel 31 Area Perubahan	87
Tabel 32 Rencana Target Kinerja BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	89
Tabel 33 Rencana Pendanaan.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sumber: Dapodik 2025)	3
Gambar 2 Jumlah Guru per jenjang Satuan Pendidikan (sumber: Dapodik 2025)	3
Gambar 3 Jumlah Peserta Didik (sumber: Dapodik 2025)	3
Gambar 4 Persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD.	5
Gambar 5 Alasan ATS di Bangka Belitung	11
Gambar 6 Kondisi Ruang Kelas	21
Gambar 7 Kondisi WC Siswa Laki-Laki	22
Gambar 8 Kondisi WC Siswa Perempuan	22
Gambar 9 Kondisi Perpustakaan	24
Gambar 10 Trend Capaian Literasi dan Numerasi	27
Gambar 11 Trend Proporsi Literasi yang mencapai Kompetensi Minimal per jenjang (sumber : Data Asesmen Nasional)	28
Gambar 12 Tren Capaian Literasi dan Numerasi berdasarkan Kesenjangan Gender	29
Gambar 13 Trend Iklim Keamanan dan Iklim Kebinekaan (sumber : Data Asesmen Nasional)	30
Gambar 14 Trend Capaian Iklim Inklusivitas dan Kesetaraan	31
Gambar 15 Trend Capaian Karakter (sumber : Data Asesmen Nasional)	32
Gambar 16 Trend Capaian Kualitas Pembelajaran (sumber : Asesmen Nasional)	32
Gambar 17 Persentase PAUD berdasarkan kualitas Pembelajaran	34
Gambar 18 Akreditasi PAUD Bangka Belitung	34
Gambar 19 Persentase Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sumber BAN PDM Bangka Belitung Juni 2025)	46
Gambar 20 Skor Capaian SNP Bangka Belitung	47
Gambar 21 Persentase Capaian SNP	47
Gambar 22 Persentase Capaian 8 SNP	48
Gambar 23 Persentase Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan	49
Gambar 24 Tren Anggaran Pendidikan (Triliun Rupiah) terhadap Belanja Negara (Sumber : Perpres Rincian APBN, 2009-2025)	50
Gambar 25 Tren Dana TKD terhadap Anggaran Pendidikan TA 2021-2025 (dalam triliun rupiah)	51
Gambar 26 Alokasi DTU yang Diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan Sumber: Perpres Rincian APBN, 2020-2025	52
Gambar 27 Anggaran Pendidikan Dana Transfer Khusus Tahun 2019-2025 (Triliun Rupiah)	53
Gambar 28 Anggaran Program Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan) Tahun 2023 (dalam Persen)	54
Gambar 29 Persentase Anggaran Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	55
Gambar 30 Indeks Reformasi Birokrasi Sumber: KemenPAN-RB, 2019-2024	56
Gambar 31 Capaian NKA BPMP Babel 2020-2024	58
Gambar 32 Struktur Organisasi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	84
Gambar 33 Persentase Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan	85

BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan dengan Undang-Undang 59 Tahun 2024, bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, salah satu misi (agenda) pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Transformasi Sosial, yaitu untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 mengacu pada Asta Cita. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengusung visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045' dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk mencapai visi tersebut, Prabowo-Gibran mencanangkan 8 misi yang disebut Asta Cita. Pada Asta Cita ke 4 misinya yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan pendidikan berkualitas yang merata, sehingga pendidikan menjadi inklusif dan adaptif dengan kualitas dan relevansi pendidikan yang terus meningkat sesuai tuntutan global dan zaman, berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat. Upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah melalui penyediaan layanan pendidikan bermutu untuk semua.

Pendidikan bermutu untuk semua diperlukan untuk dapat memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang aspek kewilayahan, gender, kelompok ekonomi-sosial-budaya, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pendidikan bermutu diharapkan menghasilkan lulusan pendidikan yang berkualitas, yang berkeimanan dan berketakwaan terhadap Tuhan YME, berkewarganegaraan, bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, mandiri, sehat, dan komunikatif. Untuk itu, diperlukan adanya perencanaan berkualitas yang memuat arah kebijakan, strategi dan program prioritas, yang akan memastikan pelaksanaan pembangunan pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan, partisipatif, dan tepat sasaran.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan program prioritas nasional yaitu percepatan wajib belajar 13 Tahun dan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Untuk mencapai program tersebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Pendidikan Lainnya melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdasarkan Pemendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan

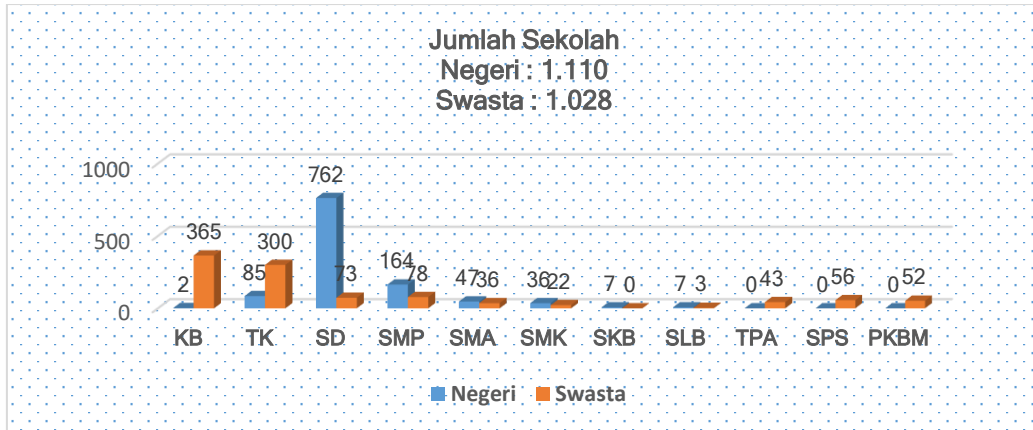
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dirjen Paud, Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta menyelenggarakan fungsi pemetaan mutu pendidikan, pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak dan pelaksanaan urusan administrasi.

Rencana Strategis BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Rencana Strategis BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memuat rumusan kebijakan dan strategi, tujuan, sasaran strategis, serta program dan kegiatan sebagai payung agar dapat melaksanakan langkah-langkah perlu dilakukan, menyinergikan fungsi dan peran, serta melaksanakan kolaborasi dan kerja sama antar pihak dalam mendorong terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi strategi pembangunan pendidikan bagi provinsi dan kabupaten/kota, pemangku kepentingan pendidikan, dan mitra pembangunan pendidikan. Dengan rencana yang disusun, dan memastikan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, terpadu, sinergis dan kolaboratif tersebut, BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat secara optimal mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

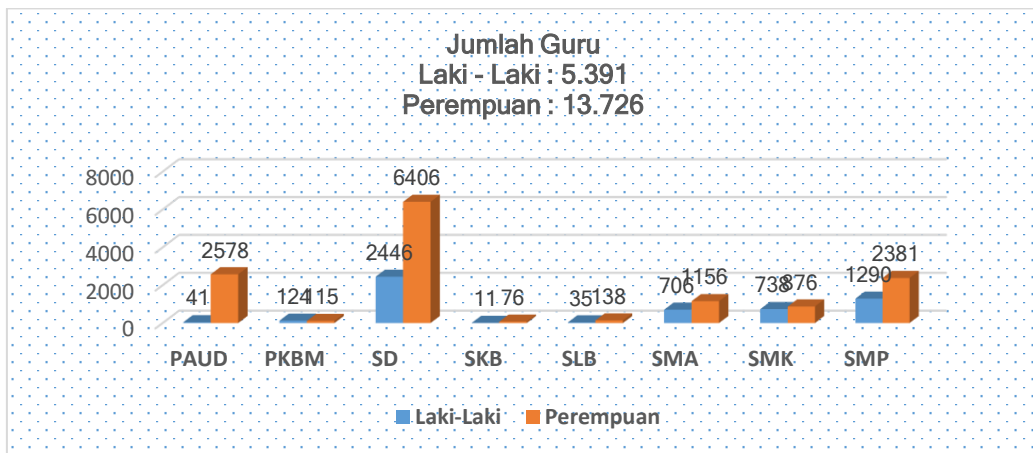
1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Partisipasi Pendidikan

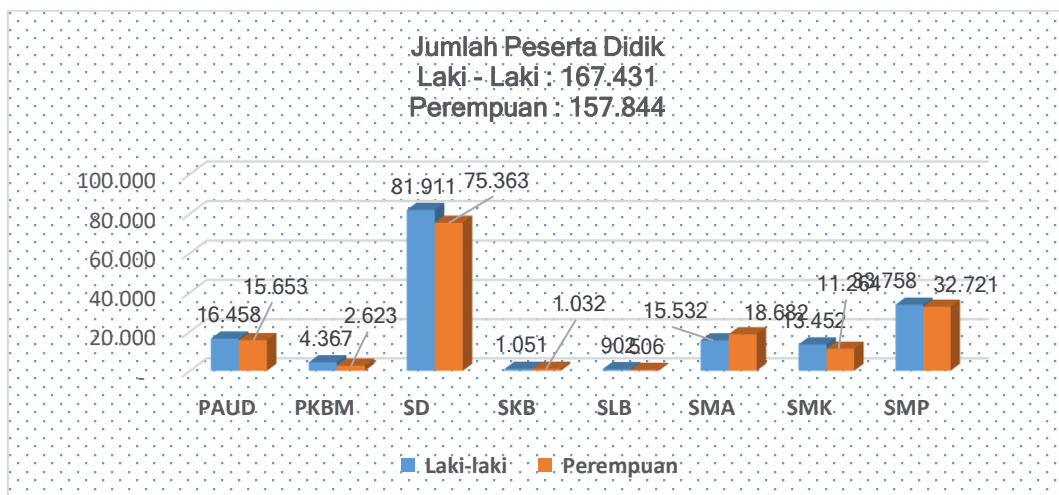
Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya dengan Ibu Kota Provinsi berada di Pulau Bangka yaitu Pangkal Pinang. BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di Pulau Bangka dan masuk dalam wilayah administratif Kotamadya Pangkalpinang. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) Tahun 2025 jumlah sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 2.138 sekolah.



Gambar 1 Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sumber: Dapodik 2025)



Gambar 2 Jumlah Guru per jenjang Satuan Pendidikan (sumber: Dapodik 2025)



Gambar 3 Jumlah Peserta Didik (sumber: Dapodik 2025)

Berbagai upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun telah menunjukkan hasil yang baik. Secara umum, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mempertahankan dan terus meningkatkan angka partisipasi di berbagai jenjang. Seperti

ditunjukkan pada Tabel 1, 2 dan 3, terdapat kondisi yang sudah mencapai tingkatan optimal, yang ditunjukkan dengan capaian pada tahun 2024 untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun sebesar 99,66% (sembilan puluh sembilan koma enam puluh enam persen), APS usia 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun, sebesar 93,52% (sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua persen) dan 72,69% (tujuh puluh dua koma enam puluh sembilan persen). Angka partisipasi sekolah 16-18 Tahun masih belum optimal, hal ini tantangan dalam partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas.

Tabel 1 APS 7-12 Tahun Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah Babel	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (Persen)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Bangka Belitung	99,85	99,76	99,7	99,47	99,41	99,51	99,66
Bangka	100	99,79	99,61	99,12	98,91	99,35	99,89
Belitung	100	99,79	99,99	99,97	99,97	99,95	99,98
Bangka Barat	100	99,82	99,08	99,29	98,67	99,39	99,98
Bangka Tengah	99,73	99,61	99,76	99,32	99,9	99,77	99,85
Bangka Selatan	99,25	99,55	99,8	99,3	99,6	99,29	98,3
Belitung Timur	100	99,86	99,93	99,91	99,95	99,43	99,89
Pangkal Pinang	99,99	99,93	99,99	99,94	99,64	99,59	99,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas Maret)

Tabel 2 APS 13-15 Tahun Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah Babel	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (Persen)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Bangka Belitung	92,7	92,87	93,34	93,17	93	93,2	93,52
Bangka	95,35	95,77	96,26	95,75	92,11	92,25	95,32
Belitung	96,35	95,82	95,76	96,02	99,15	98,56	95,62
Bangka Barat	90,1	90,58	91,41	91,27	92,05	92,4	90,96
Bangka Tengah	90,84	91,7	91,51	91,71	94,43	94,43	91,56
Bangka Selatan	87,59	87,94	88,76	88,3	90,07	90,31	93,69
Belitung Timur	90,95	91,74	91,9	91,94	90,71	91,61	91,23
Pangkal Pinang	95,43	95,56	96,34	96,08	92,88	93,15	94,53

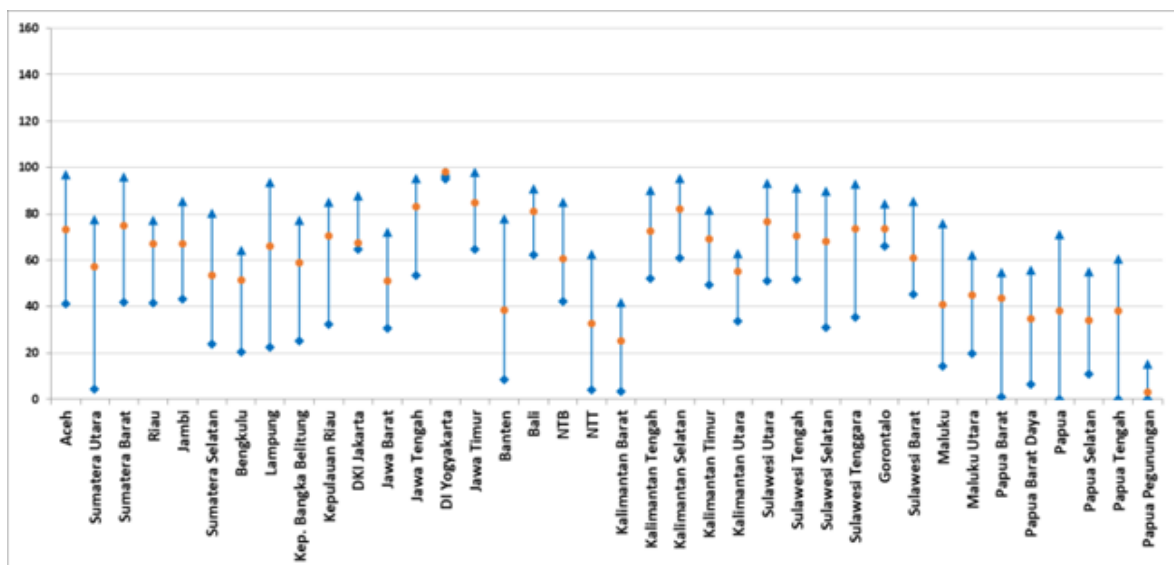
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas Maret)

Tabel 3 APS 16-18 Tahun Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah Babel	Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (Persen)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Bangka Belitung	67,11	67,79	67,75	68,15	68,42	69,53	72,69
Bangka	73,04	72,71	72,5	74,42	69,42	70,42	73,03
Belitung	68,9	68,99	68,64	70,21	66,98	66,54	72,04
Bangka Barat	59,52	61,5	62,35	62,72	57,13	65,94	69,97
Bangka Tengah	66,24	67,33	67,15	66,74	62,67	58,48	64,2
Bangka Selatan	57,28	56	57,12	56,62	70,18	71,7	76,61
Belitung Timur	66,12	67,59	66,09	67,23	71,58	68,34	73,78
Pangkal Pinang	75,62	77,46	77,73	77,25	82,42	80,76	77,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas Maret)

Dalam hal pemenuhan layanan pendidikan bagi penduduk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan layanan pendidikan jenjang menengah, dan pendidikan anak usia dini. Angka Partisipasi Sekolah (APK) jenjang SMA/ sederajat masih belum optimal, dengan capaian pada tahun 2024 adalah sebesar 72,69% (tujuh puluh dua koma enam puluh sembilan persen). Sementara itu, untuk dapat menunjukkan seberapa jauh layanan pendidikan anak usia dini telah dicapai, dapat dilihat dengan persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD yang pada tahun 2024 baru mencapai 63,81% (enam puluh tiga koma delapan puluh satu persen) secara nasional, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 60% (gambar 4).



Gambar 4 Persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya untuk dapat memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan, namun demikian disparitas layanan masih terjadi, baik antarwilayah, antarkelompok ekonomi, anak dengan disabilitas, serta dengan melihat aspek gender.

Pada hampir sebagian besar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, partisipasi pendidikan untuk kelompok usia 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun dan 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun sudah

relatif optimal, dan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkabupaten/kota dalam provinsi cukup rendah. Namun demikian, upaya pemerataan partisipasi pendidikan antarwilayah masih harus dilakukan secara sungguh-sungguh pada pendidikan anak usia dini, dan jenjang pendidikan menengah.

Berdasarkan Susenas BPS tahun 2024, capaian tertinggi untuk persentase APS 7 (tujuh)-12 (dua belas) tahun berada di Kabupaten Belitung dan Bangka Barat masing-masing dengan nilai 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen), APS 13 (tiga belas)-15 (lima belas) tahun berada di Kabupaten Belitung dengan nilai 95,62% (sembilan puluh lima koma enam puluh dua persen), dan APS SMA/ sederajat masing-masing berada pada Kota Pangkalpinang dengan nilai 77,74% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh empat persen).

Berdasarkan data Angka Partisipasi Sekolah (APS) per jenjang usia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya disparitas partisipasi pendidikan yang signifikan dan konsisten antar jenjang usia. Disparitas ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan (atau kelompok usia), semakin rendah persentase penduduk yang bersekolah, yang mengindikasikan adanya "kebocoran" atau tantangan dalam melanjutkan pendidikan. APS untuk kelompok usia 7-12 tahun (setara SD/ sederajat) berada di tingkat sangat tinggi, konsisten di atas 99% sepanjang periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun tahap pertama (SD) telah berhasil menjangkau hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disparitas partisipasi pada jenjang ini sangat kecil.

Tabel 4 Disparitas APS 7-12 Tahun Sangat Kecil

1. Tingkat Partisipasi Tinggi (Usia 7-12 Tahun)

Tahun	APS 7-12 Tahun (%)	Keterangan
2020	99,70	Mencapai hampir 100%.
2024	99,66	Tetap stabil di angka sangat tinggi.

APS untuk kelompok usia 13-15 tahun (setara SMP/ sederajat) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari jenjang sebelumnya, dengan selisih sekitar 6 hingga 7 poin persentase. Meskipun APS di jenjang ini stabil di kisaran 93%, angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 6-7% anak usia SMP/ sederajat sudah tidak bersekolah.

Tabel 5 Disparitas APS Usia 13-15 Tahun menunjukkan penurunan dari APS Usia 7-12 Tahun

2. Penurunan Partisipasi di Jenjang Menengah Pertama (Usia 13-15 Tahun)

Tahun	APS 13-15 Tahun (%)	Selisih dari APS 7-12 Tahun (2020)
2020	93,34	↓ 6,36 poin persentase
2024	93,52	↓ 6,14 poin persentase

APS untuk kelompok usia 16-18 tahun (setara SMA/ SMK/ sederajat) berada di tingkat paling rendah, yaitu hanya sekitar 67,75% di tahun 2020, dan meningkat menjadi 72,69% di tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga (sekitar 27% hingga 32%) remaja usia 16-18 tahun di Kepulauan Bangka Belitung tidak bersekolah. Meskipun angkanya paling rendah, jenjang ini menunjukkan peningkatan APS paling tinggi selama periode 2020-2024 (naik dari 67,75% menjadi 72,69%), menunjukkan adanya upaya perbaikan yang signifikan dalam mendorong partisipasi sekolah di tingkat SMA.

Tabel 6 Disparitas APS Usia 16-18 Tahun

3. Disparitas Paling Lebar di Jenjang Menengah Atas (Usia 16-18 Tahun)

Tahun	APS 16-18 Tahun (%)	Selisih dari APS 7-12 Tahun (2020)
2020	67,75	↓ 31,95 poin persentase
2024	72,69	↓ 26,97 poin persentase

Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya tiga tahap transisi kritis dalam sistem pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung. Transisi SD ke SMP, Partisipasi Sekolah sangat tinggi (hampir 100%). Transisi SMP ke SMA/SMK, Partisipasi mengalami penurunan signifikan (sekitar 6-7% tidak melanjutkan). Setelah SMP/Awal SMA, Partisipasi berada di titik terendah (sekitar 27-32% remaja tidak bersekolah), yang menjadi tantangan utama dalam mencapai wajib belajar 12 tahun. Faktor yang biasanya berkontribusi pada disparitas ini adalah masalah sosial-ekonomi (biaya pendidikan, kebutuhan untuk bekerja), geografis (aksesibilitas sekolah menengah atas), dan persepsi nilai pendidikan di masyarakat.

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi penyebab signifikan atas belum optimalnya angka partisipasi pendidikan di berbagai jenjang. Secara umum, kondisi sosial ekonomi di Provinsi Kep. Bangka Belitung menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang baik, namun menghadapi tantangan dalam stabilitas pertumbuhan ekonomi yang sangat bergantung pada komoditas dan sektor pertambangan.

1. Kualitas Hidup dan Pembangunan Manusia (Sisi Sosial)

Kualitas hidup masyarakat Bangka Belitung tergolong tinggi, ditunjukkan oleh indikator berikut:

Tabel 7 Indikator Kualitas Hidup Masyarakat Bangka Belitung

Indikator	Data Terbaru (2024)	Peringkat Nasional	Keterangan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,55	Tinggi (di bawah rata-rata nasional 75,02)	Menunjukkan peningkatan 0,62% dari tahun sebelumnya. Seluruh kabupaten/kota berstatus IPM Tinggi, bahkan Kota Pangkalpinang berstatus Sangat Tinggi (80,90) .
Tingkat Kemiskinan	4,55% (Maret 2024)	Terendah ke-4 secara nasional	Angka kemiskinan Babel jauh di bawah rata-rata nasional (9,03%). Namun, terjadi sedikit kenaikan 0,03% dari tahun sebelumnya.
Garis Kemiskinan	Tinggi (Rp 908.000/kapita/bulan)	-	Tingginya Garis Kemiskinan menunjukkan biaya hidup di Babel cukup tinggi dibandingkan wilayah lain.

2. Perekonomian dan Ketenagakerjaan (Sisi Ekonomi)

Perekonomian Babel sangat dipengaruhi oleh sektor komoditas dan pertambangan, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global dan regulasi.

A. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi (PDRB) Babel pada Semester I 2024 tercatat melambat menjadi 1,02% (y-on-y), dibandingkan capaian Semester I 2023 yang mencapai 4,78%. Fluktuasi ini sering dikaitkan dengan penurunan kinerja di sektor utama, terutama pertambangan timah, yang sangat bergantung pada regulasi pemerintah pusat dan harga komoditas global.

B. Sektor Utama Perekonomian

Lapangan usaha utama yang menyerap tenaga kerja dan mendominasi ekonomi Babel adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (menyerap sekitar 25,93% tenaga kerja). Sedangkan sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (menyerap sekitar 18,98% tenaga kerja). Lainnya Sektor Jasa Kemasyarakatan. Sektor Pertambangan dan Penggalian (meski menyumbang PDRB besar, sektor ini mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja pada Februari 2024 karena penyesuaian regulasi timah/RKAB)

C. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024, TPT Babel sebesar 3,85%, turun 0,04% poin dari tahun sebelumnya. Angka ini relatif rendah dibandingkan TPT Nasional. Penurunan TPT pada awal 2024 didukung oleh kenaikan harga komoditas sawit dan karet, serta peningkatan produksi ikan, yang menyerap banyak tenaga kerja di sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, adanya momen Pemilu dan rekrutmen PPPK juga turut menyerap tenaga kerja.

Bangka Belitung memiliki fondasi sosial yang kuat dengan IPM yang tinggi dan angka kemiskinan yang sangat rendah (terendah ke-4 nasional). Namun, provinsi ini menghadapi tantangan struktural ekonomi karena ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan timah. Fluktuasi regulasi dan harga timah dapat menyebabkan volatilitas dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah saat ini berupaya mendorong sektor lain, seperti pariwisata, sebagai motor pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kondisi ekonomi dan sosial di Babel dapat menjelaskan mengapa terjadi disparitas partisipasi pendidikan yang sangat besar antara jenjang SD/SMP dan jenjang SMA/SMK. Kaitannya dapat dianalisis melalui tiga aspek utama: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) & Kemiskinan, Struktur Ekonomi & Kebutuhan Tenaga Kerja, dan Biaya Hidup Tinggi.

1. Dampak dari IPM Tinggi dan Kemiskinan Rendah

Fakta bahwa Babel memiliki IPM yang tinggi (74,55) dan tingkat kemiskinan yang sangat rendah (4,55%) berkorelasi positif dengan partisipasi di jenjang dasar. Partisipasi di Jenjang Dasar Sangat Tinggi (APS 7-12 tahun \approx 99%): Tingkat kemiskinan yang rendah menunjukkan bahwa secara ekonomi, hampir semua keluarga mampu membiayai atau memanfaatkan program wajib belajar 9 tahun. Kesadaran pendidikan dasar (disebut juga human capital) sudah terbangun baik, tercermin dari capaian IPM yang tinggi di dimensi kesehatan dan pendidikan.

2. Pengaruh Struktur Ekonomi dan Kebutuhan Tenaga Kerja

Ekonomi Babel yang sangat bergantung pada komoditas (sawit, karet, ikan) dan sektor pertambangan timah (meski sedang berfluktuasi) menciptakan insentif ekonomi yang kuat untuk meninggalkan bangku sekolah pada usia remaja. Penyebab Disparitas di Jenjang Menengah Atas (APS 16-18 tahun \approx 68%-72%): Sektor-sektor ini, terutama pertambangan dan perkebunan, seringkali menawarkan penghasilan yang relatif tinggi—terutama bagi pekerja non-formal di pertambangan timah—yang dapat diperoleh tanpa ijazah sekolah menengah atas (SMA/SMK). Bagi remaja usia 16-18 tahun, "biaya peluang" untuk melanjutkan sekolah menjadi tinggi karena mereka kehilangan potensi pendapatan besar dari bekerja di sektor informal. Hal ini menarik mereka keluar dari sistem pendidikan, yang menjelaskan mengapa sepertiga remaja (27%-32%) tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK.

3. Peran Garis Kemiskinan dan Biaya Hidup

Garis Kemiskinan Babel yang tinggi (Rp 908.000/kapita/bulan) menunjukkan biaya hidup yang relatif mahal. Meskipun angka kemiskinan persentase rendah, tingginya biaya hidup bisa mendorong keluarga (terutama di perdesaan yang terlibat dalam sektor komoditas) untuk segera memasukkan anak usia 16 tahun ke dunia kerja. Ini bukan hanya karena dorongan pendapatan, tetapi juga karena kebutuhan mendesak untuk menstabilkan keuangan keluarga menghadapi biaya hidup yang tinggi.

Disparitas APS di Bangka Belitung adalah cerminan dari konflik antara capaian sosial (IPM Tinggi) dan insentif ekonomi lokal yang kuat. Masyarakat Babel berhasil dalam menjamin partisipasi sekolah dasar (APS 7-12 tahun). Namun, di jenjang menengah atas (APS 16-18 tahun), sistem pendidikan harus bersaing dengan pasar kerja yang menawarkan upah menarik di sektor komoditas dan pertambangan, sehingga membuat partisipasi sekolah di jenjang ini menjadi tantangan utama pembangunan sumber daya manusia di Bangka Belitung.

Layanan pendidikan di Bangka Belitung sudah memberikan keberpihakan yang sama antara perempuan maupun laki-laki. Data menunjukkan bahwa, secara umum, partisipasi pendidikan perempuan cenderung lebih tinggi dan konsisten dibandingkan partisipasi pendidikan laki-laki di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama pada jenjang pendidikan menengah atas. Gambar 3 Jumlah Peserta Didik yang dikombinasikan dengan data APS dapat diambil simpulan sebagai berikut. Pada jenjang SD/ sederajat, disparitas gender hampir tidak ada, dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) berada di level sangat tinggi (di atas 99%) untuk kedua gender. Partisipasi perempuan sedikit lebih unggul, namun perbedaannya sangat kecil. Hal ini menegaskan keberhasilan program wajib belajar dasar. Di jenjang SMP/ sederajat, tren partisipasi tetap stabil di kisaran 93%. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga sangat kecil dan tidak signifikan, dengan perempuan tetap unggul tipis. Disparitas gender belum menjadi isu utama pada jenjang wajib belajar 9 tahun. Disparitas gender mulai terlihat jelas pada jenjang menengah atas, di mana tingkat partisipasi laki-laki secara konsisten berada di bawah tingkat partisipasi perempuan. Perempuan memiliki APS yang lebih tinggi di jenjang ini. Di tahun 2024, APS perempuan mencapai 73,43%, sementara laki-laki hanya 71,96%. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa laki-laki di usia 16-18 tahun lebih rentan untuk meninggalkan bangku sekolah (putus sekolah atau tidak melanjutkan) dibandingkan

perempuan. Hal ini terkait erat dengan korelasi sosial ekonomi yang dijelaskan sebelumnya: adanya tarikan pasar kerja (terutama pertambangan dan sektor komoditas) yang lebih kuat terhadap tenaga kerja laki-laki remaja. Meskipun terdapat disparitas, perlu dicatat bahwa kedua gender menunjukkan peningkatan APS yang signifikan dari 2020 ke 2024, menunjukkan perbaikan umum dalam partisipasi pendidikan menengah atas di Babel.

Secara keseluruhan, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak ada masalah gender gap yang merugikan perempuan dalam hal partisipasi sekolah. Sebaliknya, pola yang muncul adalah Paritas Gender (SD & SMP), partisipasi hampir setara dan sangat tinggi pada jenjang wajib belajar 9 tahun. Perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi pada jenjang menengah atas, sedangkan laki-laki menjadi kelompok yang lebih rentan putus sekolah karena insentif ekonomi untuk bekerja lebih cepat. Hal ini menandakan bahwa tantangan utama dalam partisipasi pendidikan di Babel bukanlah akses bagi perempuan, melainkan retensi peserta didik laki-laki di jenjang pendidikan menengah atas.

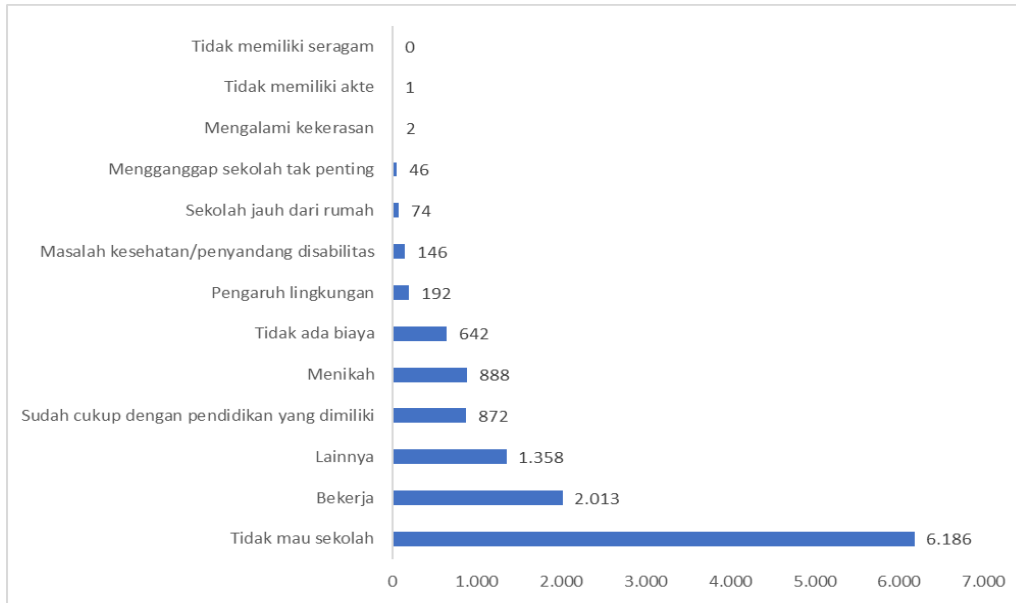
Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS)

Selain disparitas partisipasi pendidikan antarwilayah, antarkelompok ekonomi, dan gender, masalah utama yang dihadapi bidang pendidikan di Bangka Belitung adalah masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah (anak tidak sekolah/ATS). ATS mencakup anak yang tidak pernah mengikuti pendidikan pada jenjang apapun, putus sekolah tanpa menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu (SD/ sederajat, SMP/ sederajat, atau SMA/ sederajat), dan anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, minimal sampai pendidikan menengah.

Menurut dasbor ATS Pusdatin tahun 2025, terdapat 18.872 (delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu) ATS di Bangka Belitung. Berikut rincian data per Kabupaten/Kota.

Tabel 8 Data ATS Bangka Belitung

NO	KAB/KOTA	Drop Out	Lulus Tidak Melanjutkan		TOTAL
			6	9	
1	Kab. Bangka	2045	660	832	3.537
2	Kab. Belitung	1294	461	662	2.417
3	Kab. Bangka Tengah	1519	513	647	2.679
4	Kab. Bangka Barat	1920	795	958	3.673
5	Kab. Bangka Selatan	1964	568	701	3.233
6	Kab. Belitung Timur	936	257	380	1.573
7	Kota Pangkal Pinang	1232	258	270	1.760
Jumlah		10.910	3.512	4.450	18.872



Gambar 5 Alasan ATS di Bangka Belitung

Berdasarkan data BPS Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2021, terdapat beberapa alasan anak tidak sekolah. Alasan yang dapat dikaitkan dengan aspek ekonomi, menjadi penyebab paling tinggi dari ATS, seperti alasan bekerja/mencari nafkah sebesar 16,21%. ATS terbanyak sebesar 49,81% dengan alasan tidak mau sekolah. ATS terjadi tidak semata karena tidak tersedianya layanan pendidikan, kendala ekonomi, dan geografis. ATS dapat terjadi karena masih adanya hambatan yang berakar pada aspek sosial, dan budaya yang menjadikan anak terkendala dalam menjangkau layanan pendidikan.

Berikut kondisi Angka Partisipasi Sekolah di Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 9 Kondisi APS Kabupaten/Kota Tahun 2024

NO	KAB/KOTA	APS 5-6	APS 7-12	APS 13-15	Capaian SPM
1	Kab. Bangka	74,56	99,89	95,31	80,48 (Tuntas Madya)
2	Kab. Belitung	75,70	99,97	95,61	79,17 (Tuntas Pratama)
3	Kab. Bangka Tengah	65,89	99,84	91,56	77,73 (Tuntas Pratama)
4	Kab. Bangka Barat	79,59	99,98	90,96	75,90 (Tuntas Pratama)
5	Kab. Bangka Selatan	70,75	98,29	93,69	74,59 (Tuntas Pratama)
6	Kab. Belitung Timur	94,81	99,89	91,23	80,68 (Tuntas Madya)
7	Kota Pangkal Pinang	65,74	99,77	94,52	80,56 (Tuntas Madya)

Melihat kondisi di atas APS masih perlu ditingkatkan, dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan beberapa kendala yang menyebabkann anak tidak sekolah (ATS), dengan memprediksi kondisi daya tampung yang mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk dan akses pendidikan yang mudah terutama perbedaan antara perkotaan dengan daerah pedesaan, dan adanya kendala biaya personal pendidikan untuk masyarakat kurang mampu serta belum adanya perhatian untuk peserta didik disabilitas. Strategi yang dapat dilakukan untuk menuntaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai berikut.

- Melakukan analisis data ATS dari dasbor,
- Melakukan koordinasi dengan sekolah asal dan/atau desa/kelurahan untuk verifikasi data ATS melalui dasbor,
- Melakukan analisis akar masalah hasil verifikasi data ATS dari dasbor,
- Menyusun strategi penjangkauan, pengembalian, dan pendampingan ATS sesuai dengan akar masalah ATS,
- Menyusun analisis kebutuhan daya tampung berdasarkan Dapodik, jika akar masalahnya kekurangan daya tampung,
- Pemutakhiran Dapodik secara berkala.

Perkembangan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun

Program wajib belajar di Indonesia pertama kali dicanangkan oleh Presiden Soeharto pada 2 Mei 1984, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Pada tahap awal ini, pemerintah memberlakukan wajib belajar 6 tahun, yang berarti setiap anak Indonesia diwajibkan untuk menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI). Latar belakang kebijakan ini adalah masih tingginya angka buta huruf dan rendahnya partisipasi pendidikan dasar di Indonesia. Pemerintah memandang bahwa minimal pendidikan SD harus dapat diakses oleh seluruh anak bangsa agar mereka memiliki kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, serta pengetahuan umum yang memadai untuk kehidupan sehari-hari. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah melakukan pembangunan unit sekolah baru di berbagai pelosok desa, memberikan subsidi operasional sekolah, serta menugaskan guru-guru melalui program penempatan di daerah terpencil. Keberhasilan wajib belajar 6 tahun dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar secara signifikan pada akhir 1980-an.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan, pemerintah kemudian meningkatkan kebijakan tersebut menjadi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada tahun 1994. Program ini meliputi 6 tahun pendidikan dasar (SD/MI) ditambah 3 tahun pendidikan menengah pertama (SMP/MTs).

Presiden Soeharto meresmikan kebijakan ini pada 2 Mei 1994, yang menandai dimulainya upaya nasional untuk memperluas akses pendidikan menengah pertama. Landasan hukum dari program ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang menegaskan bahwa pendidikan dasar terdiri atas jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Program wajib belajar 9 tahun dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah membangun SMP baru di berbagai kecamatan, memberikan bantuan rehabilitasi sekolah, serta meluncurkan program beasiswa untuk keluarga miskin. Selain itu, diperkenalkan pula paket pendidikan nonformal setara SMP bagi mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal. Dampak positif dari kebijakan ini cukup besar. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP meningkat, angka putus sekolah menurun, dan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia beranjak naik. Meskipun begitu, tantangan masih muncul terutama di daerah pedalaman, wilayah terpencil, serta masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah.

Memasuki era globalisasi, pendidikan menengah atas dipandang bukan lagi sebagai pilihan, tetapi kebutuhan. Dunia kerja dan tuntutan kompetensi mengharuskan generasi muda memiliki kualifikasi minimal lulusan SMA atau SMK. Hal ini melatarbelakangi munculnya kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun, yang mencakup SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA. Kebijakan ini mulai diperkuat melalui Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah. Pemerintah menegaskan bahwa setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan sampai jenjang menengah, dan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban mendukung pembiayaannya. Dalam implementasinya, pemerintah meluncurkan berbagai program pendukung seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diperluas hingga SMA/SMK, Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Infrastruktur sekolah menengah juga diperluas, termasuk pembangunan ruang kelas baru dan sekolah-sekolah di daerah tertinggal. Wajib belajar 12 tahun menjadi lompatan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pendidikan hingga jenjang menengah, diharapkan generasi muda memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang lebih matang untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, psikologi pendidikan, serta hasil penelitian tentang pentingnya masa usia dini, pemerintah mulai merumuskan kebijakan yang lebih progresif, yakni Wajib Belajar 13 Tahun. Kebijakan ini mencakup pendidikan pra-sekolah atau PAUD (satu tahun sebelum SD) hingga jenjang SMA/SMK. Konsep ini muncul karena kesadaran bahwa pendidikan anak usia dini merupakan masa emas (*golden age*) yang sangat menentukan tumbuh kembang anak di masa depan. Pendidikan pra-sekolah memberikan fondasi penting dalam hal motorik, kognitif, sosial, emosional, dan karakter anak. Selain itu, kebijakan wajib belajar 13 tahun juga sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya poin ke-4 tentang *Quality Education*. Melalui program ini, Indonesia berupaya meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk hingga mendekati standar negara maju. Implementasi program ini dilakukan dengan memperkuat lembaga PAUD, meningkatkan kualitas guru PAUD, memberikan bantuan operasional PAUD, serta memastikan transisi yang mulus dari PAUD ke SD. Dukungan juga diberikan kepada siswa SMA/SMK melalui BOS, KIP, serta program afirmasi bagi daerah tertinggal dan keluarga miskin.

Wajar 13 Tahun diresmikan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan dimasukkan dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) 2020–2035. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan program ini sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Landasan hukum program ini diperkuat oleh:

- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang sedang direvisi untuk mengakomodasi PAUD sebagai bagian dari pendidikan dasar.
- Peraturan Presiden tentang RPJPN 2025–2045, yang menargetkan peningkatan kualitas SDM sebagai pilar utama Indonesia Emas 2045.

- Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri yang mengatur pelaksanaan teknis, pendanaan, dan pengawasan program.

Sistem Penerimaan Murid Baru

Berefleksi dari penyelenggaraan penerimaan peserta didik atau murid baru dari tahun ke tahun, satu hal mendasar yang selalu menjadi tantangan dalam mewujudkannya adalah mengupayakan setiap anak mendapatkan haknya untuk mengakses pendidikan pada setiap jenjang secara adil dan setara. Di era kepemimpinan Menteri Abdul Mu'ti saat ini, persoalan akses pendidikan secara terang benderang dikumandangkan melalui visi besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu "Pendidikan Bermutu untuk Semua".

Visi ini merupakan pengejawantahan dari pemerataan akses pendidikan yang menjadi bagian dari cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa". Dari Sabang sampai Merauke, dari Barat hingga ke Timur, setiap warga negara di dalamnya, termasuk anggota masyarakat di lingkup wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu yang menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali warga masyarakat Bangka Belitung, merupakan tanggung jawab pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah (pemda).

Tanggung jawab jenjang pendidikan dasar dan menengah oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diwakili oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Kemendikdasmen. Sedangkan pemda yang bertanggung jawab adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibagi kewenangannya menangani jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk SMA, SMK, dan SLB melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Serta Pemerintah Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang bertanggung jawab atas PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Sesungguhnya tanggung jawab ini tak hanya dilaksanakan oleh BPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, melainkan juga diemban oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi dan Kantor Kabupaten/Kota dari Kementerian Agama (Kemenag) yang menangani pendidikan berbentuk madrasah dan bentuk lain yang sederajat. Di mana wilayah kerjanya sama dengan BPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota sesuai kewenangan jenis pendidikan yang dikelolanya (keagamaan yang terpadu dengan umum). Untuk jenjang PAUD dalam bentuk Raudhatul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA), untuk jenjang pendidikan dasar berbentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), sedangkan untuk jenjang menengah berbentuk Madrasah Aliyah (MA).

Secara hirarki, koordinasi lintas lembaga ini yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Kanwil dan Kantor Kemenag, serta Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wujud kolaborasi dari kementerian yang menaungi instansi-instansi tersebut yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama,

dan Kementerian Dalam Negeri. Seyogianya kolaborasi antarlembaga ini menjadi “Tiga Serangkai” yang terdepan dalam mengawal dan mewujudkan terpenuhinya hak warga masyarakat Bangka Belitung untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Pintu masuk dari pendidikan yang bermutu dan berkeadilan adalah ketika sekolah pertama kali menerima peserta didik baru dari suatu kelas awal di setiap jenjang satuan pendidikan. Selama ini pemerintah dan pemerintah daerah telah menyelenggarakan suatu mekanisme penerimaan peserta didik baru yang telah mengalami transformasi dari masa ke masa. Berkilas balik dari perkembangannya berawal dari masa penjajahan terhadap Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Saat itu akses pendidikan sangat terbatas dan selektif, bahkan ada stratifikasi sekolah berdasarkan kelas sosial untuk pribumi elite hingga ke rakyat biasa. Hanya anak pribumi yang mendapat izin atau rekomendasi khusus bisa bersekolah. Situasi kala itu terjadi di berbagai wilayah jajahan termasuk di Pulau Bangka dan Pulau Belitung.

Berlanjut ke masa awal Kemerdekaan (1945 hingga 1970-an), konstitusi UUD 1945 yang menetapkan pendidikan sebagai hak setiap warga negara mendorong penerimaan murid baru secara manual berdasarkan kapasitas daya tampung sekolah dan kebijakan lokal (daerah). Keputusan kepala sekolah di masa ini sangat menentukan untuk diterimanya seorang murid baru, dikarenakan belum ada regulasi yang seragam dari pemerintah.

Dinamika penerimaan murid baru terus berkembang di masa Orde Baru (1970-1998). Di era ini dimulailah sentralisasi pendidikan, adanya penetapan kurikulum dan kebijakan pendidikan secara nasional mendorong penerimaan murid baru dilakukan berdasarkan tes akademik sebagai seleksi utama. Pada masa itu di berbagai daerah termasuk Kotamadya Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung (saat itu masih tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan) telah menerapkan sistem rayonisasi untuk mengatur distribusi siswa. Rata-rata nilai EBTRANAS (evaluasi belajar tahap akhir nasional) murni juga menjadi pertimbangan dalam menerima murid baru.

Perkembangan selanjutnya di era Reformasi dan Digitalisasi (1999-2016), dimulainya desentralisasi pendidikan, di mana pemerintah daerah mulai memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan di wilayahnya (otonomi pendidikan). Dalam era ini sebagai salah satu provinsi baru, Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penerimaan secara manual dan mulai menerapkan pencatatan pendaftaran yang berbasis komputer. Nilai Ujian Akhir Nasional atau nilai Ujian Nasional (setelahnya) sebagai pengganti nilai Ebtanas, menjadi dasar seleksi masuk (khususnya) ke sekolah negeri. Di masa inilah kefavoritan sekolah makin menguat yang menimbulkan eksese ketimpangan kualitas antarsekolah dan terkonsentrasinya peserta didik pada sekolah tertentu, khususnya di perkotaan seperti Kota Pangkalpinang, Kota Sungailiat, Kota Tanjungpandan, serta ibu kota kabupaten pemekaran lainnya. Namun demikian di era awal desentralisasi kebijakan ini telah mendorong peningkatan akses pendidikan dan dimulainya sistem seleksi yang terdigitalisasi.

Lebih lanjut, makin jauh ke sini era zonasi dan pemerataan akses (2017-2024) dimulai. Di era ini kebijakan zonasi diterapkan pertama kali di masa kepemimpinan Menteri Muhadjir Effendy melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya dikenal dengan PPDB. Pada masa itu, untuk pertama kalinya diperkenalkan 3 jalur PPDB yaitu zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali. Hal yang mencuat di era keterbukaan ini adalah banyak terjadi manipulasi alamat atau dokumen administrasi kependudukan hingga nilai rapor sekolah (setelah nilai UN ditiadakan), ketimpangan kapasitas sekolah, jual-beli bangku, fenomena siswa titipan, hingga terjadi resistensi dari sejumlah masyarakat yang berujung pada aksi demonstrasi kepada sekolah hingga pemerintah. Kendati tidak dipungkiri penerapan zonasi di sisi lain telah mengubah persepsi masyarakat untuk tidak hanya mengejar sekolah tertentu, melainkan melirik potensi sekolah lain di sekitar. Selain mendorong pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah di semua zona agar tidak terjadi ketimpangan.

Ketika rezim pemerintahan berganti tahun 2024 di mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berubah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, transformasi PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dimulai. Pendekatan zonasi digantikan oleh sistem domisili berbasis data kependudukan resmi (berupa Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan) untuk menguatkan transparansi dan akurasi. Sistem ini berfokus pada pemerataan kapasitas dan layanan pendidikan. Hal yang paling menjadi perhatian dan pembahasan pada masa ini adalah penguncian jumlah rombongan belajar (rombel) dan jumlah peserta didik perrombel di aplikasi Dapodik khususnya untuk sekolah negeri dan pelibatan kapasitas daya tampung swasta dalam SPMB yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan sebaran murid. Era ini juga ditandai dengan program Revitalisasi Sekolah yang menjadi salah satu solusi untuk peningkatan kapasitas daya melalui rehabilitasi ruang kelas maupun pembangunan ruang kelas baru (RKB).

Transformasi pelaksanaan penerimaan murid baru pada kelas awal pada setiap jenjang ini tegak lurus dengan regulasinya yang juga mengalami pembaruan dan perubahan dari waktu ke waktu. Pembaruan regulasi ini dibuat dan disusun oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian yang menangani bidang pendidikan, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Kanwil/Kantor Kementerian Agama yang menangani madrasah. Di era Reformasi (setelah peristiwa Kerusuhan Mei 1998) penerimaan murid baru untuk pertama kali diatur secara teknis oleh Menteri Pendidikan Nasional saat itu, A. Malik Fadjar melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/U/2002 Tentang Penerimaan Siswa Pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah. Meski masih sederhana, ketentuan tentang seleksi calon siswa ketika daya tampung tidak mencukupi telah diatur cukup jelas. Kondisi ini bertahan cukup lama hingga 17 tahun lamanya.

Pada tahun 2017 pelaksanaan penerimaan murid baru mulai diatur secara khusus dan teknis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dengan memperkenalkan sistem zonasi untuk pertama kalinya. Selanjutnya regulasi ini terus mengalami perubahan pada tahun 2018 (2 kali), 2019 (3 kali), 2020, 2021, dan 2025, dan semuanya terekam dalam JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kemendikdasmen. Sedangkan jeda tahun 2022, 2023, 2024 tetap menerapkan peraturan menteri tahun 2021, di mana tahun 2024 dipertegas dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 (daftar peraturan lengkap terlampir).

Secara substansi perubahan pokok peraturan menteri dalam pelaksanaan penerimaan murid baru bertransformasi dari jalur zonasi 90%, prestasi, dan perpindahan domisili yang menjadi perpindahan tugas orang tua/wali. Selanjutnya masih berkonsentrasi pada jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur mutasi. Di mana penetapan zonasi wajib dilaporkan ke menteri melalui UPT kementerian di bidang penjaminan mutu pendidikan. Serta diperkuat dengan ketentuan tidak melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar.

Transformasi ketentuan penerimaan murid baru terus berlanjut dengan ditambahkannya jalur keempat yaitu afirmasi yang dimulai pada masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020 dengan mengakomodir peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Sedangkan kuota anak penyandang disabilitas masuk dalam jalur zonasi. Persentase kuota jalur zonasi juga berkurang signifikan dari paling sedikit 80% menjadi paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Dalam masa ini mulai diberlakukan pelaporan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui UPT yang menangani bidang penjaminan mutu pendidikan, yaitu LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada masa itu.

Selanjutnya dengan peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan di tahun 2021 proses seleksi jalur prestasi khususnya, tidak menggunakan nilai ujian nasional dan/atau nilai ujian lainnya. Seleksi jalur prestasi menggunakan nilai rapor sekolah pada 5 semester terakhir sebagaimana ketetapan peraturan menteri. Jika diperlukan tes, tes tersebut merupakan bagian dari ujian sekolah dan bersifat sukarela. Pada rentang waktu ini persentase kuota jalur zonasi dibagi perjenjang dengan ketentuan SD paling sedikit 70%, SMP dan SMA paling sedikit 50%. Sedangkan jalur afirmasi tidak hanya untuk calon murid baru dari keluarga ekonomi tidak mampu namun juga untuk penyandang disabilitas (dialihkan dari jalur zonasi).

Selama 8 tahun (2017-2024) diberlakukannya zonasi dalam pelaksanaan penerimaan murid baru di segenap kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia, termasuk di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, dengan menerapkan berbagai ketentuan dalam peraturan menteri pendidikan yang dinamik, begitu banyak isu dan persoalan yang berkembang bahkan terkadang menjadi gejolak. Fakta di lapangan menunjukkan implementasi peraturan menteri seringkali diinterpretasikan berbeda sesuai kebutuhan dan juga keinginan daerah. Akibatnya terjadi bias yang tak hanya menimbulkan diskresi di kalangan pelaksana dalam hal ini dinas pendidikan, namun juga terjadi bias informasi di tataran masyarakat pengguna baik orang tua maupun pemangku kepentingan pendidikan secara luas.

Sejumlah ketentuan yang paling sering menimbulkan pemahaman berbeda adalah persyaratan dan seleksi, penetapan wilayah zonasi, penetapan kapasitas daya tampung, sehingga berimplikasi pada penerapan jalur penerimaan yang tidak sesuai ketentuan, dan penerimaan murid baru di luar mekanisme. Fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar masyarakat cenderung untuk memfavoritkan sekolah tertentu khususnya sekolah (negeri) yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Kendati begitu, sesungguhnya transformasi penerimaan murid baru, tentunya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan khususnya di

Bangka Belitung. Hal-hal positif yang ditimbulkan, pertama adalah pemerataan akses pendidikan, dengan sistem domisili berbasis data kependudukan telah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang. Distribusi siswa menjadi lebih merata, tidak lagi terpusat di sekolah unggulan saja yang berarti mengurangi kefavoritan sekolah.

Dampak positif kedua adalah terciptanya pelaksanaan penerimaan murid baru yang lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan sistem online atau daring dalam bentuk aplikasi PPDB/aplikasi SPMB yang terintegrasi dengan data administrasi kependudukan makin meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi. Selain itu pengawasan publik menjadi makin mudah, karena masyarakat dapat memantau proses dan hasil seleksi secara terbuka, yang berimplikasi meminimalkan potensi manipulasi.

Peningkatan kualitas dan efisiensi kebijakan merupakan dampak positif ketiga dari transformasi penerimaan murid baru. Sejumlah pemerintah daerah mulai menggunakan data kependudukan yang dikombinasikan kapasitas sekolah berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Proses pendaftaran juga menjadi lebih cepat dan terstandarisasi, yang mengurangi beban administratif sekolah dan dinas pendidikan.

Inklusi sosial dan afirmasi menjadi faktor keempat yang mencerminkan dampak transformasi pendidikan ini. Anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu, penyandang disabilitas, dan yang berada di daerah terpencil di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat peluang yang makin besar untuk masuk ke sekolah negeri. Sementara itu calon murid baru yang orang tuanya mengalami perpindahan tugas (pindah domisili karena pekerjaan) juga terbuka kesempatannya bersekolah di tempat yang baru.

Dampak kelima yang paling terasa adalah menguatnya peran pemerintah daerah dan peningkatan keterlibatan swasta atau masyarakat. Pemda mendapatkan ruang untuk menyesuaikan kebijakan PPDB/SPMB dengan kondisi lokal, namun tetap dalam kerangka regulasi nasional. Sinergi dan kolaborasi lintas organisasi pemerintah makin menguat antara lain melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, dan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pengelolaan data dan layanan publik. Selain itu kapasitas daya tampung bertambah karena ada pilihan lain dengan terlibatnya pihak masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dalam wujud sekolah swasta.

Namun patut diakui perubahan dari sistem PPDB zonasi ke SPMB tidak lantas menuntaskan permasalahan pelaksanaan penerimaan murid baru. Masih ada pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah maupun masyarakat, yaitu bagaimana pemerataan akses pendidikan yang bermutu untuk semua 100% dapat terwujud. Bagaimana untuk mewujudkannya? Tentunya semua pemangku kepentingan pendidikan di Bangka Belitung harus memahami terlebih dahulu profil ketersediaan dan kondisi satuan pendidikan yang tersebar di 7 wilayah kabupaten/kota.

Saat ini di Bangka Belitung ada 2.138 satuan pendidikan yang aktif, terdiri dari 1.110 negeri dan 1.028 swasta untuk semua jenjang pendidikan (ini adalah sekolah di bawah binaan Kemendikdasmen, belum termasuk yang di bawah kewenangan Kemenag). Jika dijabarkan

2.138 sekolah ini terdiri dari jenjang PAUD (851), SD (835), SMP (242), SMA (83), SMK (58), SLB (10), serta Kesetaraan Paket A, B, dan C (59). Sebanyak 942 sekolah atau 44% berada di perkotaan, 1.150 sekolah atau 54% berada di perdesaan yang tersebar di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Sedangkan 2%-nya (47 sekolah) berada di pulau-pulau kecil yang masuk dalam wilayah administrasi 4 kabupaten (Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, dan Belitung Timur). Selain itu perlu menjadi perhatian juga, dari keseluruhan satuan pendidikan Kemendikdasmen, ada 197 sekolah atau sekitar 9% yang menjadi sasaran pendaftar murid baru yang berdomisili di wilayah perbatasan (antara Bangka-Bangka Barat, Bangka-Pangkalpinang, Bangka-Bangka Tengah, Bangka Tengah-Bangka Selatan, dan Bangka Tengah-Pangkalpinang).

Profil satuan pendidikan seperti ini hendaknya menjadi acuan dalam penerapan regulasi penerimaan murid baru dalam rangka mewujudkan “Pendidikan Bermutu Untuk Semua”. Karena seyogianya penerapan SPMB di kawasan perkotaan, tidak dapat persis dengan kawasan perdesaan, apalagi dengan sekolah di pulau-pulau kecil. Sekolah di wilayah perbatasan dalam hal tertentu juga memerlukan perlakuan khusus, tidak bisa hanya menerapkan aturan umum dari regulasi SPMB.

Sebagai ilustrasi Kota Pangkalpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan usia penduduk yang makin menua dan berhasilnya Program Keluarga Berencana, keberadaan Sekolah Dasar Negeri yang berjumlah 66 dirasakan sudah berlebih, karena kuota daya tampung hanya terpenuhi 87% dari total 3.158 yang tersedia. Permasalahannya adalah terjadi konsentrasi di sekolah-sekolah tertentu (favorit), sehingga di satu sisi ada sekolah yang pendaftarnya membludak hingga 138%, di sisi lain ada sekolah yang sampai registrasi ditutup hanya 1 orang yang mendaftar. Sehingga terjadi persebaran yang tidak merata baik secara kuantitas maupun kualitas. Merger sekolah menjadi perlu dipertimbangkan dalam rangka efisiensi anggaran. Sebaliknya kondisi SMP negeri di Pangkalpinang justru sebaliknya. Ada 1 dari 7 kecamatan yang tidak memiliki SMP, sedangkan kapasitas daya tampung 10 SMP Negeri yang ada tidak dapat menampung semua pendaftar yang berjumlah 2.982 orang.

Sedangkan untuk kawasan perdesaan, khususnya untuk desa yang hanya memiliki 1 sekolah, fluktuasi penduduk yang berakibat pada fluktuasi anak usia sekolah mengakibatkan penguncian rombel atau jumlah peserta didik per rombel menjadi tidak efektif. Karena ada sekolah yang kuota daya tampungnya tidak dapat menampung calon peserta didik baru, sehingga ada anak yang harus bersekolah jauh dari domisilinya. Kondisi yang lebih aman adalah di pulau-pulau kecil, karena relatif tidak ada pergerakan proyeksi calon murid yang melebihi kapasitas daya tampung sekolah. Meski secara sarana prasarana, dan kualitas proses pembelajaran masih perlu mendapat perhatian yang lebih. Yang tak kalah menyita perhatian adalah bagi calon murid baru yang berdomisili di wilayah perbatasan antara kabupaten dengan kota, atau antara kabupaten dengan kabupaten. Diperlukan kuota khusus bagi anak-anak di perbatasan, yang selama ini tidak diatur di dalam peraturan regular.

Oleh Karena itu BPMP yang memiliki peran yang tak kalah penting dalam SPMB mengusulkan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan dalam rangka

makin meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penerimaan Murid Baru yang perlu dicapai melalui perencanaan strategis yaitu sebagai berikut:

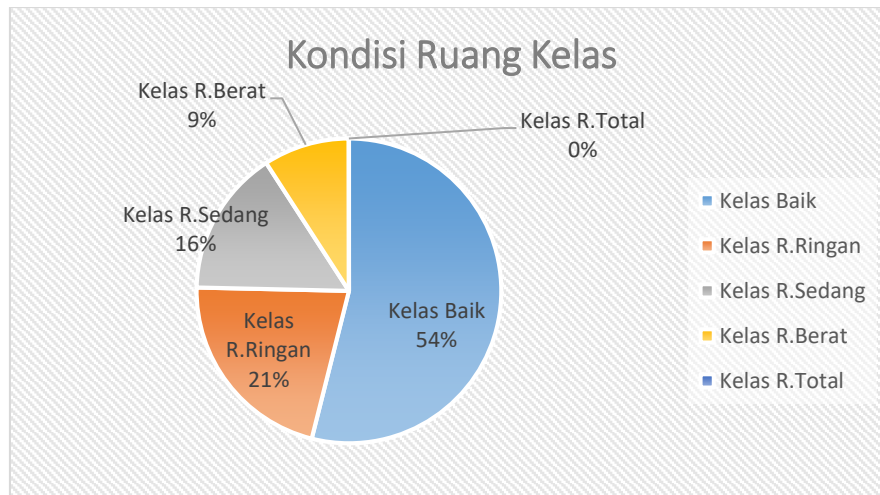
1. Selain regulasi umum SPMB yang diterbitkan Kemendikdasmen yang berlaku bagi seluruh Pemda di Indonesia, Pemda dapat membuat regulasi turunan yang khusus mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Permendikdasmen sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal daerah.
2. Program revitalisasi sekolah makin digalakkan terutama untuk daerah yang kekurangan kapasitas daya tampung, daerah yang padat penduduk, dan wilayah pulau-pulau.
3. Pemda bersama UPT Kemendikdasmen menyusun roadmap penuntasan calon murid baru atau pendaftar jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen untuk setiap 5 tahun sekali (jangka menengah) atau setiap 20 tahun (jangka panjang).
4. Pengadaan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan di setiap satuan pendidikan dalam rangka pemenuhan Standar PTK dan peningkatan kompetensi PTK secara terencana dan menyeluruh.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan

Pendidikan merupakan fondasi dalam pembangunan manusia dan bangsa. Sistem pendidikan yang baik membutuhkan tiga pilar sentral: (1) kurikulum yang relevan dan berorientasi masa depan, (2) tenaga pendidik yang kompeten dan berdedikasi, serta (3) sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Di antara ketiganya, aspek sarana dan prasarana seringkali menjadi kendala riil di lapangan — terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang — karena biaya besar, akses sulit, serta prioritas pembangunan yang bergeser. Sekolah tanpa fasilitas yang memadai seakan “berjalan pincang” — ruang kelas bocor, peralatan laboratorium rusak, toilet tidak layak, akses internet terbatas, dan begitu banyak kebutuhan lain yang belum tertangani. Maka dari itu, program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah bukanlah sekadar proyek fisik, tetapi upaya strategis untuk menjamin kesetaraan pendidikan, mutu pembelajaran, dan keamanan/kenyamanan belajar bagi seluruh peserta didik.

Untuk memahami urgensi revitalisasi, penting melihat data terbaru yang mencerminkan betapa luasnya masalah infrastruktur sekolah di Indonesia: Sebuah laporan dari Databoks mengungkap bahwa pada tahun ajaran 2024/2025, terdapat sekitar 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia. Dari jumlah tersebut, ±60 % berada dalam kondisi rusak (rusak ringan, sedang atau berat). Rinciannya: 27,22 % rusak ringan, 22,27 % rusak sedang, dan 10,81 % rusak berat. Hanya 39,7 % ruang kelas SD yang dalam kondisi baik. Pada jenjang SMP, data menunjukkan bahwa hampir 49,67 % ruang kelas mengalami kerusakan dalam berbagai tingkat. Di tingkat provinsi, Jawa Barat menduduki posisi tertinggi untuk jumlah ruang kelas SD rusak berat, dengan 11.661 unit dilaporkan rusak berat. Pada tingkat sekolah per provinsi, dataset Kemendikdasmen menunjukkan jumlah ruang kelas menurut kondisi tiap provinsi. Misalnya, di Provinsi Kepulauan Riau, sekitar 3.226 ruang kelas, dengan proporsi tertentu mengalami kerusakan serius.

Berdasarkan data Dapodik, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kondisi ruang kelas pada 2.138 sekolah adalah sebagai berikut.



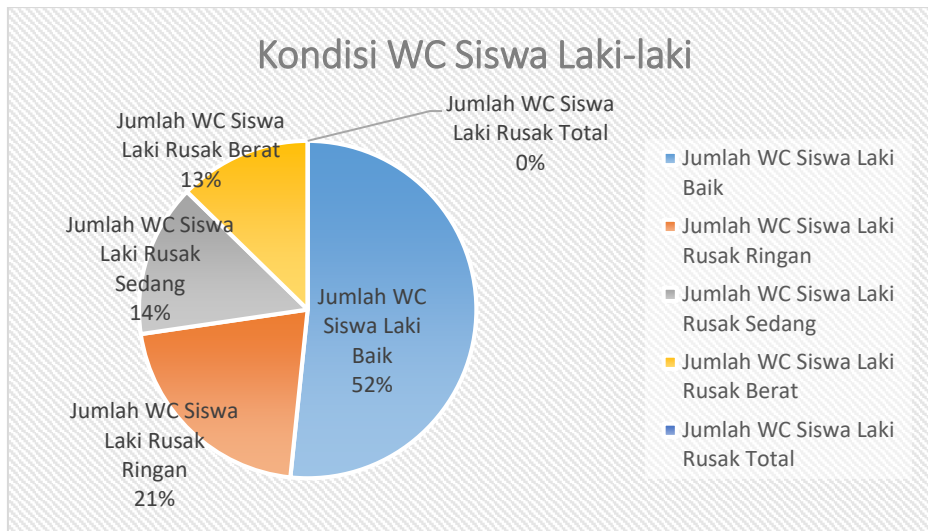
Gambar 6 Kondisi Ruang Kelas

Secara keseluruhan, **53,9%** dari total **14.498** ruang kelas di semua jenjang berada dalam kondisi **Baik (7.819** kelas). Kelas dengan Kerusakan Berat berjumlah 1.323 kelas, dengan jenjang SD memiliki jumlah kelas rusak berat terbanyak, yaitu 822 kelas. Tabel berikut berisi rincian kondisi ruang kelas di sekolah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 10 Kondisi Ruang Kelas Per Jenjang Pendidikan

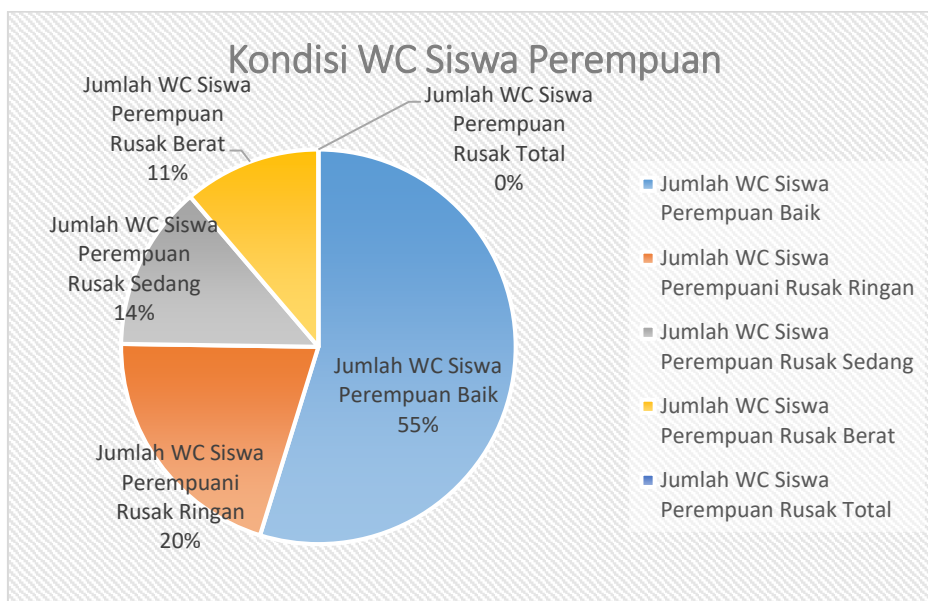
Satuan Pendidikan	Kelas Baik	Kelas R.Ringan	Kelas R.Sedang	Kelas R.Berat	Kelas R.Total	Jumlah Kelas
KB	547	173	34	19	2	775
PKBM	113	29	10	6	0	158
SD	3316	1702	1522	822	0	7362
SKB	68	0	3	0	0	71
SLB	99	52	13	7	0	171
SMA	720	127	127	138	0	1112
SMK	667	161	75	64	0	967
SMP	1367	546	347	239	0	2499
SPS	67	17	4	1	0	89
TK	796	277	110	26	0	1209
TPA	59	22	3	1	0	85
Grand Total	7819	3106	2248	1323	2	14498

Sumber Dapodik:September 2025



Gambar 7 Kondisi WC Siswa Laki-Laki

Berikutnya kondisi WC Siswa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, total unit WC siswa laki-laki dan perempuan di semua jenjang adalah 5.081 unit. WC Siswa Laki-laki sebanyak 2.529, dengan kondisi baik sebanyak 1.306 unit (51,6%) dan Rusak Berat sebanyak 321 unit (12,7%). SD memiliki jumlah WC laki-laki terbanyak (1.261 unit), dengan 208 unit di antaranya rusak berat.



Gambar 8 Kondisi WC Siswa Perempuan

WC Siswa Perempuan sebanyak 2.552, dengan Kondisi Baik sebanyak 1.398 unit (54,8%) dan kondisi Rusak Berat: 287 unit (11,2%). SD memiliki jumlah WC perempuan terbanyak (1.240 unit), dengan 183 unit di antaranya rusak berat.

Perhitungan rasio kecukupan WC dibandingkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Permendiknas No. 24 Tahun 2007 (Lampiran A) yang mensyaratkan rasio minimum per jenjang. Standar Rasio Minimum SNP untuk WC pada setiap jenjang pendidikan sebagai berikut.

SD/MI: 1 WC per 60 siswa Laki-laki; 1 WC per 50 siswa Perempuan.

SMP/MTs, SMA/SMK/MA: 1 WC per 40 siswa Laki-laki; 1 WC per 30 siswa Perempuan.

Tabel 11 Rasio Kecukupan WC

Jenjang	PD Laki-laki	PD Perempuan	Unit WC Laki-laki	Unit WC Perempuan	Rasio PD/WC Laki-laki	Rasio PD/WC Perempuan	Kecukupan Rasio*
SD	81,911	75,363	1,261	1,240	2:05	2:01	Belum Cukup
SMP	33,758	32,721	563	551	2:00	1:59	Belum Cukup
SMA	15,532	18,682	174	184	2:29	2:42	Belum Cukup
SMK	13,452	11,264	117	112	2:55	2:41	Belum Cukup
SLB	902	506	16	16	1:56	1:32	Terpenuhi

* Kecukupan Rasio dinilai berdasarkan perbandingan antara Rasio Peserta Didik (PD)/WC dengan standar SNP (misalnya, untuk SD laki-laki, rasio harus $\leq 1:60$).

Pada jenjang SD, rasio 1:65 (Laki-laki) dan 1:61 (Perempuan) menunjukkan bahwa ketersediaan WC belum memenuhi standar SNP (1:60 L dan 1:50 P), artinya masih terlalu banyak siswa yang menggunakan 1 unit WC. Pada jenjang SMP, rasio 1:60 (Laki-laki) dan 1:59 (Perempuan) juga belum memenuhi standar SNP (1:40 L dan 1:30 P). Sedangkan untuk jenjang SMA dan SMK, rasio di kedua jenjang ini adalah yang paling jauh dari standar SNP (1:40 L dan 1:30 P), menunjukkan bahwa WC yang tersedia sangat kurang untuk menampung jumlah peserta didik. Untuk SLB rasio 1:56 (Laki-laki) dan 1:32 (Perempuan) menunjukkan rasio yang secara numerik terpenuhi (Meskipun tidak ada standar spesifik untuk SLB, rasio ini lebih rendah dari jenjang lainnya).

Terdapat 919 sekolah di berbagai kabupaten/kota di Bangka Belitung yang tidak memiliki perpustakaan. Jumlah sekolah tanpa perpustakaan terbanyak terdapat di Kab. Bangka (175 sekolah) dan Kab. Bangka Barat (172 sekolah).

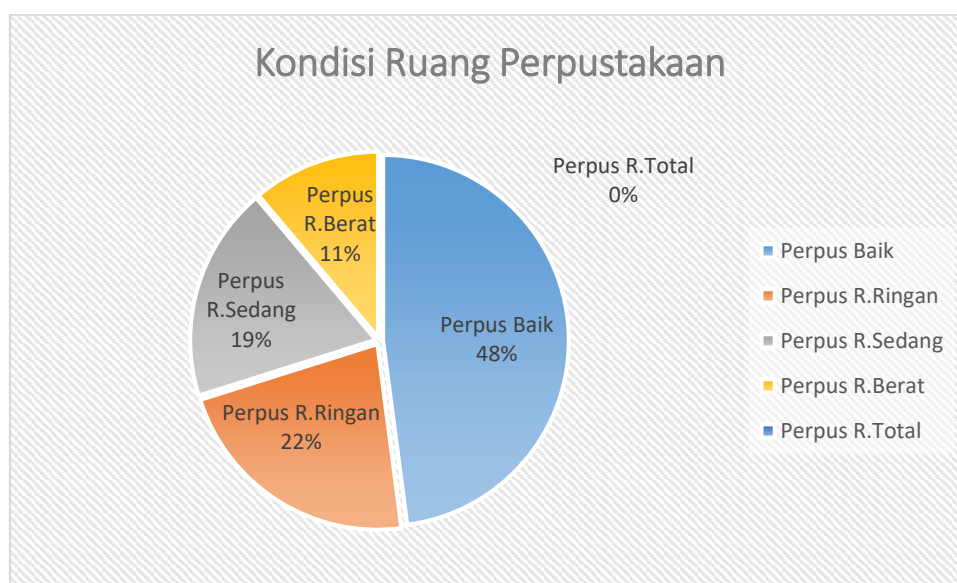
Tabel 12 Data Satuan Pendidikan yang belum memiliki Perpustakaan

Kabupaten/Kota	KB	PKBM	SD	SKB	SLB	SMA	SMK	SMP	SPS	TK	TPA	Jumlah
Kab. Bangka	75	6	5	1	1	3		5	5	63	11	175
Kab. Bangka Barat	106	5	3	1			3	6	6	38	4	172
Kab. Bangka Selatan	20	10	2	1		5		6	1	57	2	104

Kab. Bangka Tengah	50	7	4	1	1	3		6	27	69	8	176
Kab. Belitung	41	6	3			3		2		34	5	94
Kab. Belitung Timur	53	2	2	1					3	28	1	90
Kota Pangkal Pinang	10	6	8	1		3	1	6	13	50	10	108
Jumlah	355	42	27	6	2	17	4	31	55	339	41	919

Sumber Dapodik: September 2025

Sebanyak 1.219 sekolah memiliki perpustakaan, dengan jumlah sebanyak 1.256 unit perpustakaan. Ada beberapa sekolah yang memiliki perpustakaan lebih dari 1 unit, 602 unit (sekitar 47,9%) berada dalam kondisi Baik. Jenjang SD memiliki unit perpustakaan terbanyak yaitu 826 unit, tetapi juga memiliki jumlah terbanyak yang berada dalam kondisi Rusak Berat sebanyak 113 unit.



Gambar 9 Kondisi Perpustakaan

Berdasarkan capaian SNP untuk standar sarana prasarana pada jenjang pendidikan utama di Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

Tabel 13 Capaian Standar Sarpras Jenjang PAUD

Indikator	Skor Tahun 2024	Sekolah	Kat. Kurang	Kat. Sedang	Kat. Baik
Indeks Ketersediaan Sarana Prasarana Esensial	66,86	854	0	841	5

Pada capaian Standar Sarana Prasarana jenjang PAUD, 98% PAUD memiliki standar sarana prasarana pada kategori Sedang. Tidak ada yang berada pada kategori kurang, sedangkan pada kategori Baik hanya 5 PAUD.

Tabel 14 Capaian Standar Sarpras Jenjang SD

Indikator	Skor Tahun 2024	Sekolah	Kat. Kurang	Kat. Sedang	Kat. Baik
Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan	71,76	833	113	314	406
Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi	91,35	833	94	185	554
Indeks Fasilitas TIK	88,84	833	216	0	617
Indeks Kelengkapan Ruang Satuan Pendidikan	94,77	833	34	137	662
Indeks Kelayakan Ruang Satuan Pendidikan	40,68	833	599	220	14
Rata-rata	77,48				

Capaian standar sarana prasarana pada jenjang SD, hanya pada indeks kelayakan ruang kelas yang berada pada kategori Kurang, sedangkan indeks sanitasi satuan pendidikan masih berada pada kategori Sedang, indeks lainnya sudah berada pada kategori Baik.

Tabel 15 Capaian Standar Sarpras Jenjang SMP

Indikator	Skor Tahun 2024	Sekolah	Kat. Kurang	Kat. Sedang	Kat. Baik
Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan	63,18	242	52	98	92
Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi	83,59	242	50	53	139
Indeks Fasilitas TIK	88,84	242	40	0	202
Indeks Kelengkapan Ruang Satuan Pendidikan	84,64	242	52	72	118
Indeks Kelayakan Ruang Satuan Pendidikan	47,80	242	159	73	10
Rata-rata	73,61				

Capaian standar sarpras pada jenjang SMP berada pada kategori Sedang. Indeks Kelayakan Ruang Satuan Pendidikan hanya berada pada skor 47,80 dengan kategori kurang, sedangkan indeks sanitasi sudah berada pada kategori Sedang.

Selanjutnya untuk jenjang SMA, capaian standar sarpras berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata 68,48. Indeks kelayakan ruang menjadi indeks dengan nilai terkecil, kemudian diikuti oleh indeks sanitasi yang juga berada pada kategori Kurang. Dan tiga indeks lainnya sudah berada pada kategori Baik. Secara umum pada jenjang SD, SMP dan SMA indeks kelayakan ruang merupakan prioritas yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.

Tabel 16 Capaian Standar Sarana Prasarana jenjang SMA

Indikator	Skor Tahun Ini	Sekolah	Kat. Kurang	Kat. Sedang	Kat. Baik
Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan	59,51	81	24	22	35
Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi	75,54	81	23	20	38
Indeks Fasilitas TIK	81,07	81	20	0	61
Indeks Kelengkapan Ruang Satuan Pendidikan	82,10	81	17	22	42
Indeks Kelayakan Ruang Satuan Pendidikan	44,17	81	58	17	6
Rata-rata	68,48				

Data-data di atas memberikan gambaran bahwa kerusakan dan kekurangan sarana/prasarana sekolah bukan kasus minor, melainkan masalah sistemik dan mendasar yang memerlukan intervensi besar dan berkelanjutan. Data nasional itu menyembunyikan fakta bahwa beban terbesar berada pada sekolah-sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Sekolah-sekolah di kota besar, pusat provinsi, atau wilayah ekonomi kuat lebih mudah mendapatkan perhatian, dana, dan akses konstruksi. Sedangkan sekolah di daerah terpencil sering menghadapi hambatan akses bahan bangunan, transportasi, dan kualitas tenaga pelaksana. Hasilnya, kesenjangan fasilitas antarwilayah makin melebar, memicu ketidakadilan pendidikan di mana kualitas sekolah lebih tergantung lokasi daripada potensi siswa.

Program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah juga lahir dari kerangka kebijakan nasional dan kebutuhan proyeksi jangka panjang: Dalam dokumen juknis tahun 2025, pemerintah merencanakan revitalisasi sarana dan prasarana di ±219.000 satuan pendidikan, agar dapat memenuhi standar esensial pendidikan. Pemerintah telah menargetkan pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas secara berkala: data Kemendikbud menyebut bahwa sejak 2019 hingga 2023, setiap tahun ada sekitar 22.023 ruang kelas rehabilitasi melalui APBN dalam peta jalan perbaikan. Proyeksi kebutuhan revitalisasi jangka menengah juga besar: dalam rencana awal RPJMN 2025–2029, kebutuhan total revitalisasi satuan pendidikan diperkirakan mencapai Rp 571,6 triliun selama lima tahun.

Menurut kebijakan Presiden dan arahan pusat, sekolah akan diberi dana langsung (*cash transfer*) dan pelaksanaan swakelola agar bantuan lebih tepat sasaran dan efisien. Instruksi pusat juga menegaskan bahwa tidak boleh ada sekolah yang “atapnya runtuh,” serta tiap sekolah harus memiliki WC layak, sebagai simbol prioritas fasilitas dasar. Dari kondisi nyata dan proyeksi kebijakan, beberapa implikasi kritis yang memperkuat perlunya program revitalisasi:

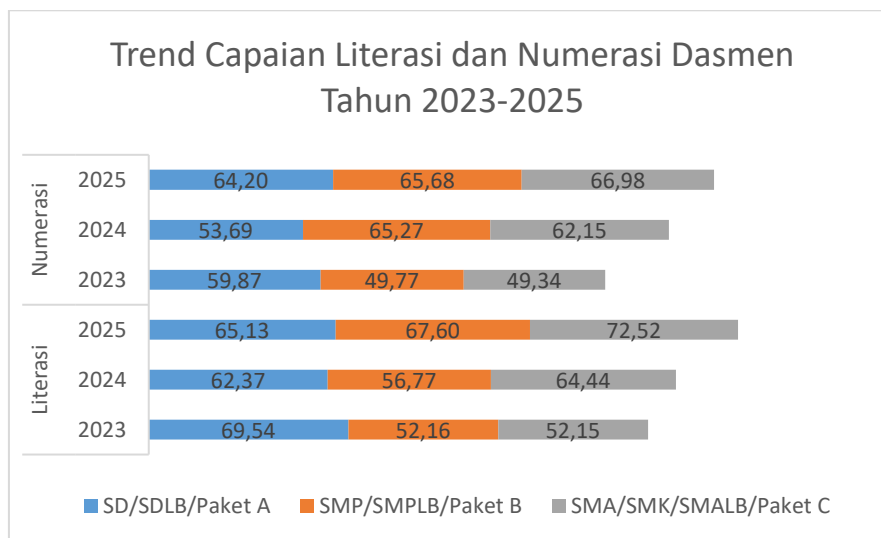
- Siswa yang belajar di ruang kelas rusak atau fasilitas minim akan sulit berkonsentrasi dan guru pun terbatas dalam penggunaan metode aktif atau praktikum.
- Fasilitas sekolah yang buruk dapat menurunkan semangat siswa, citra sekolah, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

- Ruang kelas atap bocor, tembok retak, saluran air buruk, dan sanitasi buruk — semua itu meningkatkan risiko kecelakaan, penyakit, dan gangguan pembelajaran.
- Jika kerusakan tidak segera diperbaiki, biaya menjadi jauh lebih tinggi ke depan dan pekerjaan rekonstruksi bisa jauh lebih berat.
- Sekolah dengan fasilitas lebih baik akan semakin unggul, sementara sekolah yang tertinggal sulit mengejar. Ketidaksetaraan infrastruktur ini memperlebar gap prestasi antar wilayah dan grup sosial.

1.1.2 Kualitas Pendidikan

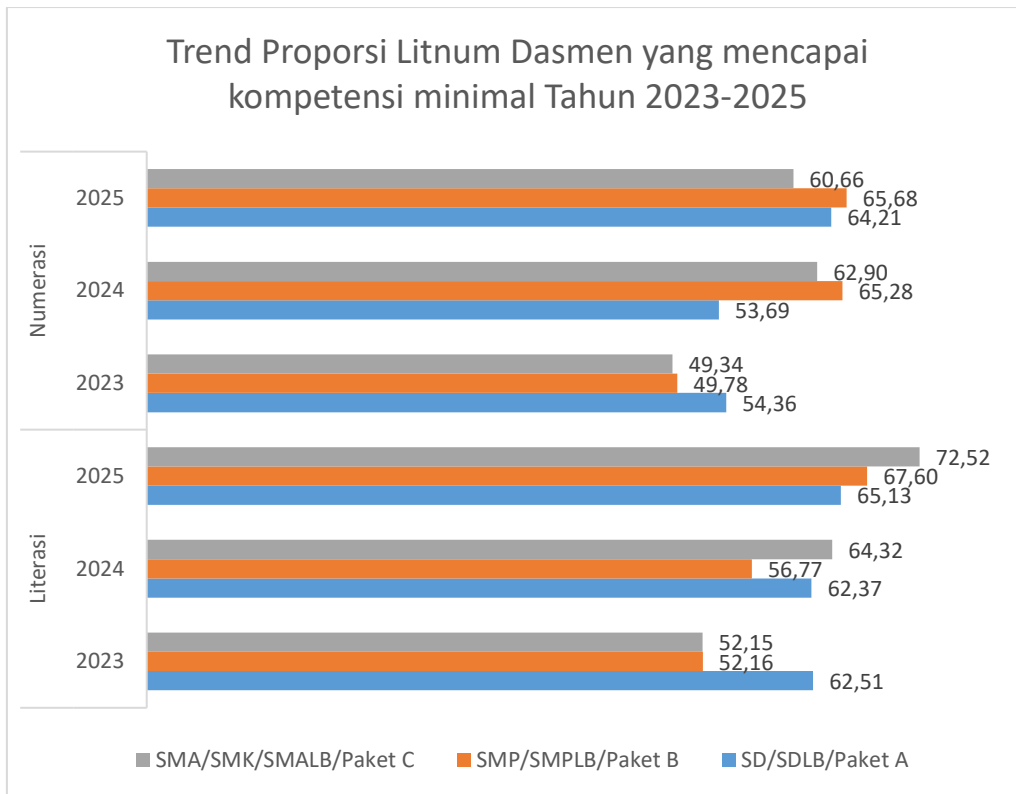
Kemampuan Literasi dan Numerasi

Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat mewujudkan kemajuan negara. Peningkatan kualitas pendidikan di berbagai jenjang masih perlu diupayakan dengan peningkatan kualitas kurikulum, model pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sistem penilaian yang tepat, serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang memadai. Kualitas pendidikan juga perlu didukung dengan fasilitasi pembelajaran secara digital dengan memanfaatkan teknologi. Upaya yang dilakukan telah dapat mendorong perbaikan pembelajaran, yang antara lain ditunjukkan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik (*learning outcome*).



Gambar 10 Trend Capaian Literasi dan Numerasi

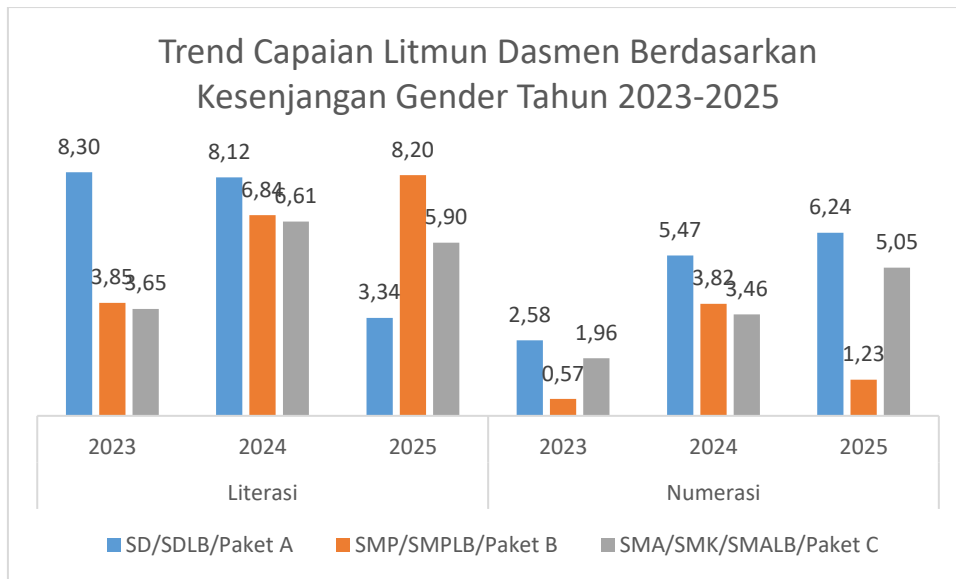
Capaian pembelajaran yang diukur melalui Asesmen Nasional (AN), menunjukkan kecenderungan adanya perbaikan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di Bangka Belitung. Gambar 10 menunjukkan peningkatan capaian literasi dan numerasi, dari tahun 2023 hingga 2025.



Gambar 11 Trend Proporsi Litnum yang mencapai Kompetensi Minimal per jenjang (sumber : Data Asesmen Nasional)

Peserta didik yang memiliki kompetensi dalam literasi dan numerasi terus mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2023-2025. Proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi nilai di atas batas minimum pada literasi membaca meningkat dari 62,51% (enam puluh dua koma lima puluh satu persen) pada tahun 2023 menjadi 65,13% (enam puluh lima koma tiga belas persen) pada tahun 2025 pada jenjang SD sederajat. Begitupula halnya dengan capaian kompetensi dasar di atas batas minimum pada numerasi meningkat 54,36% (lima puluh empat koma tiga puluh enam persen) pada tahun 2023, dan menjadi 64,21% (enam puluh empat koma dua puluh satu persen) pada tahun 2025. Peningkatan juga terjadi pada proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi nilai di atas batas minimum pada numerasi dan literasi di jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat.

Kesenjangan Gender terbesar berdasarkan Gambar 12 untuk capaian literasi berada pada jenjang SMP/SMPLB/Paket B yaitu 8,20 (delapan koma dua puluh), kesenjangan gender pada jenjang ini meningkat setiap tahunnya. Begitu juga dengan jenjang SMA/SMK/SMALB/Paket C juga meningkat dari tahun 2023 menjadi 5,90 (lima koma sembilan puluh). Dan untuk jenjang SD/SDLB/Paket A menunjuk tren positif yang turun hingga 3,34 (tiga koma tiga puluh empat). Semakin kecil kesenjangan semakin baik. Untuk capaian numerasi kesenjangan gender pada jenjang SD/SDLB/Paket A menunjukan kenaikan kesenjangan setiap tahunnya, sedangkan untuk jenjang SMP/SMPLB/Paket B memiliki nilai kesenjangan terkecil untuk capaian literasi dan fluktuatif setiap tahunnya. Adapun jenjang SMA/SMK/SMALB/Paket C menunjukan kenaikan kesenjangan hingga hasil akhir di tahun 2025 sebesar 5,05 (lima koma nol lima).



Gambar 12 Tren Capaian Literasi dan Numerasi berdasarkan Kesenjangan Gender

Pencapaian skor literasi dan numerasi dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal seperti tercukupinya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, adanya pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, pemenuhan kualifikasi akademik S1 dan atau D4 pendidik serta dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain

1. Melakukan pendataan satuan pendidikan yang belum memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi.
2. Mengusulkan satuan pendidikan yang belum memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi untuk menerima DAK Fisik dan/atau sumber pendanaan lain yang relevan
3. Mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi
4. Melakukan pengadaan peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi
5. Melakukan supervisi dan evaluasi

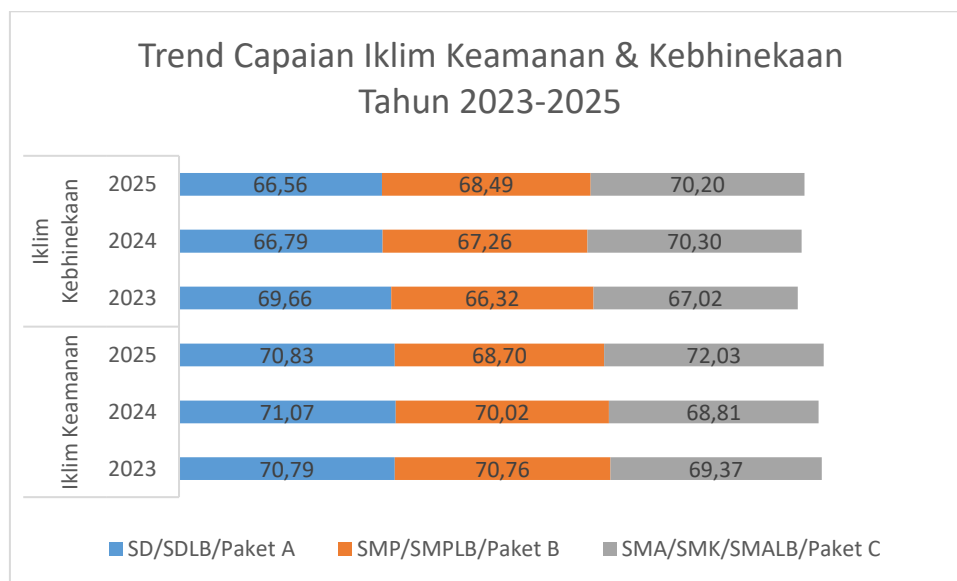
Pendidikan berkualitas untuk semua perlu ditekankan, sehingga semua anak, baik perempuan maupun laki-laki, dari semua wilayah, serta kelompok pengeluaran mendapatkan akses pendidikan dan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.

Lingkungan Belajar

Lingkungan belajar aman merupakan lingkungan belajar yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak, pendidik, dan tenaga kependidikan, baik secara fisik, psikis (mental), maupun sosial. Keamanan bangunan, keamanan lingkungan, dan tersedianya fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) termasuk ke dalam keamanan fisik. Sedangkan, kebijakan anti kekerasan seksual, anti kekerasan fisik, anti perundungan, dan anti hukuman fisik termasuk ke dalam keamanan psikis. Dalam Rapor Pendidikan, terdapat beberapa

indikator penilaian yang berhubungan dengan lingkungan belajar di sekolah, yang terdiri dari Iklim Keamanan, Iklim Kebinekaan, dan Iklim Inklusivitas.

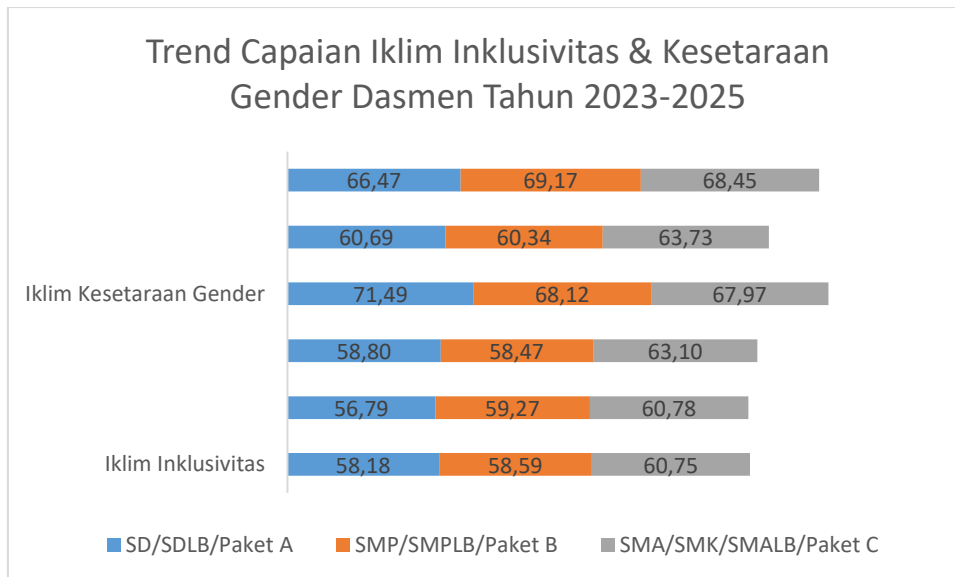
Iklim Keamanan Sekolah merupakan indikator yang dapat mengukur tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah, termasuk di dalamnya terbebas dari perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah. Terdapat 6 (enam) indikator yang digunakan untuk menilai iklim keamanan satuan pendidikan, yaitu indikator kesejahteraan psikologi peserta didik, indikator kesejahteraan psikologi guru, indikator perundungan, indikator hukuman fisik, indikator kekerasan seksual, dan indikator narkoba.



Gambar 13 Trend Iklim Keamanan dan Iklim Kebhinekaan (sumber : Data Asesmen Nasional)

Gambar 13 memperlihatkan hasil capaian Iklim Keamanan Sekolah berdasarkan data Asesmen Nasional. Dari tahun 2023 hingga 2025, Iklim Keamanan Sekolah pada jenjang SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket B, dan SMA/SMK/SMLB/Paket C termasuk dalam kategori "Baik" dengan rentang nilai 65 (enam puluh lima) hingga 75 (tujuh puluh lima). Hal ini berarti pada seluruh jenjang sekolah sudah mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, guru, dan tenaga kependidikan. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan peserta didik mendapatkan lingkungan keamanan sekolah yang baik.

Iklim Kebhinekaan Sekolah adalah indikator yang dapat mengukur kondisi lingkungan sekolah yang menunjukkan adanya toleransi beragama, berbudaya, dan komitmen berkebangsaan. Lingkungan sekolah yang toleran dapat mendorong peserta didik mengembangkan potensi terbaik tanpa perlu khawatir mengalami diskriminasi karena adanya perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Berdasarkan data Asesmen Nasional, Iklim Kebhinekaan Sekolah pada jenjang SD/SDLB/Paket A, SMP/SMPLB/Paket B, dan SMA/SMK/SMLB/Paket C termasuk ke dalam kategori "Baik", yang berarti bahwa sekolah sudah mampu menghadirkan suasana belajar yang menjunjung tinggi toleransi keberagaman. Namun data menunjukkan untuk jenjang SD sederajat terjadi penurunan, namun untuk jenjang lainnya trend meningkat.



Gambar 14 Trend Capaian Iklim Inklusivitas dan Kesetaraan

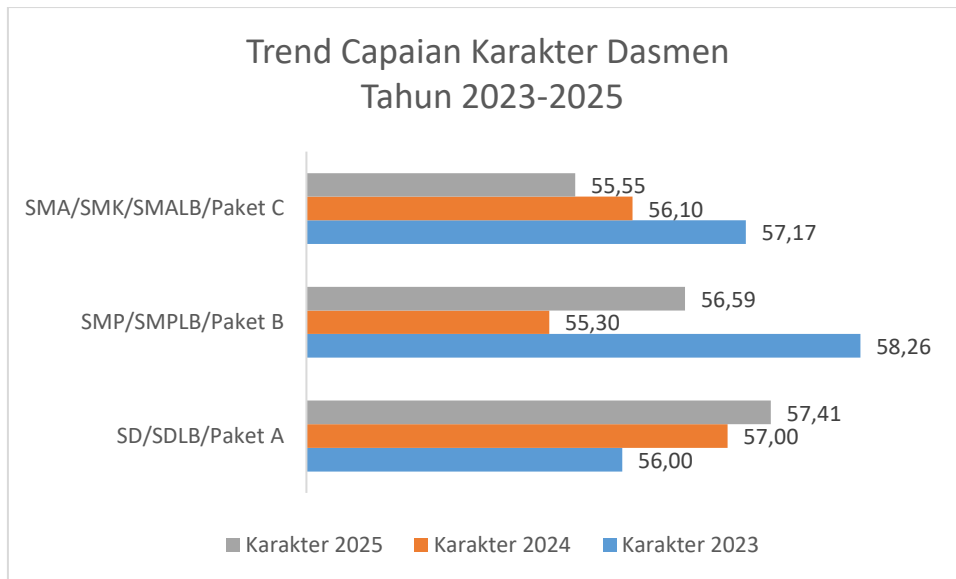
Untuk iklim inklusivitas pada jenjang SD/SDLB/Paket A bersifat fluktuatif, dengan nilai akhir 58,80 (lima puluh delapan koma delapan puluh) meningkat dari tahun 2023, sedangkan pada jenjang SMP/SMPLB/Paket B menunjukkan tren penurunan. Dan untuk jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C menunjukkan tren kenaikan.

Pada iklim kesetaraan gender pada jenjang SD/SDLB/Paket A mengalami penurunan, sedangkan jenjang SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/SMLB/Paket C bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat untuk hasil di 2025, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14.

Iklim lingkungan belajar yang terkait dengan iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas memerlukan upaya dari pemerintah daerah dalam mengedepankan layanan Pendidikan yang aman dari perundungan kekerasan seksual dan hukuman fisik, adanya toleransi yang terjadi antar warga sekolah masyarakatan dan orang tua serta adanya layanan Pendidikan yang beragam sesuai dengan kebutuhan warga sekolah kesetaraan gender dan bagi yang membutuhkan layanan khusus. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pendampingan pada proses pembelajaran di satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, dan kebijakan yang mengandung kekerasan dengan memastikan pemenuhan hak anak.
2. Melakukan pendampingan perkembangan psikologis dan sosial peserta didik selama masa pembelajaran di satuan pendidikan.

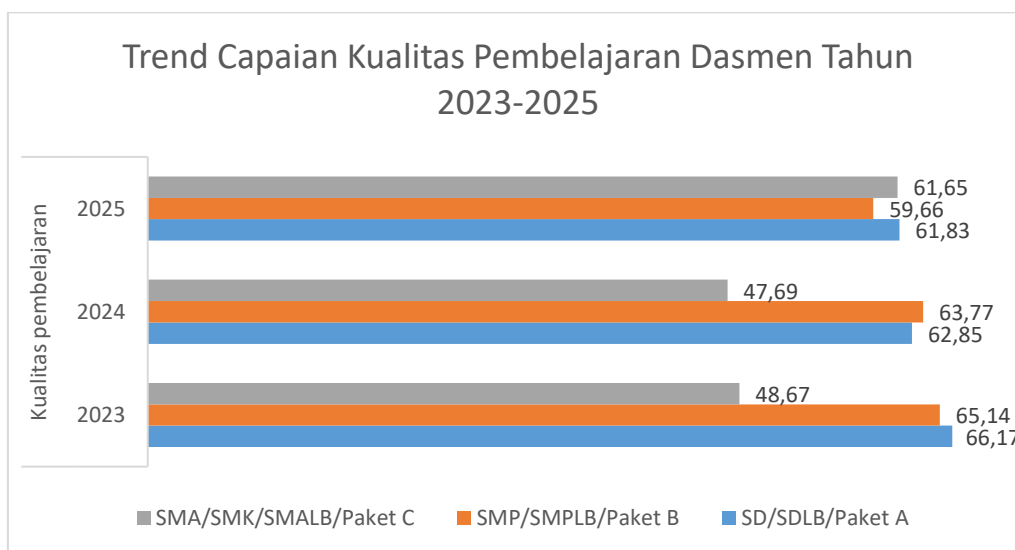
Pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang baik pada peserta didik, sehingga dapat menjadi individu yang memiliki integritas, empati, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu, nilai karakter penting dimiliki oleh seorang siswa untuk membentuk kedekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun integritas dan moralitas pribadi sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis, serta menghasilkan generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat.



Gambar 15 Trend Capaian Karakter (sumber : Data Asesmen Nasional)

Berdasarkan data Asesmen Nasional, nilai Skor Karakter mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 hingga tahun 2025 untuk jenjang pendidikan SD/SDLB/Paket A, sementara jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B dan SMA/SMK/SMLB/Paket C cenderung menurun. Pada tahun 2025, capaian skor karakter tertinggi berada pada jenjang SD/SDLB/Paket A sebesar 57,41 (lima puluh tujuh koma empat puluh satu), diikuti jenjang SMP/SMPLB/Paket B sebesar 56,59 (lima puluh enam koma lima puluh sembilan), dan jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C hanya sebesar 55,55 (lima puluh lima koma lima puluh lima). Secara keseluruhan, Skor Karakter mencapai kategori baik yang berarti sebagian besar peserta didik sudah terbiasa dan secara konsisten menerapkan nilai-nilai Pancasila.

Kualitas pembelajaran adalah kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Pembelajaran yang bersifat interaktif dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih baik untuk mendorong peserta didik mengembangkan karakter dan kompetensi yang diperlukan.



Gambar 16 Trend Capaian Kualitas Pembelajaran (sumber : Asesmen Nasional)

Berdasarkan data Asesmen Nasional tahun 2023-2025, terlihat bahwa kualitas pembelajaran mengalami penurunan pada jenjang SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B. Namun untuk jenjang SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 61,65 (enam puluh satu koma enam puluh lima), mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelumnya yang hanya 48,67% (empat puluh delapan koma enam puluh tujuh). Kualitas pembelajaran pada semua jenjang termasuk ke dalam kategori “Sedang”, yang berarti bahwa suasana kelas mulai kondusif, dukungan psikologis serta pembentukan pemahaman dari guru meningkat.

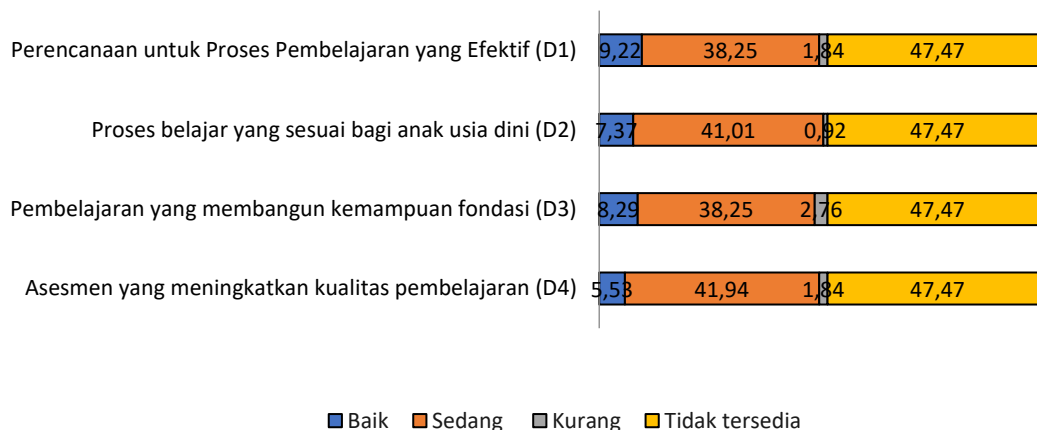
Kualitas Layanan Pendidikan 1 (Satu) Tahun Prasekolah

Pemahaman mengenai layanan pendidikan yang perlu diterima anak usia dini di PAUD masih perlu ditingkatkan. Wajib Belajar 1 (satu) tahun prasekolah merupakan inisiatif penting dan merefleksikan komitmen Indonesia untuk memastikan setiap anak usia 5 (lima)-6 (enam) tahun dapat berpartisipasi dalam pembelajaran terorganisir sebelum masuk ke jenjang pendidikan dasar, sehingga lebih siap bersekolah secara holistik. Penerapan Wajib Belajar 1 (satu) tahun prasekolah sebaiknya dilakukan di saat ekosistem layanan sudah menguat.

Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk membantu anak mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta sebelum memasuki pendidikan dasar. Partisipasi dalam pendidikan anak usia dini memiliki dampak jangka panjang, terutama bagi anak-anak. Namun, manfaat ini hanya dapat dirasakan jika layanan PAUD memiliki kualitas yang baik. PAUD dengan kualitas kurang baik justru dapat memberikan dampak negatif, menimbulkan stres pada anak, yang bahkan dapat menyebabkan trauma terhadap proses belajar (Britto dkk., 2011). Ini bertentangan dengan tujuan PAUD yang seharusnya membangun pandangan positif anak terhadap pembelajaran.

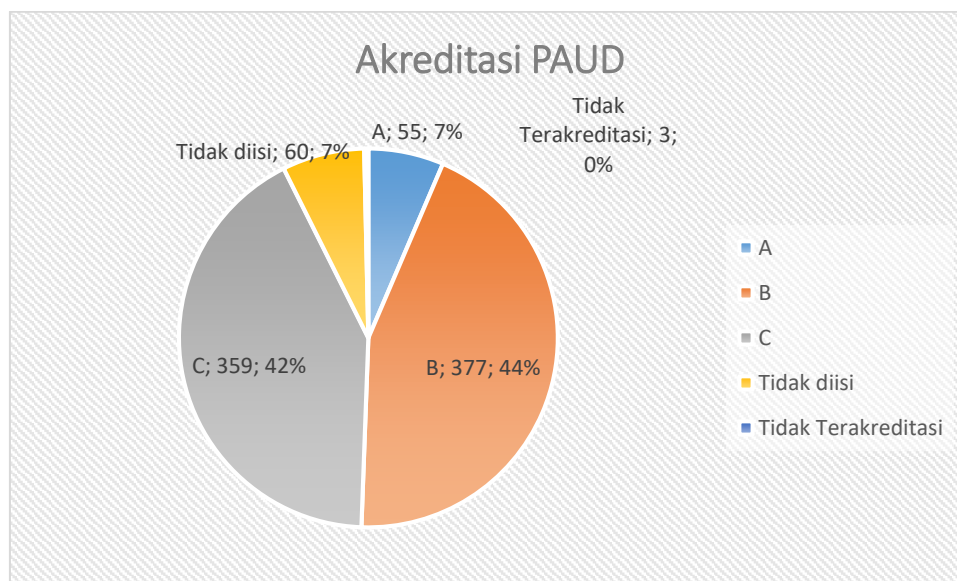
Sejak tahun 2022 telah dilakukan Survei Lingkungan Belajar, yang antara lain dapat menilai kualitas lingkungan belajar di satuan PAUD, yang dapat bermanfaat untuk membantu satuan PAUD memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan. Data tahun 2025, berdasarkan kategori kualitas proses pembelajaran sebagian besar satuan PAUD masih berada dalam kategori ‘Sedang’, yang artinya kualitas pembelajaran masih sangat perlu ditingkatkan. Gambar 19 menunjukkan masih sedikit satuan PAUD dengan kategori baik dalam menyusun perencanaan agar proses pembelajaran berlangsung efektif. Penyusunan perencanaan pembelajaran yang efektif memungkinkan pendidik mampu untuk menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dan mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran juga sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada keberhasilan program PAUD.

Persentase satuan PAUD berdasarkan kualitas pembelajaran PAUD Tahun 2025



Gambar 17 Persentase PAUD berdasarkan kualitas Pembelajaran

Kualitas PAUD dapat dilihat juga dari status akreditasi. Pada tahun 2024, PAUD yang terakreditasi minimal B sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) PAUD dari total 854 (delapan ratus lima puluh empat) PAUD yang ada di Bangka Belitung. Berikut data kreditasi PAUD di Bangka Belitung.



Gambar 18 Akreditasi PAUD Bangka Belitung

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan PAUD terutama untuk pencapaian akreditasi B dan kualifikasi akademik pendidik S1/D4 perlu mendapatkan perhatian dengan adanya akses yang terjangkau, meningkatkan mutu Pendidikan PAUD dan tatakelola layanan PAUD, dukungan Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan wajar 1 tahun pra sekolah, serta menurunkan disparitas antara paud formal dan non formal atau yang dikelola Kemendikdasmen dan yang dikelola Pemerintah Desa. Sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain.

1. Memfasilitasi pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam rangka memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh pemangku kepentingan terkait.
2. Memfasilitasi keikutsertaan pendidik PAUD yang belum memiliki kualifikasi S1 dalam diklat Berjenjang yang disediakan oleh Kemendikdasmen.
3. Adokasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Wajar 1 Tahun Pra Sekolah.

Digitalisasi Pendidikan

Digitalisasi pendidikan di Indonesia adalah proses multifaset yang mengubah cara penyelenggaraan pembelajaran, manajemen sekolah, dan kebijakan pendidikan nasional. Transformasi ini mencakup penyediaan infrastruktur (perangkat, jaringan), pengembangan platform pembelajaran (seperti Rumah Belajar dan platform terpadu yang lebih baru: Rumah Pendidikan), program peningkatan kapabilitas guru, serta kebijakan pemerintah untuk memperluas akses dan pemerataan. Periode 2019–2025 menandai percepatan digitalisasi yang dipicu oleh pandemi COVID-19 — yang memaksa sekolah, guru, dan siswa beralih cepat ke pembelajaran daring — dan dilanjutkan oleh inisiatif pemerintah yang lebih sistematis untuk memasukkan teknologi ke dalam kurikulum dan fasilitas sekolah. Perkembangan ini menunjukkan kemajuan: penetrasi internet nasional meningkat signifikan, inisiatif skala besar diumumkan untuk menjangkau ratusan ribu sekolah, dan lembaga pusat mengintegrasikan layanan digital pendidikan. Namun, kemajuan tersebut juga mengungkapkan masalah struktural: akses perangkat dan komputer di banyak sekolah masih rendah; infrastruktur listrik dan internet tidak merata; kapasitas guru belum merata; dan ada risiko simbolisasi (perangkat tanpa pendampingan) bila kebijakan tidak disertai intervensi holistik. Upaya digitalisasi pendidikan di Indonesia sebenarnya dimulai lebih awal dengan berbagai program pilot: penyediaan laboratorium komputer di sekolah tertentu, program e-learning terbatas, dan proyek kerjasama internasional untuk membangun kapasitas TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Fase ini bersifat sporadis, bergantung pada alokasi dana proyek, peran donor, dan inisiatif daerah—belum ada skala nasional yang komprehensif. Seiring meningkatnya akses internet global dan penurunan biaya perangkat, pemerintah mulai memasukkan aspek TIK ke dalam strategi pendidikan. Kurikulum nomor kebijakan memasukkan literasi digital sebagai komponen penting, dan Kemdikbud (sebelum menjadi Kemendikbudristek) mendorong platform seperti Rumah Belajar sebagai sumber belajar daring untuk guru dan siswa. Pengembangan kemampuan guru mulai mendapatkan perhatian melalui pelatihan TIK.

Pandemi COVID-19 adalah pemicu percepatan terbesar digitalisasi pendidikan di Indonesia. Sekolah ditutup dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi norma sementara. Pemerintah, sekolah, penyedia platform edtech, dan masyarakat bergerak cepat: konten daring diproduksi masif, Rumah Belajar menjadi salah satu sumber resmi yang diperluas, dan banyak guru memodifikasi metode mengajar untuk daring. Namun fase ini juga menampakkan ketimpangan akses: anak-anak di daerah tanpa internet atau perangkat praktis tertinggal. Setelah fase darurat, pemerintah mulai merencanakan program yang lebih sistematis:

integrasi data (Dapodik dan sistem lain), pengembangan portal terpadu, serta program peningkatan infrastruktur sekolah (DAK Fisik, BOS, program TIK sekolah). Pada 2025, inisiatif terpusat seperti peluncuran Rumah Pendidikan (super-aplikasi/pusat layanan digital pendidikan) menandai upaya memperkuat ekosistem digital secara nasional, mengintegrasikan layanan, konten, dan manajemen pembelajaran.

Angka penetrasi internet di Indonesia tumbuh pesat; survei APJII 2024 mencatat penetrasi sekitar 79,5% pengguna internet dari total populasi, yang membuka peluang akses konten pendidikan digital bagi kebanyakan penduduk. Berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2022-2023, tingkat penetrasi internet di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 82,66%. Angka penetrasi 82,66% menempatkan Kepulauan Bangka Belitung di urutan ke-4 sebagai provinsi dengan penetrasi pengguna internet tertinggi di Indonesia. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (melalui Diskominfo) memfokuskan peningkatan infrastruktur jaringan internet untuk mempercepat inklusi digital di desa dan pulau-pulau terpencil. Upaya pemerataan fasilitas jaringan sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, dapat mengakses layanan internet dengan mudah dan bebas. Meskipun angka penetrasi tinggi, Ombudsman RI pernah menyoroti bahwa akses internet di Bangka Belitung belum merata, yang menjadi tantangan dalam implementasi digitalisasi.

Peningkatan indeks TIK nasional (BPS: Indeks Pembangunan TIK 2024 mencapai 6,02 dari skala 0–10) menunjukkan perbaikan infrastruktur secara makro, tetapi tantangan konektivitas masih nyata pada level sekolah. Data BPS dan analisis lain menunjukkan fenomena penting: proporsi sekolah dengan akses komputer tidak tinggi dan pada beberapa jenjang bahkan menurun pasca-pandemi. Laporan menyebutkan proporsi sekolah dengan akses komputer di jenjang SD rendah (sekitar 5% pada 2022 dalam beberapa dataset), yang menandakan bahwa kepemilikan perangkat di sekolah masih sangat terbatas. Artinya, walau banyak siswa memiliki ponsel, lingkungan sekolah formal seringkali tidak memiliki sarana yang memadai untuk pembelajaran digital terstruktur. Kondisi ini menuntut kebijakan untuk penyediaan perangkat (laptop, tablet, IFP/layar interaktif) dan perawatan jangka panjang.

Memasuki 2024–2025, pemerintah mengumumkan program skala besar untuk digitalisasi pembelajaran yang mencakup pengadaan perangkat dan layar interaktif (*Interactive Flat Panel*) ke ribuan sekolah. Target-target fiskal dan distribusi diumumkan sebagai bagian dari rencana pemerataan; pada 2025 ada pernyataan resmi mengenai program yang menyasar ratusan ribu sekolah sebagai tahap awal distribusi perangkat pembelajaran digital. Program ini dirancang agar setiap sekolah memiliki media untuk menyampaikan materi terstandar, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kelengkapan tenaga pendamping, listrik, dan jaringan internet di setiap lokasi.

Rumah Belajar adalah salah satu inisiatif pusat yang dibangun sebagai *Learning Management System* (LMS) publik, menyediakan sumber belajar beragam (video, bank soal, laboratorium maya, kelas maya) yang gratis untuk guru dan siswa. Keberadaannya memberi dasar platform publik untuk konten pembelajaran yang bisa diakses tanpa biaya konten. Namun tantangannya: seberapa luas platform ini dipakai di sekolah yang tidak memiliki perangkat memadai atau akses internet stabil?

Pada awal 2025, Kemendikdasmen meluncurkan atau mengumumkan Rumah Pendidikan sebuah upaya untuk mengintegrasikan berbagai layanan digital (konten, data, manajemen, fitur kolaborasi). Rumah Pendidikan dimaksudkan sebagai peta jalan transformasi digital: menggabungkan sumber daya, ruang kolaborasi, dan layanan administrasi pendidikan dalam satu portal terpadu untuk siswa, guru, orang tua, dan pemda. Upaya ini merefleksikan pemahaman bahwa pembangunan platform tidak cukup, yang diperlukan adalah interoperabilitas layanan, kemudahan akses, dan konsistensi konten berkualitas. Selain inisiatif pemerintah, berkembang pula ekosistem perusahaan edtech lokal dan internasional yang menyediakan layanan bimbingan belajar daring, platform manajemen kelas, dan konten interaktif berbayar. Kolaborasi publik-swasta menjadi salah satu strategi untuk mempercepat penyediaan perangkat, konten berkualitas, dan pelatihan guru. Namun perlu kebijakan yang memastikan konten komersial tetap terjangkau dan dapat melingkupi — bukan menggantikan — layanan publik gratis.

Digitalisasi pendidikan dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan: regulasi kurikulum (yang memasukkan literasi digital), juknis DAK TIK, kebijakan BOS yang dapat dialokasikan untuk pemeliharaan TIK, serta peraturan pusat mengenai standar infrastruktur sekolah. Pemerintah pusat sejak 2024–2025 memperkuat arahan kepada pemerintah daerah agar melakukan sinkronisasi data, memetakan kebutuhan, dan menyiapkan rencana pelaksanaan digitalisasi berbasis data Dapodik. Data dan kebijakan yang konsisten menjadi syarat agar bantuan tepat sasaran. Sumber pendanaan program digitalisasi berasal dari beberapa kanal: alokasi APBN (program nasional), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk infrastruktur, dana BOS untuk pemeliharaan (terbatas), serta dukungan CSR dari dunia usaha. Skema pendanaan ini harus dirancang agar tidak hanya pembelian perangkat, tetapi juga pemeliharaan, upgrade, pelatihan guru, dan konektivitas berkelanjutan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pengadaan perangkat satu kali tanpa rencana pemeliharaan mengakibatkan perangkat cepat rusak dan tidak terpakai.

Suksesnya digitalisasi mensyaratkan integrasi data lintas instansi: Dapodik (pendidikan), Dukcapil (identitas), data sosial (untuk jalur afirmasi), serta data penyedia layanan telekomunikasi (ketersediaan jaringan). Koordinasi ini memerlukan protokol keamanan data, kebijakan privasi, dan tata kelola yang jelas agar data digunakan untuk peningkatan layanan pendidikan tanpa mengorbankan perlindungan data pribadi. Peran guru adalah determinan kunci dalam memanfaatkan teknologi secara efektif. Banyak guru yang telah belajar cepat selama pandemi, mengadopsi metode sinkron dan asinkron, membuat materi multimedia, dan menilai secara digital. Namun skala dan kedalaman kompetensi belum merata: sebagian guru masih kesulitan adaptasi teknologi, ada yang belum mendapat pelatihan pedagogi digital yang memadai, dan masih ada kebutuhan pelatihan berkelanjutan (lahirnya literasi digital pedagogis — bukan sekadar literasi perangkat). Pelatihan guru harus mencakup desain pembelajaran daring/hybrid, penilaian digital, keamanan siber, dan pemanfaatan konten terbuka. Transformasi digital memungkinkan berbagai model: full online (cocok untuk pembelajaran jarak jauh), blended/hybrid (kombinasi tatap muka dan daring), serta pembelajaran berbasis proyek yang memanfaatkan sumber digital untuk riset dan kolaborasi. Kurikulum Merdeka mendorong pengalaman belajar lebih kontekstual; digitalisasi dapat menjadi fasilitator asalkan infrastrukturnya tersedia dan guru mampu memfasilitasi proses.

Sekolah perlu mengembangkan manajemen TIK: rencana kebutuhan tahunan, anggaran pemeliharaan, keamanan perangkat, serta peran teknisi sekolah (bisa berbentuk tenaga fokus atau gabungan). Tanpa tata kelola yang baik, perangkat dan platform tidak akan dipakai optimal. Ini termasuk juga strategi penyimpanan konten lokal (untuk area dengan akses internet terbatas) dan konten offline yang bisa diakses tanpa koneksi terus-menerus.

Ketimpangan akses: Sekolah tanpa komputer dan jaringan tetap tertinggal; perangkat yang dibagikan belum menjangkau semua sekolah. Data menunjukkan proporsi sekolah dengan komputer sangat rendah di beberapa jenjang. Masalah teknis dan pemeliharaan: Perangkat kadang rusak tanpa rencana perbaikan; listrik atau jaringan tidak stabil. Kualitas konten dan kesesuaian lokal: Tidak semua konten digital relevan secara kontekstual untuk daerah tertentu; adaptasi lokal seringkali diperlukan. Risiko komersialisasi: Ketergantungan pada layanan berbayar berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan jika sekolah/ortu tidak mampu membiayai.

Dukungan Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa masalah gizi masih menjadi hambatan utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS tahun 2024, sekitar 8,53 persen anak Indonesia masih mengalami ketidakcukupan gizi. Kondisi ini memengaruhi kemampuan belajar siswa, konsentrasi, kesehatan, dan capaian pendidikan. Selain itu, ada kesenjangan akses gizi antara wilayah; beberapa daerah memiliki fasilitas dan kemampuan pendampingan yang tinggi, sementara daerah terpencil mengalami kekurangan pelayanan gizi, baik dari sisi distribusi makanan sehat maupun ketersediaan sumber nutrisi. Pemerintah juga mengidentifikasi bahwa sekolah adalah salah satu tempat strategis untuk menjangkau banyak anak sekaligus dalam pemenuhan gizi harian.

Program makan bergizi gratis (MBG) muncul sebagai intervensi yang diharapkan bisa merespons secara langsung isu gizi dan mengurangi beban orang tua, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Selain fungsi gizi, MBG juga diwacanakan untuk turut membentuk karakter: kebersihan, etika makan, tidak membuang makanan (anti-mubazir), serta kebiasaan makan yang baik secara sosial. Pada awalnya, program ini bekerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana di sekolah-sekolah.

Titik awal peluncuran pada 6 Januari 2025 dilakukan di 190 titik SPPG yang tersebar di 26 provinsi salah satunya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya di Kabupaten Belitung Timur. Rencana ekspansinya cukup agresif: pada akhir Januari 2025 direncanakan diperluas ke sekitar 943 titik SPPG di seluruh Indonesia. Untuk memperkuat pelaksanaan, pemerintah membangun kerjasama antar lembaga: antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional. Program ini juga mendapat dukungan dari organisasi internasional seperti UNICEF. Selanjutnya, di Bogor (11 Februari 2025), diluncurkan *Center of Excellence MBG (CoE MBG)*, yang bertujuan menjadi pusat penelitian, inovasi, pelatihan, dan pengembangan pedoman-pelaksanaan program. Buku Rekomendasi Penyelenggaraan MBG, pedoman standar gizi, prosedur operasional baku,

sistem pemantauan dan evaluasi, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah termasuk bagian dari *output CoE* tersebut.

Dalam perkembangannya di Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Maret 2025 beroperasi SPPG ke dua di Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Kecamatan Kelapa yang melayani 23 satuan pendidikan (20 sekolah Kemendikdasmen dan 3 sekolah Kemenag) dengan penerima manfaat sebanyak 3.221 siswa. Tak lama setelah itu diluncurkan MBG di Kabupaten Belitung di Tanjung Pandan melayani 11 sekolah dengan 3102 penerima manfaat yang setelah itu terus berkembang SPPG di Kabupaten/kota yang lain yang ekspansinya cukup agresif. Adapun target penerima manfaat dan rencana SPPG per Kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Target Penerima Manfaat dan Rencana SPPG Bangka Belitung (sumber : BGN Bangka Belitung)

No	Kabupaten/Kota	Penerima Manfaat	Rencana dapur
1	Pangkalpinang	63.623	22
2	Bangka	94.686	32
3	Bangka Tengah	60.749	21
4	Bangka Selatan	58.181	20
5	Bangka Barat	61.016	21
6	Belitung	48.405	17
7	Belitung Timur	34.405	12
		421.065	145

Direncanakan dengan 145 SPPG ditargetkan selesai. Pada akhir agustus 2025 telah beroperasi 9 Dapur dengan penerima manfaat yang ditargetkan 421.065 terealisasi 27.491 penerima manfaat. Dan di akhir September ditargetkan akan sudah ada 16 Dapur SPPG yang beroperasi melayani 204 satuan pendidikan dengan penerima manfaat sebanyak 45.549 siswa.

Dalam pelaksanaan MBG didukung dengan anggaran Pemerintah Daerah terutama dalam Renja Dinas pendidikan dan Dinas Kesehatan. BPMP juga secara proaktif berkoordinasi dengan BGN Regional Kep. Bangka Belitung dalam Update data satuan Pendidikan Penerima Manfaat dan progress Dapur SPPG yang beroperasi.

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI merupakan bagian integral dari program MBG, SPPI merupakan perwakilan BGN dalam memastikan MBG berjalan secara efektif di daerah. Lulusan SPPI ditugaskan untuk memimpin dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, selain itu juga mereka mememanajemen operasional SPPG serta melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Perkembangan SPPI yang hanya 10 orang di bulan Juni 2025, terus berkembang menjadi telah memiliki 131 SPPI di awal september 2025. SPPI tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Kepulauan bangka Belitung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18 Penempatan SPPI di Bangka Belitung (sumber : BGN Bangka Belitung)

No	Kabupaten/Kota	Sudah Penempatan	Belum Penempatan
<hr/>			

1	Pangkalpinang	5	33
2	Bangka	1	20
3	Bangka Tengah	1	15
4	Bangka Selatan	0	17
5	Bangka Barat	1	13
6	Belitung	1	14
7	Belitung Timur	2	8
		11	120

Program ini tidak hanya fokus pada penyediaan makanan. Aspek non-gizi juga diangkat: pembentukan karakter (misalnya kebersihan, etika makan, menghindari perilaku mubazir), serta penguatan layanan kesehatan pendukung. Kemitraan juga makin diperkuat, antara Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional melalui Nota Kesepahaman (MoU) yang menegaskan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pemantauan program ini.

Meskipun keberhasilan-awal sudah terlihat, banyak sorotan dan tantangan yang muncul: Regulasi, pedoman, dan sosialisasi: Ada kekhawatiran bahwa petunjuk teknis, prosedur operasional baku, dan pedoman belum sepenuhnya tersosialisasi ke semua SPPG maupun pihak sekolah/pelaksana di lapangan. Manajemen dan keamanan pangan: Salah satu isu penting adalah jaminan keamanan pangan—bagaimana makanan dipersiapkan, disimpan, disajikan agar tetap higienis. Kehigienisan dapur, kualitas bahan baku, dan prosedur pengolahan menjadi perhatian utama.

Tantangan distribusi dan logistik: Menyediakan makanan bergizi gratis secara merata ke banyak titik SPPG di berbagai provinsi, termasuk daerah terpencil, memerlukan pengaturan logistik yang baik: penyimpanan, bahan baku lokal, tenaga pendukung, dan kontrol kualitas.

Anggaran dan keberlanjutan: Anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Estimasi pemerintah menyebutkan bahwa program ini ditargetkan menjangkau 19,47 juta orang dengan anggaran sekitar Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan bahwa dana itu tersedia, digunakan secara efisien, dan dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Evaluasi dan pemantauan: CoE dan MoU dengan Badan Gizi Nasional menetapkan bahwa harus ada sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Namun, bagaimana data di lapangan dikumpulkan, diverifikasi, dan digunakan untuk perbaikan masih dalam tahap pengembangan. Komitmen multisektoral dan kolaborasi lokal: Implementasi memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, sekolah, komite sekolah, penyedia makanan lokal, tenaga kesehatan sekolah, dan masyarakat. Sinergi ini bisa menjadi tantangan karena variasi kapasitas antar daerah.

Program MBG diharapkan memiliki dampak yang luas dan memiliki efek positif jangka panjang:

- Peningkatan status gizi siswa, sehingga meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi absensi, meningkatkan fokus belajar, dan hasil akademik.
- Pengurangan beban ekonomi bagi orang tua, terutama keluarga kurang mampu, karena tidak perlu menyediakan bekal setiap hari.

- Pembentukan kebiasaan makan sehat dan karakter yang baik: kebersihan, etika makan, rasa syukur, disiplin, dan menghindari pemborosan makanan.
- Efek multiplier: Pengadaan makanan bisa melibatkan UMKM lokal, penyedia bahan baku lokal, dan memperkuat industri pangan lokal. Juga membuka peluang penelitian dan inovasi (melalui CoE) untuk menciptakan menu bergizi yang adaptif secara lokal.

Penyempurnaan regulasi dan sistem pemantauan agar keamanan pangan, keadilan distribusi, kualitas makanan, dan penggunaan anggaran dapat terjaga. Dalam jangka menengah dan panjang, program ini bisa menjadi pilar dalam kebijakan pembangunan SDM unggul di Indonesia, membantu pemerintah mencapai target-target kesehatan dan pendidikan seperti yang tercantum dalam visi Indonesia Emas 2045.

Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah strategis dan signifikan dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Sejak peluncuran pada awal 2025, program ini telah menunjukkan kemajuan nyata: jaringan titik layanan semakin meluas, jumlah penerima manfaat terus bertambah, dan regulasi serta kerangka pendukung mulai dibentuk dengan lebih matang melalui Center of Excellence dan pedoman pelaksanaan. Namun agar manfaatnya maksimal, dibutuhkan perhatian khusus terhadap keamanan pangan, distribusi logistik, sosialisasi dan pelatihan bagi pelaksana di lapangan, serta jaminan keberlanjutan dana. Komitmen multisektoral antara Kemendikdasmen, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dunia kesehatan, dan masyarakat sangatlah penting. Dengan pengelolaan yang baik dan evaluasi yang terus menerus, MBG memiliki potensi besar menjadi salah satu kebijakan unggulan dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter.

Penerapan Kurikulum Nasional

Kurikulum merupakan jantung dari proses pendidikan. Ia menentukan arah, tujuan, isi, serta strategi pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya, hingga tantangan global yang terus berubah. Oleh karena itu, setiap periode pemerintahan selalu diwarnai dengan perubahan kurikulum sebagai upaya menjawab kebutuhan zaman. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga 2025, tercatat lebih dari sepuluh kali perubahan kurikulum. Setiap perubahan membawa filosofi, pendekatan, dan strategi pembelajaran yang berbeda, meskipun memiliki satu benang merah: membentuk generasi Indonesia yang berkarakter, cerdas, serta mampu menghadapi perubahan global.

Kurikulum adalah instrumen penting dalam pendidikan, yang menentukan arah pembelajaran, kompetensi yang diharapkan, serta cara membentuk generasi penerus bangsa. Seiring perkembangan zaman dan tantangan global, kurikulum di Indonesia selalu mengalami perubahan. Sejak tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi memperkenalkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang lebih fleksibel, sederhana, dan berorientasi pada pembelajaran berbasis kompetensi. Berdasarkan SK badan standar Kuriulum dan asesmen pendidikan Kemedikbdrstek nomor 26/H/KR/2024 tentang satuan pendidikan pelaksanaan mplementasi Kurikulum Merdeka untuk provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 2.122 satuan

pendidikan yang telah melaksanakan IKM, atau sebesar 99,25% satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hingga 2025, kurikulum ini menjadi pedoman utama dalam proses pendidikan formal di sekolah-sekolah Indonesia.

Tabel 19 Jumlah Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka.

Kab/Kota	KB	TPA	SPS	PAUD	TK	PKBM	SD	SMP	SMA	SKB	SLB	SMK	Jumlah
Bangka	78	11	5	0	74	7	184	50	19	1	2	12	443
Babar	110	4	6	1	44	4	137	38	9	1	1	9	364
Bateng	53	10	28	0	69	9	101	29	10	1	2	5	317
Basel	21	2	1	0	59	9	96	39	13	1	1	7	249
Belitung	39	5	0	1	42	7	121	29	8	1	1	8	262
Beltim	58	1	3	0	29	4	104	22	5	1	1	8	236
P.Pinang	12	9	13	0	64	8	92	29	11	1	2	10	251
Jumlah	371	42	56	2	381	48	835	236	75	7	10	59	2122

Kurikulum Merdeka lahir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan pendidikan sebelumnya, khususnya kelemahan Kurikulum 2013 yang dianggap terlalu kompleks, administratif, dan tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Pandemi COVID-19 juga mempercepat kebutuhan akan kurikulum yang lebih adaptif terhadap teknologi digital, fleksibilitas pembelajaran, serta penekanan pada esensi belajar yang bermakna bagi siswa. Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka pada tahun 2024 BPMP Bangka Belitung telah melaksanakan beberapa kegiatan yakni sosialisasi pendaftaran IKM melalui berbagai media sosial, festival kurikulum merdeka, survei persepsi tentang IKM, advokasi implementasi kurikulum merdeka, visitasi IKM, refleksi komuniats belajar, pemantauan progress repot IKM dan pemantauan tindak lanjut pengimbasan advokasi IKM.

Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan ruang kebebasan (agency) bagi sekolah, guru, dan siswa dalam mengelola pembelajaran. Ada beberapa karakteristik utama: Struktur kurikulum dibuat lebih ringkas dibanding Kurikulum 2013, sehingga guru dan siswa tidak terbebani dengan terlalu banyak konten. Fokus utama diarahkan pada kompetensi literasi, numerasi, serta penguatan karakter; Sekolah diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal, kebutuhan siswa, dan kondisi sumber daya; Pembelajaran Berbasis Projek – Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi ciri khas kurikulum ini. Melalui projek, siswa belajar secara kolaboratif, kontekstual, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata; Guru diharapkan mampu menyesuaikan metode dengan kemampuan, minat, dan bakat masing-masing siswa; Tujuan akhir kurikulum ini adalah membentuk siswa dengan enam dimensi utama: beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Hingga tahun 2025, mayoritas sekolah di kota besar sudah beralih ke Kurikulum Merdeka, sementara sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih dalam tahap adaptasi. Pemerintah mendukung transisi ini melalui platform Merdeka Mengajar diantaranya dengan penyediaan modul ajar di PMM bisa diakses gratis secara digital. guru melakukan pelatihan mandiri di platform merdeka mengajar (PMM). Berdasarkan pemantaan dasbord PMM 28 November 2024 capaian progres belajar guru di PMM dengan kategori cukup baik sebesar

84,75% dan pemanfaatan perangkat ajar seperti modul ajar dengan capaian baik sebesar 60,91%. Pemberdayaan komunitas belajar juga membantu guru lebih mudah dalam memahami Kurikulum Merdeka, berdasarkan dasbord Komunitas Belajar per 28 November tahun 2024 100% pendidik sudah memiliki komunitas belajar, 81,88% pendidik yang memiliki komunitas belajar telah memiliki jadwal secara rutin untuk belajar bersama. 59,38% komunitas belajar telah berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik, dan 59,17% sudah berfokus pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam memahami Kurikulum Merdeka.

Pada tahun 2025 ini untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka platform merdeka mengajar sudah diintegrasikan ke dalam Rumah Pendidikan sehingga masih bisa membantu guru belajar tentang Kurikulum Merdeka. Dalam praktiknya, kelas-kelas dengan Kurikulum Merdeka tidak lagi terlalu terikat pada “penyelesaian materi”, melainkan pada pencapaian kompetensi. Misalnya, siswa SD tidak hanya menghafal teori tentang lingkungan hidup, tetapi membuat proyek nyata seperti menanam pohon, mengolah sampah, atau kampanye kebersihan. Di SMP dan SMA, siswa dapat memilih mata pelajaran sesuai minat (terutama di fase E dan F), sehingga jalur belajar menjadi lebih personal.

Meskipun membawa angin segar, penerapan Kurikulum Merdeka menghadapi berbagai tantangan: Kesiapan Guru – Tidak semua guru siap mengubah pola pikir dari pembelajaran berpusat pada guru (*teacher-centered*) ke pembelajaran berpusat pada siswa (*student-centered*). Banyak guru yang masih terbiasa dengan metode ceramah dan menilai hasil berdasarkan ujian tertulis; Kesenjangan Akses Teknologi – Kurikulum Merdeka menuntut penggunaan platform digital seperti Merdeka Mengajar. Namun, di daerah terpencil, akses internet masih terbatas sehingga menghambat implementasi; Sumber Daya Sekolah – Proyek P5 membutuhkan fasilitas, bahan, dan dukungan komunitas. Sekolah dengan keterbatasan dana sering kesulitan menjalankannya dengan optimal; Beban Administrasi – Walaupun lebih sederhana dibanding K-13, sebagian guru masih merasa terbebani dengan tuntutan penyusunan modul ajar dan laporan proyek; Kesenjangan Antar Daerah – Implementasi Kurikulum Merdeka lebih cepat di sekolah unggulan, sedangkan sekolah di desa atau daerah 3T tertinggal karena keterbatasan SDM dan sarana.

Meskipun masih dalam tahap transisi, beberapa hasil awal dari penerapan Kurikulum Merdeka sudah terlihat: Pembelajaran Lebih Menyenangkan: siswa merasa lebih bebas berekspresi melalui proyek, seni, diskusi, dan kegiatan lapangan; Peningkatan Karakter Sosial: banyak sekolah melaporkan siswa menjadi lebih kolaboratif dan peduli lingkungan setelah menjalankan proyek P5; Kreativitas Guru Meningkat: guru yang aktif memanfaatkan Merdeka Mengajar dan komunitas belajar bisa mengembangkan metode inovatif; Pemerataan Akses Modul Ajar: melalui platform digital, sekolah terpencil pun bisa mengakses bahan ajar yang sama dengan sekolah di kota besar.

Namun, keberhasilan ini masih belum merata. Ada sekolah yang berhasil melaksanakan dengan baik, tetapi ada pula yang masih berjuang dalam tahap adaptasi.

Kurikulum Merdeka diharapkan tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi terus dikembangkan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan: Pelatihan Guru

Berkelanjutan agar semua pendidik memahami filosofi dan metode baru; Dukungan Infrastruktur terutama di daerah 3T, agar tidak terjadi ketimpangan antar sekolah; Evaluasi Berbasis Dampak dengan menilai bukan hanya hasil ujian, tetapi juga keterampilan hidup, karakter, dan kreativitas siswa; Stabilitas Kebijakan agar kurikulum tidak selalu berubah setiap pergantian menteri. Jika dikelola dengan konsisten, Kurikulum Merdeka dapat menjadi fondasi bagi generasi emas 2045: generasi yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga berkarakter, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Perubahan kurikulum ke depan diharapkan lebih stabil, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata siswa. Kurikulum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi tetap menekankan nilai karakter, budaya, dan identitas bangsa. Kolaborasi antara pemerintah, guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi. Visi besar Indonesia 2045 menuntut kurikulum yang mampu mencetak generasi emas: sehat, cerdas, kreatif, berdaya saing global, dan berkarakter Pancasila.

Sejarah panjang kurikulum pendidikan di Indonesia mencerminkan dinamika bangsa. Dari kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka, setiap perubahan adalah cermin usaha pemerintah merespons tantangan zaman. Meski penuh kendala, perubahan kurikulum telah membawa pendidikan Indonesia menuju arah yang lebih baik: dari sekadar mengejar isi pelajaran menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Kurikulum masa depan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus benar-benar hidup di ruang kelas, membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat dan warga negara yang berdaya saing serta berkarakter.

Penjaminan Mutu Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan global. Namun, pendidikan tidak hanya berbicara mengenai akses, tetapi juga menyangkut mutu. Dalam konteks inilah, penjaminan mutu pendidikan menjadi isu penting yang senantiasa mendapat perhatian pemerintah Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), negara telah menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pengendalian mutu pendidikan secara nasional agar setiap satuan pendidikan memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP sendiri mencakup delapan aspek penting, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Penerapan SNP diharapkan mampu memberikan acuan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh sekolah di Indonesia. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua sekolah mampu mencapai standar tersebut. Terdapat kesenjangan kualitas antara sekolah di perkotaan dengan sekolah di daerah tertinggal,

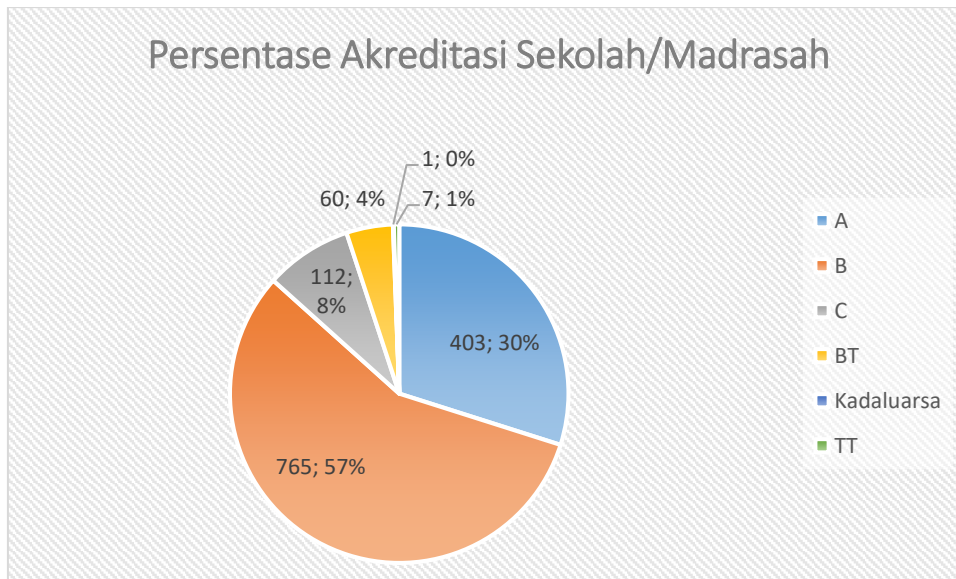
terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, perbedaan ketersediaan guru, fasilitas belajar, serta dukungan pembiayaan pendidikan juga menjadi faktor yang memengaruhi mutu pendidikan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah kemudian merumuskan sistem penjaminan mutu pendidikan yang bersifat menyeluruh. Melalui Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, ditetapkan mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh lembaga independen seperti Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). SPMI menekankan siklus perbaikan mutu yang berkelanjutan, sementara SPME bertujuan untuk memberikan evaluasi eksternal dan pengakuan formal terhadap capaian mutu sekolah.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan instrumen akreditasi, tetapi juga mengembangkan pendekatan berbasis data. Kehadiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Asesmen Nasional (AN), serta Rapor Pendidikan sejak tahun 2022 menjadi tonggak baru dalam pemetaan mutu pendidikan. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai capaian literasi, numerasi, karakter siswa, serta kualitas lingkungan belajar di sekolah. Namun demikian, implementasi penjaminan mutu pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masih terdapat kesenjangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta, serta antarwilayah di Indonesia. Kedua, sebagian sekolah masih menganggap penjaminan mutu sebatas pada kelengkapan administrasi, bukan sebagai upaya nyata meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketiga, transformasi digital yang menjadi bagian penting dalam penjaminan mutu belum sepenuhnya dapat diakses oleh sekolah-sekolah di daerah terpencil karena keterbatasan infrastruktur.

Sejak diluncurkan, Rapor Pendidikan Indonesia menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi mutu pendidikan secara komprehensif. Rapor Pendidikan mengintegrasikan hasil Asesmen Nasional (AN), survei lingkungan belajar, dan data pendidikan lainnya. Dataset Rapor Pendidikan 2024 memuat indikator seperti hasil belajar murid, proses pembelajaran, pemerataan layanan pendidikan, kualitas sumber daya manusia, serta aspek manajemen sekolah. Publikasi resmi menyebut bahwa Rapor Pendidikan 2024 telah dirilis dan dapat diakses publik untuk seluruh jenjang dan wilayah. Dalam catatan lembaga swadaya masyarakat, Rapor Pendidikan 2025 menunjukkan bahwa secara rata-rata, > 68,24 % siswa memenuhi kompetensi minimum literasi dan \approx 66,34 % memenuhi kompetensi minimum numerasi — menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Data-data ini menjadi acuan nyata bahwa penjaminan mutu pendidikan tidak bisa hanya teoritik: harus berbasis data yang real dan transparan.

Akreditasi adalah salah satu mekanisme eksternal dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Dengan akreditasi, sekolah dan madrasah dievaluasi oleh lembaga independen terhadap standar mutu nasional yang telah ditetapkan. Menurut data BAN-PDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berikut data akreditasi sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 19 Persentase Akreditasi Sekolah/Madrasah (Sumber BAN PDM Bangka Belitung Juni 2025)

Sebesar 57% sekolah/madrasah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki akreditasi B, hanya 30% atau 403 sekolah/madrasah yang memiliki akreditasi A, masih 8% atau 112 sekolah/madrasah yang berakreditasi C sedangkan sisanya belum terakreditasi, kadaluarsa dan tidak terakreditasi. Sebaran akreditasi sekolah/madrasah berdasarkan wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut.

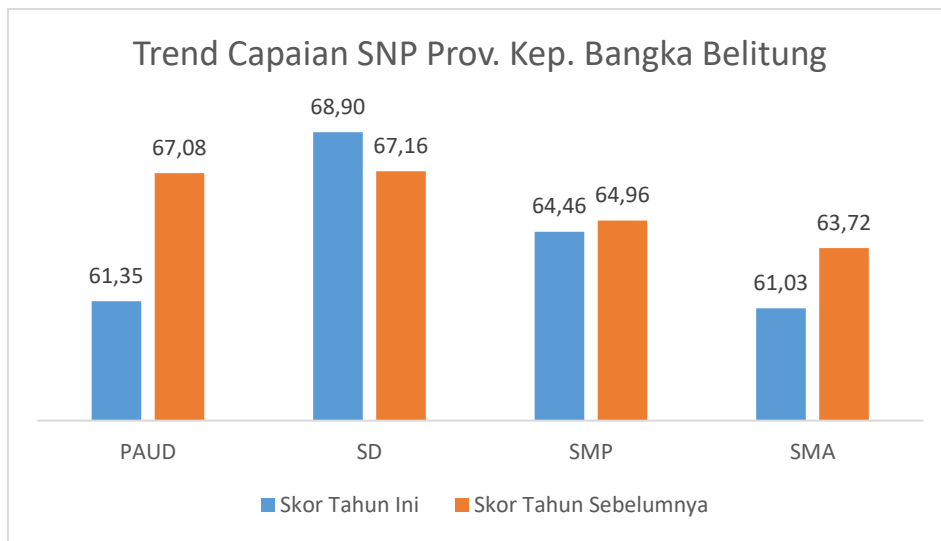
Tabel 20 Data Akreditasi per Kabupaten/Kota (sumber : BAN PDM Bangka Belitung)

Kabupaten/Kota	A	B	C	BT	Kadaluarsa	TT	Grand Total
KAB. BANGKA	134	138	19	11		2	304
KAB. BANGKA BARAT	48	131	31	8			218
KAB. BANGKA SELATAN	53	88	24	8			173
KAB. BANGKA TENGAH	52	85	15	15		1	168
KAB. BELITUNG	29	132	11	3		1	176
KAB. BELITUNG TIMUR	24	114	6	1			145
KOTA PANGKALPINANG	63	77	6	14	1	3	164
Grand Total	403	765	112	60	1	7	1348

Data akreditasi sekolah dasar/madrasah juga tersedia melalui BAN-PDM, lembaga akreditasi tunggal baru yang menggantikan BAN-S/M untuk jenjang PAUD, dasar, dan menengah. Data akreditasi ini menggambarkan status mutu sekolah formal dari aspek evaluasi independen. Meskipun bukan tolok ukur sempurna, akreditasi tetap penting sebagai salah satu pilar penjaminan mutu.

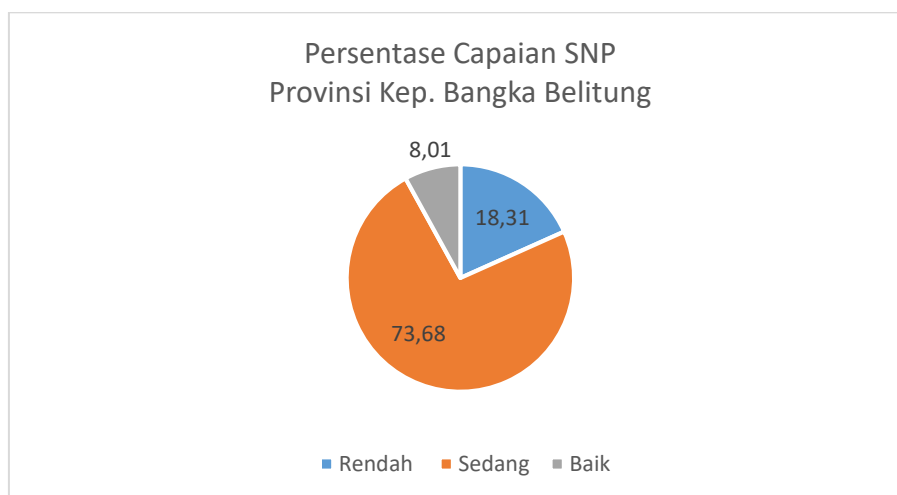
Untuk memperkuat kerangka penjaminan mutu, regulasi dan instrumen evaluasi sistem pendidikan telah diperkuat dalam beberapa tahun terakhir: Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan menetapkan bahwa evaluasi sistem pendidikan pusat dilakukan melalui: (a) asesmen nasional, (b) analisis data satuan pendidikan, (c) evaluasi komprehensif, dan (d) evaluasi berkala dan berkelanjutan. Dengan regulasi tersebut, Indonesia menegaskan bahwa evaluasi mutu pendidikan harus tidak hanya sporadis tetapi

terstruktur dan berkelanjutan, serta meminimalkan beban administratif pada sekolah. Regulasi ini menjadi dasar yuridis kuat bahwa penjaminan mutu bukan kegiatan tambahan, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.



Gambar 20 Skor Capaian SNP Bangka Belitung

Gambar 23 di atas menunjukkan bahwa dari semua jenjang hanya skor capaian SNP SD yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,75. Sedangkan untuk jenjang lainnya mengalami penurunan. Penurunan yang terbesar dialami oleh jenjang PAUD yaitu sebesar 5,73, diikuti selanjutnya jenjang SMA sebesar 2,70% dan jenjang SMP sebesar 0,50%.

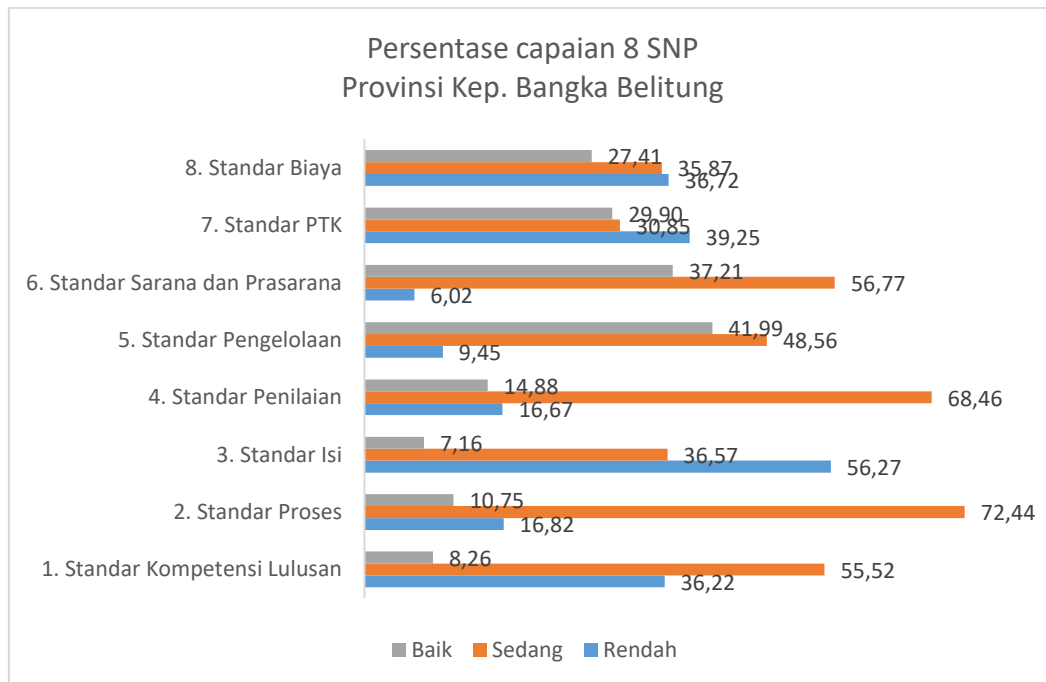


Gambar 21 Persentase Capaian SNP

Gambar 24 di atas menunjukkan 3 (tiga) capaian SNP untuk seluruh jenjang (PAUD, SD, SMP, dan SMA) di Provinsi Bangka Belitung; dimana capaian SNP dengan kategori **Baik** diwakili warna abu-abu, kategori **Sedang** diwakili warna jingga, dan kategori **Rendah** diwakili warna **Biru**. Diagram menunjukkan bahwa capaian SNP paling banyak berada pada kategori sedang yaitu sebesar 73,68 %, hanya 8,01% yang kategorinya baik, bahkan masih ada 18,31% yang kategorinya rendah. Berarti total masih ada 91,99% satuan Pendidikan (kategori sedang dan

rendah) yang perlu diintervensi oleh BPMP Kep. Bangka Belitung agar satuan Pendidikan dapat mencapai SNP dengan kategori baik.

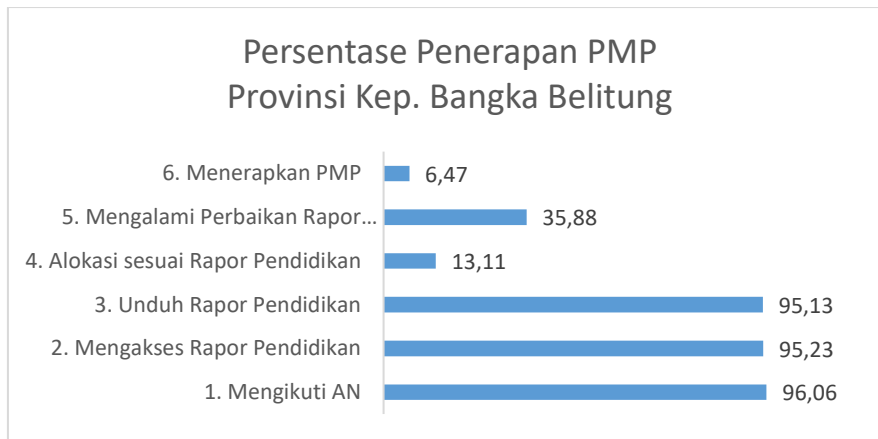
Lebih detailnya grafik berikut menggambarkan capaian SNP untuk 8 standar (SKL, Standar Proses, Standar Isi, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar PTK, dan Standar Pembiayaan), untuk keseluruhan jenjang (PAUD, SD, SMP, SMA) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 22 Persentase Capaian 8 SNP

Gambar dalam bentuk Diagram Batang di atas menunjukkan bahwa dari 8 (delapan) SNP, diketahui 3 SNP yang memperoleh capaian tertinggi untuk kategori **Baik** tertinggi yakni Standar Pengelolaan (41,99%); Standar Sarpras (37,21%); dan Standar PTK (29,90%). Sedangkan 3 SNP yang memperoleh capaian tertinggi untuk kategori **Sedang** adalah; Standar Proses (72,44%); Standar Penilaian (68,46%); dan Standar Sarpras (56,77%). Selanjutnya 3 SNP yang perlu mendapat perhatian dan intervensi karena memperoleh capaian tertinggi untuk kategori **Rendah** adalah; Standar Isi (56,27%); Standar PTK (39,25%); dan Standar Kompetensi Lulusan (36,22%).

Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) perlu dilakukan oleh satuan Pendidikan agar layanan pendidikan berkualitas. Satuan Pendidikan dinyatakan menerapkan PMP jika mengikuti AN, mengakses rapor Pendidikan, mengunduh rapor Pendidikan, mengalokasikan anggaran sesuai rapor Pendidikan dan mengalami delta positif.



Gambar 23 Persentase Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan

Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk satuan pendidikan yang mengikuti AN, akses rapor Pendidikan dan unduh rapor Pendidikan belum 100% perlu upaya lagi dari BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Dinas Pendidikan agar semua satuan pendidikan dapat mengakses dan mengunduh rapor Pendidikannya. Sedangkan untuk alokasi anggaran sesuai rapor Pendidikan persentasenya hanya 13,11% padahal satuan Pendidikan yang mengalami delta positif sudah mencapai 35,88%. Terdapat selisih 22,77% satuan Pendidikan yang mengalami delta positif namun belum mengalokasikan anggarannya sesuai rapor Pendidikan. Hal ini tentunya perlu pendampingan dari BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung agar satuan Pendidikan dapat mengalokasikan anggarannya dalam RKAS 2026 sesuai dengan capaian indikator rapor Pendidikan, sehingga persentase penerapan PMP dapat meningkat.

Data Rapor Pendidikan dan Asesmen Nasional memberikan gambaran nyata tentang pencapaian kompetensi siswa, kondisi proses pembelajaran, dan distribusi kualitas antarwilayah. Data akreditasi menunjukkan sejauh mana sekolah formal diukur terhadap standar nasional. Sementara regulasi yang diperkuat mempertegas kewajiban evaluasi sistemik dan berkelanjutan. Dengan landasan data semacam itu, latar belakang penjaminan mutu pendidikan menjadi lebih konkret: tidak hanya berbicara idealisme, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata berdasarkan bukti empiris. Dalam narasi latar belakang, kehadiran data semacam ini memperkuat argumen bahwa penjaminan mutu pendidikan tidak bisa ditunda lagi karena esensial dan mendesak.

Dalam konteks visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju, penjaminan mutu pendidikan menjadi fondasi yang sangat penting. Mutu pendidikan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, keberadaan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa pendidikan nasional benar-benar mampu melahirkan generasi emas yang berkualitas.

Pembiayaan Pendidikan

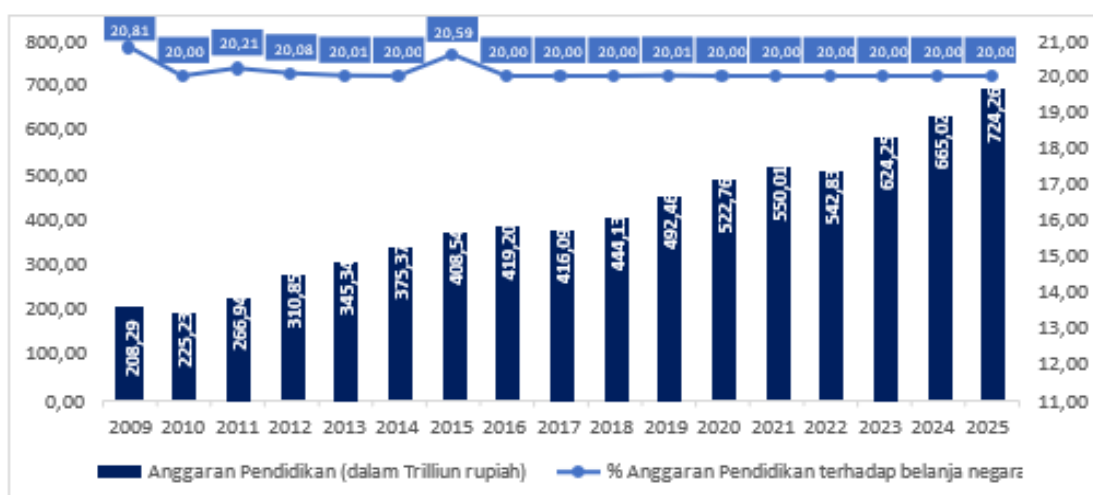
Dalam memastikan pendidikan bermutu bagi semua, pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (1)). Untuk itu, perlu ada upaya bersama untuk memastikan kecukupan pembiayaan, terutama dalam rangka mencapai layanan pendidikan dengan mutu terbaik.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya pengaturan Anggaran Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Untuk itu, sejak tahun 2009, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan 20% (dua puluh persen) dari APBN untuk pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemenuhan 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendidikan pada APBN, secara nominal, menunjukkan angka Anggaran Pendidikan yang terus meningkat. Anggaran pendidikan pada tahun 2009 yang sebesar Rp208,3 triliun (dua ratus delapan koma tiga triliun rupiah), meningkat menjadi Rp724,3 triliun (tujuh ratus dua puluh empat koma tiga triliun rupiah) pada tahun 2025.

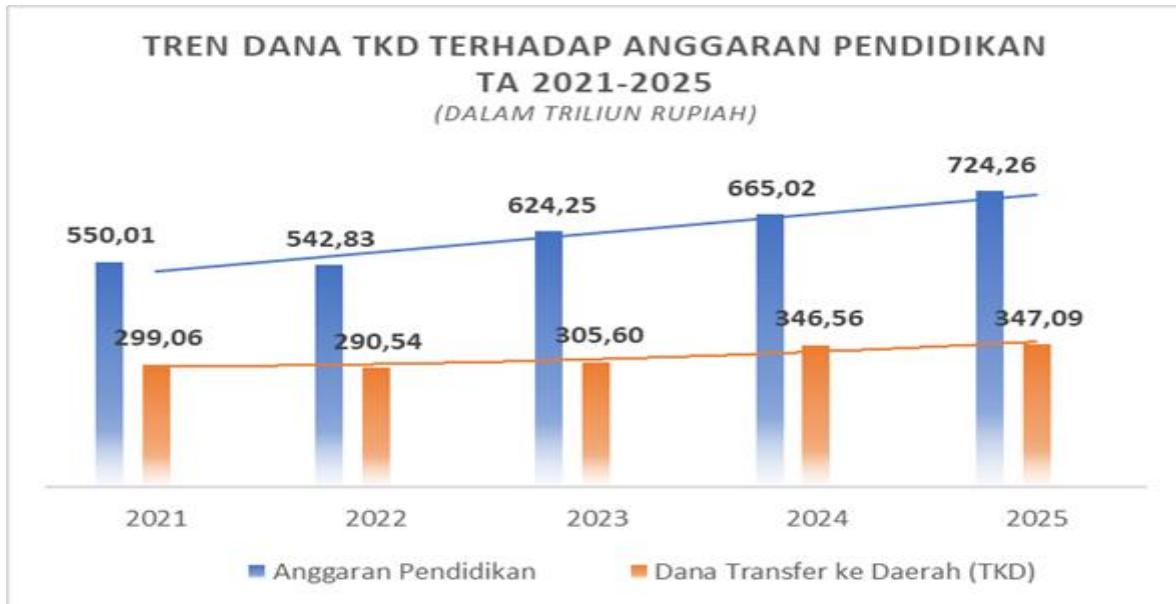
Komitmen pemenuhan Anggaran Pendidikan pada APBN masih tetap dijaga sampai saat ini dalam proses penganggaran tahunan. Namun demikian, perhatian yang lebih besar perlu diberikan untuk memastikan bahwa pemenuhan Anggaran Pendidikan tersebut diikuti dengan upaya memastikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dan pelaksanaannya. Pemenuhan Anggaran Pendidikan sebesar minimal 20% (dua puluh persen) dari APBN masih ditengarai belum secara efektif membiayai kegiatan-kegiatan yang berimplikasi langsung dalam peningkatan layanan pendidikan di Indonesia.



Gambar 24 Tren Anggaran Pendidikan (Triliun Rupiah) terhadap Belanja Negara (Sumber : Perpres Rincian APBN, 2009-2025)

Dana Transfer ke Daerah

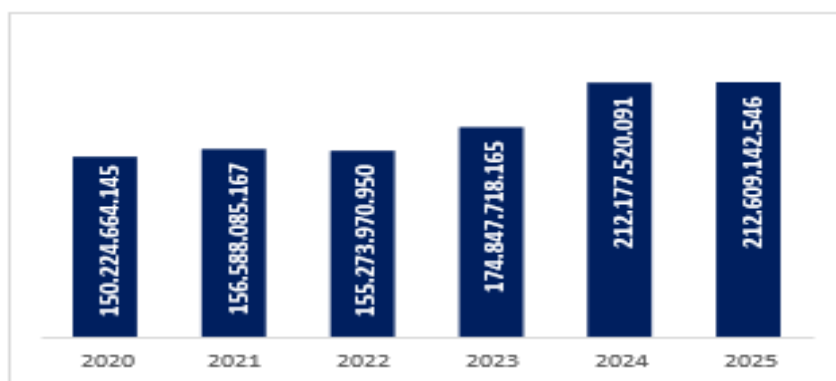
Sebagai bagian dari Anggaran Pendidikan 20% (dua puluh persen) dari APBN, Pemerintah mengalokasikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan.



Gambar 25 Tren Dana TKD terhadap Anggaran Pendidikan TA 2021-2025 (dalam triliun rupiah)
 Sumber: Perpres Rincian APBN, 2021-2025

TKD menjadi bagian anggaran terbesar dalam Anggaran Pendidikan, pada tahun 2021-2025 berada pada kisaran 48 (empat puluh delapan)-54 (lima puluh empat) persen dari total Anggaran Pendidikan. TKD dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagian merupakan urusan provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan, dengan porsi anggaran yang besar pada TKD, urusan pendidikan dasar dan menengah dapat didorong pelaksanaannya menjadi lebih berkualitas dan merata.

Alokasi DAU yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan alokasi DAU pada Gambar 38. Dengan pengalokasian DAU tersebut diharapkan dapat terjadi pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan terdiri dari DAU Block Grant dan DAU Specific Grant. Earmark DAU untuk pendidikan yaitu DAU Specific Grant Bidang Pendidikan mulai diterapkan kebijakannya pada tahun 2023, dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari DAU Specific Grant Bidang Pendidikan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap daerah mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pendidikan, sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 32 tahun 2022 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2021.



Gambar 26 Alokasi DTU yang Diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan Sumber: Perpres Rincian APBN, 2020-2025

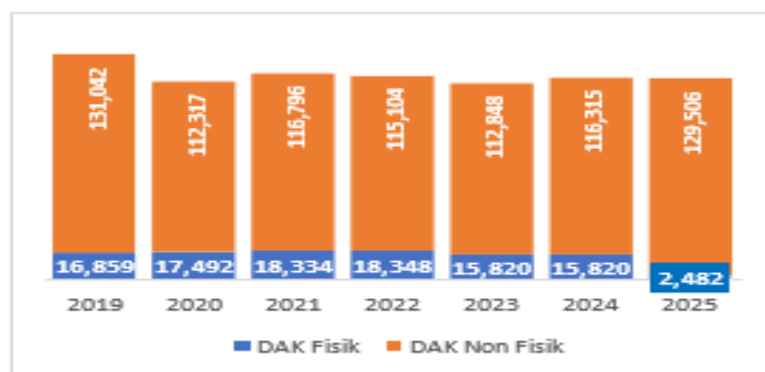
Kementerian yang menangani pendidikan, yaitu Kemendikbudristek telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong daerah dalam memanfaatkan DAU pada Anggaran Pendidikan agar sebesar-besarnya digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dilakukan bersama Kemendagri antara lain dengan penajaman berbagai subkegiatan pada Kepmendagri 900-1317 agar lebih mendukung indikator prioritas SPM Pendidikan, yang selanjutnya sebagai daftar subkegiatan yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pemenuhan SPM Pendidikan serta mendukung pencapaian target-target pendidikan nasional.

Bagian yang juga penting pada TKD dalam Anggaran Pendidikan yaitu DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Dalam mendukung berbagai prioritas nasional pendidikan, telah dilakukan reformulasi kebijakan baik pada DAK Fisik maupun DAK Nonfisik Bidang Pendidikan, selain mengupayakan keberpihakan anggaran, agar kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan bersesuaian dengan program prioritas nasional dapat terbiayai secara memadai.

Alokasi DAK Fisik yang relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan di daerah, telah mendorong dilakukannya reformulasi kebijakan DAK Bidang Pendidikan, antara lain dengan penentuan target berdasarkan lokus prioritas, serta jenis intervensi yang tepat dan selektif, sehingga dapat memaksimalkan nilai manfaat dari anggaran yang ada. Sejak tahun 2022, pengalokasian DAK Fisik Pendidikan menerapkan “konsep ketuntasan”. Konsep ini menekankan pada pemenuhan sarana dan prasarana di satuan pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh atau “tuntas” sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana pada setiap satuan pendidikan. Dengan konsep ini diharapkan sarana dan prasarana di satuan pendidikan memenuhi standar untuk mendukung proses pembelajaran yang baik dan berkualitas.

Sejak penetapan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi instrumen kuat untuk dapat berkontribusi pada perluasan akses layanan pendidikan dengan adanya intervensi untuk penambahan daya tampung melalui penyediaan unit satuan pendidikan baru, dan ruang kelas baru pada daerah sesuai kriteria. DAK Fisik Bidang Pendidikan juga menjadi pendorong untuk peningkatan

kualitas pembelajaran dengan penyediaan prasarana dan sarana pembelajaran, serta dukungan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi.



Gambar 27 Anggaran Pendidikan Dana Transfer Khusus Tahun 2019-2025 (Triliun Rupiah)
Sumber: Perpres Rincian APBN, 2019-2025

Sementara itu, DAK Nonfisik Bidang Pendidikan menjadi salah satu tumpuan utama dalam pendidikan, terutama dalam mendukung keterjangkauan layanan penyelenggaraan pendidikan. DAK Nonfisik terdiri dari: (a) Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD/Kesetaraan; dan (b) aneka tunjangan bagi guru ASN Daerah, mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG), Dana Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) yang mengajar di daerah khusus.

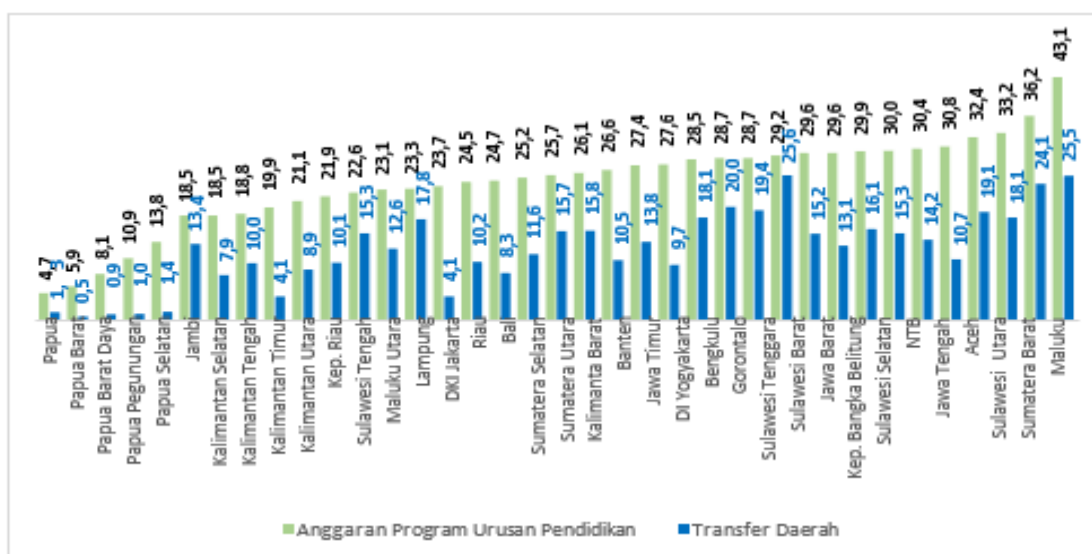
Untuk memastikan efektivitas pembiayaan DAK Non Fisik, Pemerintah terus melakukan transformasi kebijakan program antara lain pada Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan agar lebih berkeadilan dan berpihak pada satuan pendidikan. Untuk itu, mulai tahun 2020, pemerintah melakukan penyaluran BOSP langsung ke satuan pendidikan. Hal ini mampu mengurangi keterlambatan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dibandingkan penyaluran di tahun 2019 dan dianggap memberikan kemudahan kepada sekolah. Secara berkelanjutan Kementerian melakukan peningkatan kualitas baik secara data maupun pengelolaan.

Pada tahun 2021, Pemerintah mulai memberlakukan nilai satuan biaya yang bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan biaya berbeda antar daerah, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. Pemberlakuan nilai satuan biaya ini berdasarkan kajian Indeks Biaya Pendidikan (IBP) per kabupaten/kota yang dilakukan oleh BSKAP. Pemberlakuan nilai satuan biaya majemuk pada tahun 2021 baru menjangkau jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, sementara itu, penerapan satuan biaya majemuk untuk BOP PAUD dan BOP Kesetaraan mulai dilakukan pada tahun 2022.

Upaya terobosan yang telah dilakukan lainnya untuk memastikan DAK Nonfisik bisa lebih optimal pemanfaatannya, yaitu bahwa pada tahun 2025 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru, yang semula disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menjadi salur langsung dari RKUN ke rekening guru penerima tunjangan.

Anggaran Pendidikan Daerah

Pemenuhan anggaran sebesar 20% (dua puluh persen) juga perlu dipenuhi oleh daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemenuhan anggaran untuk program urusan pendidikan pada APBD berasal dari berbagai sumber, baik dari pendapatan asli daerah, maupun Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk Anggaran Pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta pada daerah tertentu juga berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus). Untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan layanan pendidikan di daerah, perlu adanya komitmen tinggi daerah dalam mengalokasikan anggaran non-Dana TKD dari APBN untuk pemenuhan pendidikan. Hal ini diperlukan agar ada keberpihakan anggaran cukup tinggi untuk penyelenggaraan pendidikan di daerah.



Gambar 28 Anggaran Program Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan) Tahun 2023 (dalam Persen)
Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2023

Alokasi anggaran program urusan pendidikan pada APBD sangat bervariasi di setiap provinsi. Gambar 40 menunjukkan data tahun 2023, yang mana terdapat 9 (sembilan) provinsi yang belum mengalokasikan anggaran program urusan pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) pada APBD. Pada tahun 2022, hanya terdapat 3 (tiga) provinsi yang belum mengalokasikan anggaran program urusan pendidikan 20% (dua puluh persen) APBD.

Komitmen perlu ditingkatkan untuk pemenuhan Anggaran Pendidikan, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran. Upaya ini bertujuan agar dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Komitmen pemenuhan SPM Bidang pendidikan sangat perlu didukung oleh pengalokasian anggaran pendidikan di daerah yang akan membiayai upaya daerah dalam peningkatan indeks SPM Pendidikan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2021 pasal 29 ayat (2)

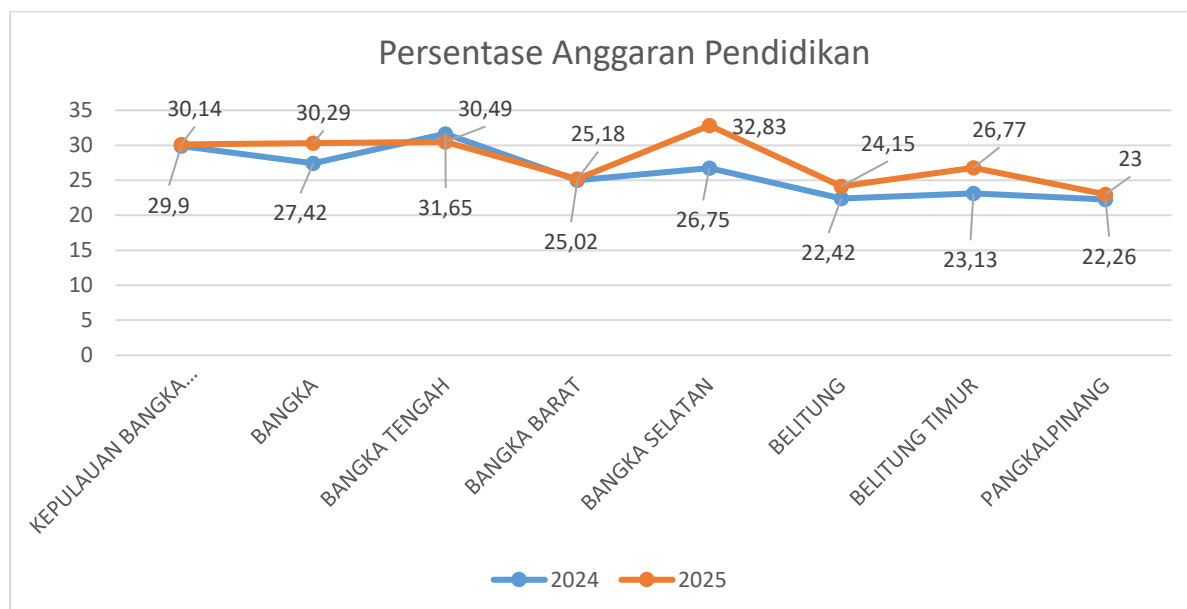
dan (3) bahwa Pendanaan Penerapan SPM di daerah provinsi/kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan delapan indikator prioritas untuk provinsi dan kabupaten/kota pada Rapor Pendidikan sebagai dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Indikator ini mencakup aspek seperti Angka Partisipasi Sekolah, Kompetensi Literasi, Kompetensi Numerasi, hingga Iklim Keamanan dan Inklusivitas. Delapan indikator prioritas provinsi adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Tingkat Penyerapan Lulusan SMK; (5) Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas.

Delapan indikator prioritas kabupaten/kota adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas.

Provinsi kepulauan Bangka Belitung dan seluruh kabupaten/kota pada APBD tahun 2024 dan 2025 sudah mengalokasikan anggaran program urusan pendidikan di atas 20 % dan secara umum terdapat kenaikan anggaran pendidikan pada tahun 2025 dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun 2024 pada APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Berikut data persentase anggaran pendidikan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2024 dan 2025:



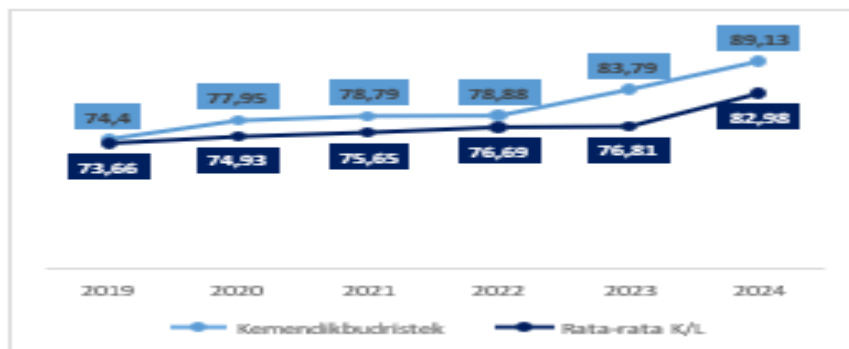
Gambar 29 Persentase Anggaran Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gubernur dan Bupati/Walikota mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam hal penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM. Selanjutnya diharapkan tim penerapan

SPM bidang pendidikan dapat mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD provinsi dan kabupaten/kota.

1.1.6 Tata Kelola

Tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif adalah komponen yang sangat penting untuk keberhasilan pembangunan nasional. Pada tahun 2024, indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek sebesar 89,13 (delapan puluh sembilan koma tiga belas) dengan predikat A atau “memuaskan”, yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek dapat memimpin perubahan untuk mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata indeks reformasi birokrasi K/L, yaitu sebesar 82,98 (delapan puluh dua koma sembilan puluh delapan).



Gambar 30 Indeks Reformasi Birokrasi Sumber: KemenPAN-RB, 2019-2024

Kemendikbudristek terus berupaya dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dengan terus meningkatkan indikator-indikator penilaian yang ada. Dan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024 telah mendapatkan satuan kerja berpredikat ZI WBK. Pembangunan zona integritas berkelanjutan merupakan salah satu upaya BPMP Kepulauan Bangka Belitung, untuk mendukung indeks reformasi birokrasi Kemendikdasmen. Pada kurun waktu 2025-2029 BPMP Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk peningkatan kualitas layanan publik, serta tetap menguatkan pembangunan integritas yang sudah dijalankan dengan penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko, penerapan *Whistleblowing System* (WBS) yang efektif dan terlindungi, gerakan anti gratifikasi, anti korupsi serta penegakan disiplin dan kode etik pegawai secara konsisten. Fokus utama dalam layanan publik dengan melaksanakan layanan prima (akurat, cepat, dan mudah diakses) yang berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan (Dinas Pendidikan dan Sekolah). Fokus pelayanan prima dengan digitalisasi dan integrasi layanan (melalui SPBE) untuk mewujudkan pelayanan yang Bersih dan Melayani. Kemudian peningkatan kompetensi SDM BPMP dalam advokasi, pendampingan, dan analisis data mutu pendidikan. Serta secara berkala melakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan BPMP dan tindak lanjut yang efektif. Berikut data survei kepuasan masyarakat yang dilakukan BPMP Babel.

Tabel 21 Statistik Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Tahun	Rerata SKM	Kategori
2022	3.77	Sangat Baik
2023	3.76	Sangat Baik
2024	3.86	Sangat Baik
2025 (survei s.d TW 3)	3.47	Baik

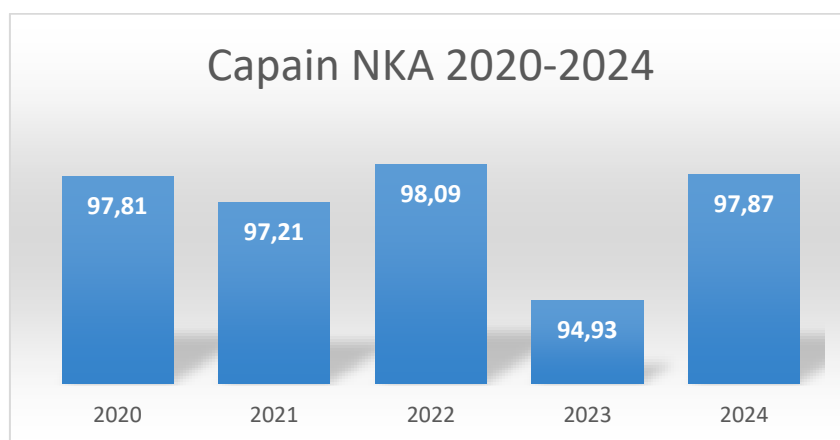
Hasil survei ini mencerminkan, bahwa BPMP Babel harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan benar-benar memberikan layanan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dengan mengimplementasikan budaya kerja RAMAH SANTUN. Terjadi penurunan signifikan dari hasil survei tahun sebelumnya, namun hal tersebut merupakan masukan berharga bagi BPMP Babel untuk meningkatkan kualitas layanannya.

Selain itu untuk mendukung pembangunan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, BPMP Babel berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang baik pada bidang kearsipan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keterbukaan Informasi Publik.

1. Berkomitmen untuk pengelolaan arsip yang modern, terintegrasi, dan berbasis digital untuk menjamin ketersediaan informasi, memori organisasi, dan akuntabilitas kinerja. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SINDE, alih media menuju kearsipan digital serta peningkatan kompetensi SDM bidang kearsipan merupakan langkah BPMP Babel untuk mewujudkan BPMP Babel sebagai satuan kerja yang melaksanakan Gerakan Sadar Tertib Arsip.
2. Berkenaan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau (SPBE), BPMP Babel berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemendikdasmen. Penyusunan peta jalan SPBE BPMP Babel merupakan langkah nyata BPMP Babel untuk merencanakan penerapan SPBE sesuai dengan kebijakan Kemendikdasmen, dan Mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh untuk mewujudkan layanan BPMP Babel yang efisien, efektif, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan (Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, dan masyarakat).
3. BPMP Babel berkomitmen sebagai Badan Publik yang Informatif dengan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/gratis, dan cara yang sederhana. Hal tersebut diwujudkan dengan pengembangan dan pembaruan rutin laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang *user-friendly* dan mudah diakses. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang bersifat wajib disediakan secara berkala. Serta menerapkan standar layanan informasi publik yang prima.

Sesuai dengan visi Kemendikdasmen, yang berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator penilaian reformasi birokrasi serta menjadikan indikator tersebut sebagai indikator kinerja Rencana Strategis 2025-2029, sehingga dapat menjadi kementerian dengan tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif. Maka BPMP Babel berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola lembaga

kedepannya dengan meningkatkan nilai kinerja anggaran serta mempertahankan stabilitas akuntabilitas kinerja yang berorientasi hasil (*outcome-based*), efektif, dan efisien dengan dukungan sistem pengukuran kinerja yang valid.



Gambar 31 Capaian NKA BPMP Babel 2020-2024

BPMP Babel berkeinginan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran secara maksimal, sehingga setiap Rupiah APBN memberikan dampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dicapai dengan strategi.

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dengan melakukan penyesuaian program dengan program Kemendikdasmen dan daerah, memastikan akurasi data rencana penarikan dana (RPD) dan mendorong percepatan proses pengadaan barang/jasa dan pembayaran untuk menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun.
2. Memastikan seluruh pengeluaran anggaran terukur dan berkontribusi langsung pada indikator kinerja utama (IKU) BPMP Babel. Jadi dalam hal ini BPMP Babel fokus pada anggaran yang berorientasi hasil. Menggeser fokus dari *output* (jumlah kegiatan/laporan) menjadi *outcome* (dampak kegiatan terhadap mutu pendidikan daerah). Hal ini memang tidak mudah untuk dilakukan namun dengan belajar dan komitmen bersama hal ini dapat diwujudkan. Untuk itu BPMP Babel perlu melakukan evaluasi pasca-anggaran (*Post-Activity Review*) untuk menilai keberhasilan kegiatan berdasarkan dampak di lapangan.

Tabel 22 Nilai SAKIP BPMP Babel 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	BB	BB	BB	A	AA

Terkait dengan Tata Kelola Akuntabilitas Kinerja (AKIP), BPMP Babel memiliki visi mewujudkan kinerja BPMP Babel yang berorientasi hasil (*outcome-based*), efektif, dan efisien dengan dukungan sistem pengukuran kinerja yang valid. BPMP Babel masih perlu untuk meningkatkan maturitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tren pada Tabel 17 menunjukkan peningkatan nilai SAKIP BPMP Babel, namun hal

tersebut belum stabil. BPMP Babel perlu melakukan penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara *real-time* dan transparan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Untuk memastikan ketercapaian berbagai prioritas dan sasaran pembangunan pendidikan ke depan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki kewenangan dan potensi yang besar dalam meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Potensi Kemendikdasmen dalam meningkatkan layanan pendidikan seperti penyediaan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan bantuan pembiayaan pendidikan. Sedangkan, potensi Kemendikdasmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia seperti kewenangan kebijakan pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta pengawasan dan penjaminan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari Kemendikdasmen, BPMP Babel berkomitmen dan dukungan yang kuat terhadap peningkatan layanan dan kualitas pendidikan melalui program Prioritas Nasional sektor pendidikan dasar dan menengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, dan Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) Tahun 2025-2045. Dokumen nasional tersebut menjadi acuan dan rujukan yang mendorong Kemendikdasmen dalam melakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan pendidikan, serta membentuk kebijakan-kebijakan baru yang menyesuaikan dengan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Perkembangan teknologi digital yang semakin canggih memberikan manfaat yang baik untuk peningkatan proses pembelajaran. Perubahan signifikan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran menjadikan proses tersebut semakin menarik, interaktif, dan informasi ilmu pengetahuan semakin mudah diakses. Penggunaan perangkat teknologi digital memungkinkan pendidik dan peserta didik untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran yang inovatif dan menambah pengalaman belajar yang lebih interaktif.

Potensi perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan Kemendikdasmen untuk mengembangkan berbagai sistem dan aplikasi digital pendidikan. Digitalisasi pendidikan mencakup pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pendidikan, tidak hanya dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi juga dalam sistem pendukung di belakangnya. Upaya transformasi digital pendidikan bertujuan untuk menciptakan kolaborasi ekosistem pendidikan, memberikan kemudahan akses dan perluasan jangkauan layanan

publik, standarisasi kualitas layanan pendidikan, data terintegrasi dan komprehensif, dan efisiensi biaya dan sumber daya. Teknologi digunakan untuk membantu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, dan semua unsur yang terlibat dalam ekosistem pendidikan. Dengan adanya digitalisasi, interaksi antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Berdasarkan data Susenas tahun 2024, terdapat sekitar 66,01% (enam puluh enam koma nol satu persen) anak yang sedang bersekolah di seluruh jenjang pendidikan yang mengakses internet dalam 3 (tiga) bulan terakhir yang digunakan untuk mendapat informasi/berita, mengirim/menerima *e-mail*, pembelajaran *online*, atau *work from home* (bekerja dari rumah).

Selain itu dalam rangka pemanfaatan teknologi untuk mendukung perluasan akses pendidikan dapat dilakukan melalui pendidikan jarak jauh, peningkatan digitalisasi pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan yang dapat menjangkau peserta didik terutama pada wilayah khusus (daerah tertinggal, terpencil, dan terluar). Dukungan Kemendikdasmen dalam digitalisasi pendidikan adalah dengan menyediakan platform digital pendidikan sebagai layanan digital pendidikan terintegrasi yang mendukung kolaborasi seluruh partisipan dalam ekosistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Platform digital pendidikan dapat diakses oleh pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, satuan pendidikan, pemerintah, mitra, orang tua peserta didik, dan masyarakat publik.

Adopsi perkembangan teknologi dalam pendidikan menjadi hal yang tidak bisa dielakkan. Pemanfaatan teknologi yang berwujud literasi digital menjadi kemampuan yang perlu dikuasai dalam pendidikan. Peserta didik perlu secara fasih menggunakan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknis. Penguasaan keterampilan literasi digital akan menjadi potensi dalam meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas menggunakan gawai.

Kementerian telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik swasta/industri, kelompok masyarakat, dan mitra pembangunan, baik nasional maupun internasional secara masif untuk mendukung program-program pendidikan. Kerja sama yang dilakukan berpotensi positif dalam penyelarasan program dan strategi, sehingga menjadi sumber daya yang semakin menguat untuk pencapaian target-target dan sasaran pembangunan pendidikan.

Era Globalisasi mendorong semua pihak agar selalu melakukan perubahan dengan cepat dan mengikuti kemajuan teknologi. Pendidikan juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan isu-isu globalisasi saat ini. Metode pembelajaran dan kompetensi tenaga kependidikan perlu melakukan peningkatan kualitas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan perlu mengadaptasi metode yang berkaitan dengan isu global, sehingga kualitas peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan mampu bersaing secara global.

Teknologi digital dan globalisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sifat pekerjaan saat ini dan masa depan. Kebutuhan yang semakin tinggi terhadap keterampilan digital seiring penetrasi teknologi ke semua aspek kehidupan membuat penguasaan keterampilan digital sebagai sesuatu yang dibutuhkan di dunia kerja. Menurut *World Economic Forum* (2023), keterampilan digital akan menjadi keterampilan yang penting untuk dimiliki di pasar kerja, di antaranya keterampilan seperti literasi teknologi, kecerdasan buatan, analisis data dan saintis data (*data scientist*), serta spesialis data besar (*big data specialist*). Penguasaan keterampilan digital perlu ditingkatkan, pendidikan juga perlu merespon dengan pemahaman budaya digital yang tetap mengedepankan etika, keamanan, wawasan dan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebhinekaan.

Pasar tenaga kerja di seluruh dunia sedang dipengaruhi oleh periode transformasi industri yang didorong oleh peningkatan adopsi teknologi, transisi hijau, dan restrukturisasi rantai nilai. Hal ini diperparah oleh krisis kesehatan, geopolitik, dan ekonomi terbaru yang telah secara signifikan mempengaruhi tingkat pekerjaan di seluruh dunia, serta perubahan demografis yang kemungkinan akan mendorong perubahan lebih lanjut di tahun-tahun mendatang. Tren ini telah menciptakan tantangan dan peluang bagi pasar tenaga kerja global.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh pekerja di Sektor Jasa. Sebagai acuan, data Sakernas (misalnya, kondisi Agustus 2020) menunjukkan angka sebagai berikut, sektor jasa (tertier) sebesar 44.05%, kemudian sektor pertanian (primer) sebesar 32,05%, dan ketiga adalah sektor manufaktur sebesar 23,45%. Sektor Jasa adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Bangka Belitung. Penyumbang terbesar di dalam sektor jasa ini adalah Perdagangan Besar dan Eceran (penyumbang terbesar di sektor jasa), Akomodasi dan Makanan Minuman, dan Jasa-jasa lainnya (Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, dll.). Perkebunan seperti sawit dan karet. Perikanan dan kelautan. Sedangkan pada sektor manufaktur terkait dengan pengolahan pengolahan hasil tambang, hasil pertanian, atau industri terkait perikanan. Maka dapat dikatakan bahwa struktur pekerjaan di Bangka Belitung cukup beragam, namun bergantung kuat pada sektor perdagangan/jasa dan pertanian/perkebunan/perikanan. Namun pada kondisi Februari 2023 dengan Februari 2024 terjadi pergeseran sektor pertanian/perkebunan/perikanan mengalami peningkatan, karena pekerja yang beralih dari sektor pertambangan dan didorong oleh harga komoditas pertanian (seperti sawit dan karet) yang cukup baik. Penurunan pada sektor pertambangan sangat dipengaruhi oleh adanya regulasi dan kebijakan terkait tata kelola timah (RKAB Pertambangan) dari pemerintah pusat yang belum berjalan lancar, memaksa para pekerja di sektor ini beralih ke sektor lain.

Selanjutnya, dengan semakin merebaknya berbagai permasalahan lingkungan, yang kemudian meningkat menjadi isu keberlanjutan yang lebih kompleks, terdapat kebutuhan mendesak untuk pendidikan dapat mengadopsi dalam kurikulum dan

pembelajaran mengenai isu lingkungan, penanganan atas isu perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Pembelajaran ramah lingkungan (*green education*) sejak pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan bagi orang dewasa sebagai bagian dari pendidikan sepanjang hayat (*lifelong learning*). Pendidikan ramah lingkungan bertujuan untuk menyoroti keterkaitan krisis iklim dengan pilar-pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan penyampaian respons pendidikan terhadap isu perubahan iklim. Pendidikan ramah lingkungan konsisten dengan dan mendukung tujuan pendidikan transformatif lainnya, seperti keterampilan abad ke-21 (dua puluh satu). Isu utama kerusakan lingkungan di Bangka Belitung berakar kuat pada aktivitas pertambangan timah yang telah berlangsung masif dan seringkali tidak terkendali, baik secara legal maupun ilegal. Pertambangan, terutama tambang terbuka, menyebabkan pembukaan lahan besar-besaran dan hilangnya lapisan tanah subur (*top soil*). Akibatnya, Bangka Belitung memiliki angka lahan kritis yang sangat tinggi, yang pada tahun 2022 tercatat mencapai lebih dari 167.000 Ha. Lubang-lubang raksasa bekas galian tambang yang ditinggalkan (disebut *kolong*) tergenang air dan menjadi pemandangan umum di Bangka Belitung. Air di kolong ini seringkali memiliki tingkat keasaman (pH) yang tinggi dan kandungan logam berat yang dapat membuatnya beracun, sangat sulit dipulihkan, dan mengganggu ekosistem serta kesehatan masyarakat. Lahan bekas tambang memiliki tingkat kesuburan yang rendah, minim unsur hara, dan memiliki sifat kimia tanah yang buruk. Hal ini membuat lahan tersebut tidak layak atau sangat sulit untuk ditanami kembali (reklamasi), menghambat upaya diversifikasi ekonomi ke sektor pertanian atau perkebunan. Aktivitas penambangan, terutama yang ilegal, sering merambah kawasan hutan. Hal ini menyebabkan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan mengancam habitat satwa endemik. Penambangan timah ilegal banyak menasar wilayah pesisir dan muara sungai, menghancurkan ekosistem hutan mangrove yang berfungsi sebagai benteng pantai, tempat pemijahan ikan, dan penyerap karbon. Limbah dan lumpur (*sedimentasi*) dari kegiatan tambang yang disebut *tailing* dialirkan ke sungai dan bermuara di laut. Akibatnya, lebih dari 55% sungai di Bangka tercatat tercemar. *Sedimentasi* ini menutupi terumbu karang, mengganggu biota laut, dan merusak kawasan penangkapan ikan tradisional. Penambangan timah secara ilegal (TI) juga dilakukan di laut, menghancurkan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut yang merupakan sumber mata pencaharian utama nelayan. Kerusakan lingkungan di Bangka Belitung telah menciptakan krisis ekologis yang mendalam, menghambat pembangunan berkelanjutan, dan memicu konflik sosial, yang diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal dan korupsi di sektor tersebut.

Untuk mengatasi isu kerusakan lingkungan yang mendalam akibat pertambangan timah, Pendidikan Berwawasan Lingkungan yang diterapkan di Bangka Belitung tidak bisa lagi bersifat umum, tetapi harus spesifik dan berfokus pada Reklamasi, Konservasi Pesisir, dan Kearifan Lokal. Pendidikan harus menjadikan masalah lingkungan Bangka Belitung

sebagai objek pembelajaran utama. Dengan mengintegrasikan isu pertambangan dan reklamasi sebagai *problem based learning*, misalnya dengan menjadikan kolong (bekas galian tambang) menjadi laboratorium alam. Siswa dilibatkan dalam pengujian pH air kolong, mengidentifikasi tingkat pencemaran logam berat, dan mencari solusi bioteknologi untuk penetralan air. Sekolah bekerjasama dengan pemerintah dan perusahaan tambang (melalui program Adiwiyata atau mandiri) untuk mengelola lahan kritis bekas tambang. Siswa dapat menanam tanaman perintis lokal (seperti Pohon Pelawan atau Kemiri Sunan) sebagai praktik reklamasi langsung. Mengedukasi peserta didik tentang tata kelola pertambangan, bahaya tambang ilegal, dan sanksi hukum terhadap perusakan lingkungan, untuk menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini. Fokus pada identifikasi dan konservasi flora dan fauna endemik Bangka Belitung yang terancam punah akibat tambang (contohnya: Tarsius Bangka, Simpor, Pelawan, Nyatoh). Menjelaskan secara praktis bagaimana limbah tambang (sedimen) merusak ekosistem sungai dan laut, dan bagaimana masyarakat adat menjaga kebersihan aliran air. Siswa terlibat aktif dalam program penanaman dan pemeliharaan mangrove. Mangrove dijadikan objek studi biologi dan ekologi yang terintegrasi di sekolah pesisir. Mengajarkan dampak pengerukan timah di laut terhadap terumbu karang dan biota laut, menumbuhkan kesadaran bahwa kekayaan laut adalah masa depan Bangka Belitung selain timah.

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, indeks literasi keuangan Indonesia meningkat setiap tahun sejak tahun 2013 hingga tahun 2025. Pada tahun 2025, indeks literasi keuangan mencapai 66,46 (enam puluh enam koma empat puluh enam). Pada tahun 2025, laki-laki cenderung memiliki indeks literasi keuangan yang lebih tinggi daripada perempuan, dengan capaian tahun 2025 sebesar 65,58 (enam puluh lima koma lima puluh delapan) untuk perempuan dan 67,32 (enam puluh tujuh koma tiga puluh dua) untuk laki-laki. Selain itu, kesenjangan juga tampak dari capaian indeks literasi keuangan perkotaan yang lebih tinggi daripada perdesaan, dengan capaian tahun 2022 sebesar 50,52 (lima puluh koma lima puluh dua) untuk perkotaan dan 48,43 (empat puluh delapan koma empat puluh tiga) untuk perdesaan, capaian tahun 2024 sebesar 69,71 (enam puluh sembilan koma tujuh puluh satu) untuk perkotaan dan 59,25 (lima puluh sembilan koma dua puluh lima) untuk perdesaan, dan capaian tahun 2025 sebesar 70,89 (tujuh puluh koma delapan puluh sembilan) untuk perkotaan dan 59,60 (lima puluh sembilan koma enam) untuk perdesaan.

Pendidikan literasi finansial dapat masuk ke dalam pembelajaran melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Adapun contoh praktik baik pendidikan literasi finansial melalui berbagai cara dalam kurikulum, seperti kegiatan Pramuka yang mencakup pengelolaan keuangan, proyek penggalangan dana, pelatihan menabung dan

cakap finansial; dan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) yang mencakup membuat permainan untuk pendidikan literasi finansial dan penelitian tentang pengeluaran peserta didik. Di tingkat kebijakan, pemerintah daerah berperan dalam mendukung implementasi literasi finansial melalui penyediaan kebijakan yang berpihak pada pendidikan keuangan, pengalokasian anggaran yang memadai, serta pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam menghubungkan kerja sama antara satuan pendidikan dengan berbagai mitra strategis, seperti kementerian, lembaga, praktisi, dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas jangkauan edukasi literasi finansial. Indeks Literasi Keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang terakhir dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah 62,34%. Angka tersebut menunjukkan penduduk Bangka Belitung memiliki pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan diri yang lebih baik dalam mengelola keuangan dan memilih produk/layanan jasa keuangan formal dibandingkan rata-rata masyarakat Indonesia. Meskipun tingkat literasi menunjukkan angka yang tinggi, namun upaya edukasi dan sosialisasi dari OJK bersama pihak terkait (seperti perbankan daerah) terus dilakukan, terutama untuk meningkatkan pemahaman investasi dan mencegah kerugian akibat investasi ilegal.

Perkembangan zaman yang cepat menuntut setiap orang memiliki keterampilan yang ahli agar dapat bersaing di berbagai aspek. *Transferable skills* atau sering dikenal sebagai keterampilan hidup (*life skills*), keterampilan abad ke-21 (dua puluh satu) atau *21st century skills*, *soft skills*, atau keterampilan sosio-emosional (*socio-emotional skills*) adalah keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan berbagai konteks kehidupan dan individu yang berpotensi berpindah ke pekerjaan dan lingkungan sosial yang berbeda. Keterampilan ini memungkinkan anak dan remaja menjadi pembelajar yang tangkas, adaptif, dan warga negara yang produktif dan berhasil melalui tantangan dirinya pribadi, tantangan akademik, tantangan sosial, dan tantangan ekonomi. Memperkuat *transferable skills* sejak usia prasekolah dasar ke pendidikan menengah dan pasca sekolah menengah akan mendukung perkembangan yang holistik dan pencapaian pembelajaran yang lebih baik, mendukung kemampuan kerja remaja dalam proses transisi dari sekolah ke dunia kerja, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih egaliter (sama atau sederajat) dan adil.

1.1.2 Permasalahan

Partisipasi Pendidikan

Secara umum angka partisipasi pendidikan di berbagai jenjang terus meningkat dan dapat dipertahankan. Masih terdapat berbagai masalah dalam upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan agar dapat menunjukkan hasil yang baik. Beberapa permasalahan dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan angka partisipasi, antara lain:

1. Partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan jenjang pendidikan menengah belum optimal, terlihat dari persentase anak kelas 1 (satu) SD/ sederajat yang pernah mengikuti PAUD yang baru mencapai 60% (enam puluh persen) dan APS SMA/ sederajat sebesar 79,69% (tujuh puluh sembilan koma enam puluh sembilan persen).
2. Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah usia 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun yang mencapai 27% hingga 32% dari anak usia 16-18 tahun di Bangka Belitung. Jumlah ATS yang masih besar ini, dikarenakan aspek ekonomi dan sosial budaya dalam menjangkau layanan pendidikan, serta belum optimalnya pendataan, penjangkauan, pendampingan, dan penyediaan pola layanan pendidikan yang tepat bagi ATS.
3. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada standar sarana prasarana indeks kelayakan ruang dan indeks sanitasi merupakan prioritas pemenuhan utama. Berdasarkan Dapodik tahun 2025, terdapat 10.440 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh) satuan pendidikan yang menjadi sasaran revitalisasi meliputi rehabilitasi ruang kelas yang rusak kategori sedang atau berat, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang lainnya sesuai SNP, dan pembangunan unit sekolah baru.
4. Dukungan fasilitas pada satuan pendidikan terutama fasilitas transit penyaluran makanan, serta sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta cuci tangan yang belum memadai dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Kualitas

Pada tahun 2024 hasil capaian kualitas pembelajaran baru menunjukkan kategori sedang. Pada beberapa jenjang nilai rerata hasil asesmen dan capaian lingkungan belajar sudah cukup. Kementerian melakukan berbagai upaya agar kualitas hasil pembelajaran terus meningkat, namun masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Skor rerata Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan proporsi peserta didik yang mencapai kompetensi minimum bidang literasi membaca dan numerasi masih belum optimal terutama pada jenjang SMA/ sederajat.
2. Hasil capaian lingkungan belajar yang ditunjukkan dari capaian Iklim Keamanan Sekolah, Iklim Kebinekaan Sekolah, Iklim Inklusivitas Sekolah, dan Indeks Karakter secara umum masih belum mencapai angka 75 (tujuh puluh lima) pada seluruh jenjang.
3. Terdapat ketimpangan dalam literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang perlu ditingkatkan melalui inovasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik berdasarkan hasil asesmen nasional.
4. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran masih terbatas dan belum merata.
5. Masih diperlukan peningkatan layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pendidikan gizi, kesadaran dan pembiasaan murid dalam konsumsi pangan yang beragam, aman, dan sehat, higiene di satuan pendidikan seperti mencuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan lingkungan.

Pembiayaan Pendidikan

Pemanfaatan 20% (dua puluh persen) APBD fungsi pendidikan belum dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah. Masih terdapat beberapa provinsi/kabupaten/kota yang belum mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) pada APBD sesuai peruntukannya. Beberapa permasalahan yang menyebabkan pemanfaatan yang belum tepat guna dan tepat sasaran sebagai berikut:

1. Perbedaan persepsi terkait kategori pemanfaatan 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan yang efektif menyebabkan pemanfaatan yang tidak tepat guna dan tepat sasaran dapat terjadi.
2. Pemanfaatan 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan yang efektif belum menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah melakukan pemenuhan saja tanpa memperhatikan ketepatan dari penggunaan anggaran tersebut.

Tabel 23 Penganggaran PEMDA Tahun 2025

Provinsi/Kab/Kota	Total Sub Keg	SubKeg RAPBD	% SubKeg	Total Anggaran	Anggaran SPM	% Anggaran
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	219	200	91,32	Rp718.178.820.419	Rp183.714.624.997	25,58
Kab. Bangka	119	46	38,66	Rp334.061.163.996	Rp60.715.800.000	18,18
Kab. Bangka Barat	119	37	31,09	Rp294.011.350.000	Rp25.937.504.000	8,82
Kab. Bangka Selatan	119	23	19,33	Rp165.198.689.936	Rp9.372.000.000	5,67
Kab. Bangka Tengah	119	31	26,05	Rp280.258.073.800	Rp19.632.970.800	7,01
Kab. Belitung	119	34	28,57	Rp248.025.785.935	Rp20.599.381.039	8,31
Kab. Belitung Timur	119	95	79,83	Rp236.464.608.836	Rp12.521.798.100	5,30
Kota Pangkalpinang	119	48	40,34	Rp255.229.628.914	Rp20.464.591.648	8,02

Penganggaran PEMDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pemenuhan SPM dapat dilihat pada Tabel di atas. BPMP untuk kedepannya masih perlu melakukan advokasi dan pendampingan kepada PEMDA untuk penganggaran pendidikan agar dapat tepat guna memenuhi SPM Pendidikan. Berikut pemenuhan SPM pendidikan.

Tabel 24 Indeks Capaian SPM PEMDA di Kepulauan Bangka Belitung

No	Kab/Kota/Prov	2023	2024	2025
1.	Kepulauan Bangka Belitung	60,69 (Tuntas Muda)	71,03 (Tuntas Pratama)	76,67 (Tuntas Pratama)
2.	Bangka	64,96 (Tuntas Muda)	70,89 (Tuntas Pratama)	80,48 (Tuntas Madya)
3.	Belitung	66,31 (Tuntas Muda)	74,09 (Tuntas Pratama)	79,17 (Tuntas Pratama)
4.	Bangka Tengah	64,50 (Tuntas Muda)	74,80 (Tuntas Pratama)	77,73 (Tuntas Pratama)
5.	Bangka Barat	63,66 (Tuntas Muda)	70,14 (Tuntas Pratama)	75,90 (Tuntas Pratama)
6.	Bangka Selatan	66,08 (Tuntas Muda)	69,57 (Tuntas Muda)	74,59 (Tuntas Pratama)
7.	Belitung Timur	65,83 (Tuntas Muda)	73,93 (Tuntas Pratama)	80,68 (Tuntas Madya)
8.	Pangkal Pinang	69,47 (Tuntas Muda)	74,91 (Tuntas Pratama)	80,56 (Tuntas Madya)

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BPMP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2.1 Visi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebagai bagian dari Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan maka BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menentukan visi berdasarkan visi Kemendikdasmen tahun 2025-2029. Adapun Visi Kemendikdasmen tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikdasmen berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikdasmen, dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden.

2.2 Misi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sesuai tugas dan kewenangannya, BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikdasmen melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun misi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menentukan misi berdasarkan misi Kemendikdasmen:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

2.3 Tujuan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perumusan tujuan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikdasmen ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan bidang tugas Kementerian. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel 25 Tujuan dan Indikator Tujuan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Tujuan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Indikator Tujuan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB/Sederajat yang Pernah Mengikuti PAUD di Provinsi Kep. Bangka Belitung 2. Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: <ol style="list-style-type: none"> a. Literasi Membaca b. Numerasi 3. Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebhinekaan pada kategori baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3.	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian

2.4 Sasaran Strategis BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mendukung sasaran strategis Kemendikdasmen menetapkan tiga sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029, yaitu:

Tabel 26 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

No.	Tujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
1	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua
2	Menguatnya mutu layanan pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
3	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Berdasarkan Sasaran Strategis di atas, BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai UPT Kemendikdasmen mengidentifikasi indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Risiko-risiko tersebut dapat berindikasi pada ketercapaian Sasaran Strategis Kemendikdasmen. Adapun indikasi risikonya berdasarkan Sasaran Strategis sebagai berikut.

Tabel 27 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Indikator Risiko

No.	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Risiko
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan belum memberikan keberpihakan untuk wilayah-wilayah 3T, daerah dengan angka partisipasi rendah, daerah yang tidak memiliki sekolah, daerah- daerah yang memiliki tingkat kerusakan sekolah tinggi serta kualitas hasil pembangunan dan revitalisasi berjalan tidak optimal yang menyebabkan fasilitas tidak digunakan dan tidak mendukung perluasan daya tampung. 2. Upaya penanganan dan penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak optimal dilakukan karena tidak tersedianya data ATS yang memadai serta belum terjalinnnya sinergi lintas sektor untuk mengatasi dampak negatif yang mengakar pada sosial budaya sehingga menyebabkan anak tidak bersekolah. 3. Penerima bantuan pendidikan tidak mengalokasikan dana secara tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan dengan maksimal untuk tujuan pembelajaran dan/atau penggunaan yang bisa mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan, serta indeks biaya bantuan yang diberikan tidak dapat menutup opportunity cost yang dibutuhkan. 4. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini tidak tersedia secara memadai serta masih adanya disparitas antarwilayah. 5. Belum terdapat fleksibilitas waktu pada proses pembelajaran pendidikan nonformal karena masih mengikuti waktu pembelajaran pada pendidikan formal. 6. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak mendapatkan layanan pendidikan yang optimal karena kompetensi guru yang tidak sesuai, kurikulum yang tidak adaptif, serta fasilitas yang tidak sesuai pada layanan pendidikan inklusif.
2	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan inovasi pembelajaran melalui teknologi tidak optimal secara baik untuk

No.	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Risiko
	usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	<p>peningkatan kompetensi guru, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, serta pengayaan pembelajaran (sumber bahan ajar seperti konten pembelajaran dan bahan bacaan bermutu).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tidak terbangunnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif dan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). 3. Hasil asesmen pendidikan tidak dimanfaatkan untuk penguatan dan perbaikan inovasi pembelajaran dan pengajaran. 4. Penerapan kurikulum belum berpengaruh pada cara belajar mengajar, fasilitasi belajar guru murid, serta pola pembiasaan di lingkungan belajar. Selain itu, kurikulum tidak kontekstual, tidak berpusat pada peserta didik, tidak berfokus pada karakter dan kompetensi esensial, dan tidak sesuai konteks kewilayahan. 5. Bahan ajar yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembelajaran, baik dari segi jumlah, distribusi ke wilayah yang kekurangan, kesesuaian konten dengan usia dan perkembangan anak, maupun keterkaitan dengan konteks wilayah. Di samping itu, terbatasnya pengawasan berbagai pihak sehingga terdapat buku dan bahan ajar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang digunakan dalam proses pembelajaran. 6. Lulusan pendidikan nonformal tidak mendapatkan hasil belajar yang optimal dan kompetensi yang diharapkan karena kualitas layanan pendidikan nonformal yang tidak cukup baik. 7. Rendahnya partisipasi peserta didik dalam ajang talenta dan capaian prestasi tingkat internasional menurun. 8. Satuan pendidikan pada daerah terpencil belum siap untuk diakreditasi karena berbagai kendala, seperti aksesibilitas yang terbatas. 9. Pendidikan dan pelatihan guru tidak memberikan dampak yang signifikan pada kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemenuhan kesejahteraan guru tidak diikuti dengan peningkatan kinerja, kompetensi, dan pengembangan keprofesionalan, serta pendidik dan tenaga kependidikan belum terpenuhi dan merata di setiap wilayah karena kurangnya komitmen

No.	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Indikator Risiko
		pemerintah daerah dalam melaksanakan distribusi, redistribusi, dan pengangkatan guru.
3	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja dari pihak eksternal maupun internal tidak dimanfaatkan oleh satuan kerja untuk perbaikan dan peningkatan kualitas layanan dan penyusunan program/kebijakan pada tahun berikutnya. 2. Kebijakan ditetapkan tidak berdasarkan data aktual, tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya, dan advokasi kebijakan tidak optimal. 3. Objektivitas pelaksanaan pengawasan internal tidak terjadi karena adanya kepentingan beberapa pihak.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Pembangunan pendidikan dasar dan menengah disusun berdasarkan dan merujuk kepada arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah (RPPJM), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029, serta hasil evaluasi Renstra tahun 2020-2024, yang kemudian dituangkan dalam perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2025-2029. Renstra Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen menjadi dasar, pedoman, acuan dalam penyusunan program dan selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Rujukan-rujukan utama ini secara konsisten harus dapat dicermati, dianalisis dan dipertajam ke dalam Renstra PAUD, Dikdas, dan Dikmen agar tidak keliru dan dapat optimal dalam teknis pelaksanaannya sampai kepada pengelola kegiatan, dan juga output-output yang menjadi ujung tombak bagi pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut:

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata dan untuk mewujudkan penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, arah kebijakan dirumuskan secara sistematis melalui strategi yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan sebagai berikut:

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan.
5. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja.

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan berkeadilan, arah kebijakan Kemendikdasmen diterjemahkan ke dalam program-program yang selaras dengan Prioritas Nasional 4.

Tabel 28 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 4

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	SasaranStrategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua
2	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
3	Penguatan pengelolaan pendidik dan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan

	tenaga kependidikan berkualitas	anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
4	Penguatan sistem tata kelola pendidikan	Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan
5	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri, pembangunan kebahasaan dan kesastraan, dan penguatan tatakelola Kementerian. Arah kebijakan Kemendikdasmen tersebut harus dilaksanakan oleh BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut juga mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

1. *Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua yang berkeadilan*
 - a. Perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah dengan peningkatan daya tampung, antara lain melalui upaya memberikan keberpihakan pada wilayah yang tidak memiliki satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, wilayah afirmasi, serta wilayah dengan angka partisipasi dan kemampuan fiskal rendah, dan dengan memperhatikan data kebutuhan anak usia sekolah dan karakteristik wilayah.
 - b. Pemenuhan dan perbaikan prasarana dan sarana layanan pendidikan, dengan memprioritaskan satuan pendidikan dengan tingkat kerusakan tinggi, terdampak bencana, pada wilayah afirmasi, dengan mendorong pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar, dan kebutuhan pembelajaran.
 - c. Pemenuhan bantuan pendidikan untuk mengatasi kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok ekonomi, dan peningkatan partisipasi pendidikan pada wilayah afirmasi, serta mendukung program sekolah rakyat, dengan memastikan ketepatan sasaran, mengupayakan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan, serta meningkatkan kualitas pemanfaatan untuk seoptimal mungkin mendukung anak dalam mengakses layanan pendidikan.
 - d. Penyediaan layanan dan pemenuhan bantuan penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan keberpihakan pada anak dengan disabilitas, anak pekerja migran, dan layanan pendidikan terdampak bencana.
 - e. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) antara lain dengan penguatan pendataan tepat yang dapat mengidentifikasi ATS beserta isu yang dihadapi, pola penjangkauan tepat, pendampingan efektif untuk menumbuhkan minat sekolah pada ATS dan kesadaran akan pendidikan pada orang tua/wali dan masyarakat di

lingkungan ATS, dan memastikan anak mendapatkan layanan pendidikan sesuai usia, minat, dan karakteristik serta kebutuhan spesifik anak.

- f. Penguatan upaya pencegahan anak putus sekolah dengan mengembangkan sistem deteksi dini untuk mencegah potensi putus sekolah melalui pemantauan kehadiran peserta didik, kondisi keluarga, serta faktor risiko lainnya, dan pendampingan pada anak berisiko putus sekolah dengan pendekatan konseling.
- g. Pengembangan dan penguatan layanan pembelajaran yang sesuai dan fleksibel untuk ATS, terutama terkait dengan isu anak yang bekerja, anak terlantar/anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, ataupun terkait isu remaja dalam pernikahan. Membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kondisi dan karakter peserta didik.
- h. Penguatan penyelenggaraan layanan pendidikan khusus, dengan memastikan tersedianya layanan pada setiap wilayah, serta peningkatan sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif, untuk memberikan hak pendidikan yang berkeadilan bagi anak berkebutuhan khusus.
- i. Penguatan layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan dengan memperhatikan afirmasi wilayah dan kelompok usia.
- j. Penguatan pendidikan nonformal dan informal, antara lain dengan melakukan afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, rumah belajar, relawan mengajar, dan pendidikan jarak jauh, untuk dapat menjangkau yang selama ini tidak terjangkau layanan pendidikan.
- k. Peningkatan parenting, pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.
- l. Peningkatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dan pelaku, dengan pemerintah daerah, industri/swasta, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan relawan pendidikan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan kesadaran akan pendidikan, dan dalam membangun upaya positif dalam mengeliminasi faktor hambatan yang menyebabkan anak tidak dapat mengakses layanan pendidikan.
- m. Pemenuhan fasilitas pada satuan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain melalui penyediaan fasilitas transit penyaluran makanan, penyediaan sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, dan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab.

2. Penguatan layanan PAUD dan 1 (satu) tahun prasekolah

- a. Perluasan layanan pendidikan anak usia dini, terutama pada wilayah yang belum terlayani, dengan mengutamakan kerja sama lintas sektor, dan membangun komitmen daerah dalam penyediaan PAUD.
- b. Penguatan program untuk pemerataan kesempatan memperoleh layanan 1 (satu) tahun pendidikan anak usia dini terorganisir antara lain melalui pemenuhan layanan TK, dan TK-SD satu atap.
- c. Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak yang sedang PAUD, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu.

- d. Penyederhanaan perizinan PAUD agar dapat mengakomodir multi layanan berupa Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan PAUD dalam satu atap.
 - e. Penguatan integrasi kurikulum dan pendekatan pembelajaran PAUD-SD guna menyelaraskan antara capaian perkembangan pada level PAUD dan capaian pembelajaran fase awal SD.
 - f. Penguatan pelaksanaan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan efektif antara lain melalui peningkatan kolaborasi berbagai pihak mulai dari orang tua/wali peserta didik, guru, Dinas Pendidikan, serta Kementerian, selain itu perlu dibangunnya aspek kemampuan fondasi sejak PAUD hingga SD kelas awal untuk bekal anak sebagai pembelajar sepanjang hayat, serta melalui penyediaan alat bantu sumber belajar bagi PAUD dan SD yang mendukung transisi PAUD ke SD.
 - g. Mendorong penerapan layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) oleh daerah, melalui penguatan kerja sama lintas sektor.
3. *Penguatan mutu layanan, dan kualitas pembelajaran dan pengajaran, kurikulum dan model pembelajaran, serta penilaian pendidikan*
- a. Penguatan pembelajaran yang mendorong penguasaan peserta didik terhadap keterampilan hidup dan soft skills masa depan sesuai kebutuhan.
 - b. Peningkatan kualitas pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran yang bermakna dan mendalam dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
 - c. Penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.
 - d. Peningkatan bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman, dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik, dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas.
 - e. Peningkatan digitalisasi pembelajaran, untuk meningkatkan akses bahan ajar dan belajar yang lebih kaya dan berwawasan luas, pembelajaran yang lebih fleksibel, peningkatan kemampuan digital, dalam menyiapkan generasi muda yang lebih siap dan cakap mengikuti perkembangan teknologi.
 - f. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM), serta penguasaan koding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial.
 - g. Penerapan evaluasi secara berkala untuk menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum dalam memberikan ruang bagi satuan pendidikan dalam mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan kebutuhan peserta didik.
 - h. Penerapan asesmen nasional dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai sistem penilaian pendidikan yang berkualitas untuk mengukur kualitas dan memetakan capaian hasil belajar serta menjadi landasan dalam perbaikan pembelajaran dan layanan penyelenggaraan pendidikan.
 - i. Penerapan pembelajaran yang mendorong penguatan karakter, dan memperhatikan psikososial anak, serta penciptaan lingkungan belajar peserta didik yang aman dan

kondusif antara lain dengan penguatan kualitas bimbingan konseling dan pendidikan nilai untuk guru, dan penanaman Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

- j. Penguatan pendidikan karakter secara kultural dengan meningkatkan peran tripusat pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat) menjadi catur pendidikan (keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan media).
- k. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran mendalam dengan menerapkan 8 (delapan) Dimensi Profil Lulusan untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik, serta memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir batin, sehingga mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat.
- l. Peningkatan pembinaan minat dan bakat bagi peserta didik, dan memfasilitasi peserta didik berprestasi untuk pengembangan prestasi lebih lanjut, dan pemberian apresiasi untuk peserta didik berprestasi antara lain dengan fasilitasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- m. Pengembangan talenta peserta didik agar menjadi insan yang kreatif, inovatif, dan mandiri yang unggul dalam bidang sains dan teknologi, olah raga dan seni melalui pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian dan profesi, pengelolaan basis data persediaan dan kebutuhan talenta, peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja serta pengembangan karir dan prestasi talenta, penciptaan lingkungan yang kondusif sebagai daya tarik untuk mengakuisisi talenta, serta bagi pengembangan potensi, minat, keahlian, dan prestasi talenta.
- n. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, dengan pemanfaatan Rapor Pendidikan, penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan.
- o. Penguatan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan.
- p. Pengoptimalan peran relawan pendidikan sebagai mitra strategis sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran, penguatan karakter, dan pemerataan pendidikan.
- q. Revitalisasi program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), untuk meningkatkan pendidikan gizi serta pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat.
- r. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain edukasi terkait penerapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, menjaga kebersihan lingkungan satuan pendidikan, dan upaya untuk menghindari adanya pemborosan makanan (food waste), serta pendidikan karakter seperti kedisiplinan, ketertiban, dan tanggung jawab.
- s. Penguatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan bermutu yang rele van dengan konteks pembelajaran, mudah diakses peserta didik, serta mendukung pengembangan kecakapan literasi
- t. Dukungan penerapan kurikulum dan pembelajaran pada program sekolah rakyat.

4. Penguatan pembiayaan dan tata kelola pendidikan

- a. Peningkatan peran Kemendikdasmen dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBN yang efektif dan efisien.
- b. Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran pendidikan 20% (dua puluh persen) dari APBD seoptimal mungkin dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan prioritas pembangunan pendidikan.
- c. Peningkatan pembiayaan dan kualitas pelaksanaan bantuan operasional satuan pendidikan agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan karakteristik kewilayahan.

5. Penguatan pembiayaan dan tata kelola pendidikan

- a. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
- b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
- c. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

3.3 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick win)

1. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah yang Berkualitas

Dalam rangka memberikan pendidikan yang berkualitas dan merata, Pemerintah telah menetapkan program prioritas nasional Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program ini selaras dengan Asta Cita ke-4 (empat), yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan ini juga merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) membangun satuan pendidikan unggul dan revitalisasi satuan pendidikan.

Pada tahun 2025, pemerintah akan melakukan revitalisasi sarana prasarana satuan pendidikan dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang bertujuan untuk: 1) meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah; dan 2) menyediakan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman. Pelaksanaan bantuan pemerintah terkait revitalisasi sarana dan prasarana dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional

a. Dasar Hukum

- 1) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran;

- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara -71- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor M2400/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025;
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor M2401/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2025;
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025; dan
- 7) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa Tahun Anggaran 2025.

b. Penerima Manfaat

Sasaran program revitalisasi satuan pendidikan merupakan satuan pendidikan yang berlokasi di seluruh Indonesia terdiri dari:

- 1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memerlukan revitalisasi;
- 2) Sekolah Dasar (SD) yang memerlukan revitalisasi;
- 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memerlukan revitalisasi;
- 4) Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memerlukan revitalisasi;
- 5) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memerlukan revitalisasi;
- 6) Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memerlukan revitalisasi; dan
- 7) Satuan Pendidikan Nonformal yang memerlukan revitalisasi.

c. Tujuan Program

Program revitalisasi satuan pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang terdiri dari:

- 1) rehabilitasi ruang kelas yang rusak kategori sedang atau berat;
- 2) pembangunan ruang kelas baru;
- 3) pembangunan ruang lainnya; dan
- 4) pembangunan unit sekolah baru.

Dilaksanakan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) khusus standar sarana dan prasarana pendidikan.

2. Program Digitalisasi Pembelajaran Pendidikan

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata, Indonesia perlu melakukan akselerasi dalam penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Digitalisasi pendidikan termasuk dalam 17 (tujuh belas) program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yaitu “Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi”. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan, dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, nomor 2 poin e yaitu melaksanakan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran.

Digitalisasi pembelajaran merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Dapodik per 11 Maret 2025, terdapat 334.773 (tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) satuan pendidikan di semua jenjang yang perlu mendapatkan dukungan peralatan digital. Sekolah-sekolah tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe berdasarkan ketersediaan listrik dan internet:

Tipe I: Memiliki listrik dan internet, yaitu sebanyak 291.559 (dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan) sekolah.

Tipe II: Memiliki listrik, tidak memiliki internet, yaitu sebanyak 40.473 (empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga) sekolah.

Tipe III: Tidak memiliki listrik dan internet, yaitu sebanyak 2.741 (dua ribu tujuh ratus empat puluh satu) sekolah.

Dalam pelaksanaan digitalisasi pembelajaran, diperlukan dukungan platform digital pendidikan, ketersediaan konten digital pembelajaran, serta peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran.

Sejalan dengan hal tersebut, strategi digitalisasi pembelajaran diarahkan tidak hanya pada penyediaan infrastruktur seperti listrik, internet dan peralatan digital, tetapi juga pada penguatan ekosistem pembelajaran digital yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup peningkatan literasi digital, integrasi layanan pendidikan berbasis teknologi, serta pengembangan inovasi pembelajaran digital yang sesuai dengan kebutuhan guru, peserta didik dan satuan pendidikan melalui partisipasi semesta dalam menghadapi tantangan masa depan.

Berdasarkan Dapodik tahun 2024, proporsi sekolah dengan akses ke internet untuk tujuan pengajaran pada SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB masing-masing sebesar 80,72% (delapan puluh koma tujuh puluh dua persen), 84,68% (delapan puluh empat koma enam puluh delapan persen), 89,34% (delapan puluh sembilan koma tiga puluh empat persen), 91,99% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh sembilan persen), dan 92,98%

(sembilan puluh dua koma sembilan puluh delapan persen). Capaian ini meningkat drastis dari tahun 2023. Semen tara itu, proporsi sekolah dengan akses komputer untuk tujuan pengajaran pada SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB masing-masing sebesar 12,20% (dua belas koma dua persen), 40,77% (empat puluh koma tujuh puluh tujuh persen), 48,38% (empat puluh delapan koma tiga puluh delapan persen), 54,34% (lima puluh empat koma tiga puluh empat persen), dan 19,86% (sembilan belas koma delapan puluh enam persen).

a. Dasar Hukum

- 1) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara -71- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor M2400/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025;
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor M2401/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2025;
- 6) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025; dan
- 7) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa Tahun Anggaran 2025.

b. Penerima Manfaat

Sasaran program digitalisasi pembelajaran ini merupakan seluruh satuan pendidikan berdasarkan data Dapodik.

c. Tujuan Program

Program digitalisasi pembelajaran satuan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bermutu di satuan pendidikan, terdiri dari:

- 1) perangkat media untuk pembelajaran; dan

2) konten pembelajaran

yang dilaksanakan mengacu pada program prioritas pemerintah, yaitu “Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.”

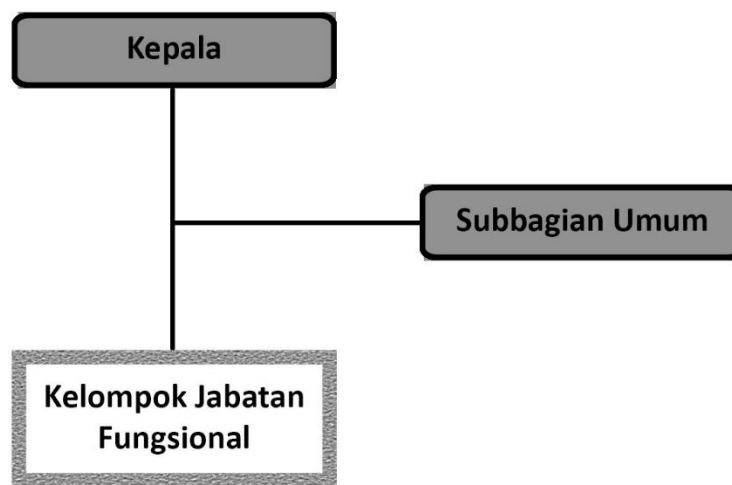
3.4 Kerangka Kelembagaan

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia yang memiliki peran krusial dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, serta Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPMP melaksanakan fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;

6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

Susunan organisasi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas Kepala, Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut gambar struktur organisasi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



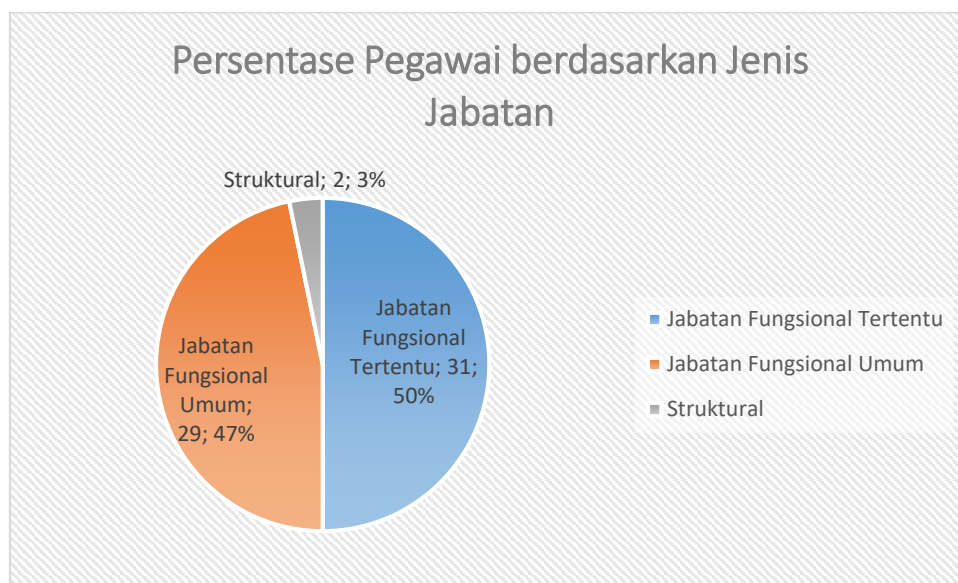
Gambar 32 Struktur Organisasi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia (SMART ASN) sesuai dengan *Roadmap* SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN.

Jumlah SDM BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) pegawai seperti yang dijelaskan pada Tabel berikut.



Gambar 33 Persentase Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 29 Pegawai BPMP berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Arsiparis Ahli Muda	1
Arsiparis Ahli Pertama	2
Arsiparis Penyelia	1
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
Kepala Subbagian Umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
Operator Layanan Operasional	2
Penata Laksana Barang Terampil	1
Penelaah Teknis Kebijakan	14
Pengadministrasi Perkantoran	5
Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	1
Pengolah Data dan Informasi	6
Pranata Komputer Ahli Pertama	1
Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
Teknisi Sarana dan Prasarana	1
Widyaprada Ahli Madya	11
Widyaprada Ahli Muda	9
Widyaprada Ahli Pertama	4
Grand Total	62

Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2025-2029

Kebutuhan ASN tahun 2025-2029 didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja. Di samping itu, proyeksi kebutuhan SDM juga mempertimbangkan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke tahun, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi kerja di masing-masing unit kerja. Tabel berikut menggambarkan proyeksi kebutuhan SDM BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai tahun 2029. Proyeksi ini juga memperhatikan pensiun pegawai yang ada di BPMP dan usul formasi yang tersedia.

Tabel 30 Proyeksi Kebutuhan SDM BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Unit Kerja	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	23	23	26	29	31

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal di BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai unit kerja yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN merupakan hal yang sangat penting.

BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu UPT di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikdasmen, terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik, meliputi enam area perubahan, yakni:

Tabel 31 Area Perubahan

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1.	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>) b. Pembentukan tim kerja RBI di BPMP Babel c. Penguatan nilai integritas, perubahan pola pikir dan budaya kinerja d. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> dengan dibentuknya tim agen perubahan di BPMP Babel e. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0. Penerapan budaya kerja RAMAH SANTUN
2.	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim SPI dan SPIP di BPMP Babel b. Penyusunan rencana kerja SPI dan SPIP c. Penguatan Sistem Manajemen Konflik d. Penguatan implementasi WBS, Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan terintegrasi dan lintas sektor (<i>collaborative</i>) b. Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil
4.	Penguatan Tata Laksana	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan b. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital) c. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
5.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Indeks Merit System 3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi b. Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi c. Assessment Pegawai d. Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik e. Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai f. Pemetaan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Inovasi 2. Indeks Pelayanan Publik	a. Penyusunan dokumen standar pelayanan b. Penyusunan alur layanan publik c. Mengembangkan budaya pelayanan prima d. Penguatan kompetensi petugas pelayanan publik e. Penilaian terhadap pelayanan melalui survey dan analisis kepuasan pelanggan

Keterangan: Menyesuaikan dengan Roadmap RBI Kemdikbudristek 2020-2024

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan ditetapkan. BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 2 (dua) sasaran kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran program/indikator kinerja program Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan dicapai selama lima tahun ke depan secara bertahap mulai tahun 2025 sampai tahun 2029. Target kinerja ditetapkan pada setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 32 Rencana Target Kinerja BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	64.06	65.34	66.64	67.98	69.34
		[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	57.61	67.75	72.64	77.72	82.61
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		[IKK 2.2] Predikat kuantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung minimal A	Predikat	AA	AA	AA	AA	AA

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Kerangka pendanaan disusun sebagai perkiraan anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian target-target yang ditetapkan. Berikut proyeksi kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk membiayai pencapaian target yang ditetapkan selama periode Renstra 2025 - 2029.

Tabel 33 Rencana Pendanaan

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RENCANA PENDANAAN (Ribu Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029
Total Kebutuhan Anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2029							
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	6.845.994	7.724.320	8.496.752	9.346.427	10.281.070
		[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan					
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kategori sangat baik	13.533.801	14.490.918	15.940.010	17.534.011	19.287.412
		[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung minimal A					

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 yang merupakan mandat dari Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Renstra ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; dan (4) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan sekaligus penguatan peran BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah.

Renstra ini menjabarkan visi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkesesuaian dengan Renstra Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen beserta sasaran program, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran program yang ditargetkan. Dengan demikian Renstra ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Rencana Strategis (Renstra) BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini diharapkan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang hendak dicapai pada periode 2025-2029. Selain itu Renstra ini merupakan dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Selain yang diuraikan di atas, Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh pihak, baik masyarakat, dan khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, selama lima tahun mendatang yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET	RENCANA PENDANAAN (Ribu Rupiah)	TARGET	RENCANA PENDANAAN (Ribu Rupiah)	TARGET	RENCANA PENDANAAN (Ribu Rupiah)	TARGET	RENCANA PENDANAAN (Ribu Rupiah)	TARGET	RENCANA PENDANAAN (Ribu Rupiah)
				2025	2026	2027	2028	2029					
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	64.06	6.845.994	65.34	7.724.320	66.64	8.496.752	67.98	9.346.427	69.34	10.281.070
		[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	57.61		67.75		72.64		77.72		82.61	
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung	[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	13.533.801	Sangat Baik	14.490.918	Sangat Baik	15.940.010	Sangat Baik	17.534.011	Sangat Baik	19.287.412
		[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung minimal A	Predikat	AA		AA		AA		AA		AA	